

Buku HPD

by Hevi Kurnia Hardini

Submission date: 06-Oct-2018 06:52PM (UTC-0700)

Submission ID: 1015133600

File name: 14._Draft_Buku_fix_143_turnitin.doc (1.31M)

Word count: 32923

Character count: 242310

BAGIAN I:
PASAR TRADISIONAL DAN PASAR MODERN

SINERGITAS KEMENTERIAN PERDAGANGAN DAN DINAS PASAR KOTA MALANG DALAM PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL

Oleh:
Ulin Nafi'ah¹

Abstraksi

Pelaksanaan otonomi daerah memberi kewenangan kepada daerah untuk mengatur daerah masing-masing sesuai dengan kebutuhannya. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya tidak menghapuskan hubungan dengan pemerintah pusat. Hubungan tersebut dapat berupa hubungan hirarkis yang bersifat vertikal, hubungan kerja fungsional ataupun hubungan kerja koordinatif. Hubungan tersebut salah satunya adalah hubungan antara Kementerian Perdagangan dengan Dinas Pasar Kota Malang dalam pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional.

Pasar tradisional yang tersebar di seluruh tanah air, kini mulai tergerus oleh globalisasi. Sementara itu, kondisi pasar tradisional di Kota Malang sebagian besar masih diperlukan pembenahan baik dari tata kelola maupun dari segi fisiknya. Argumen yang akan dikemukakan oleh penulis dalam essay ini adalah belum optimalnya kinerja dinas pasar dalam pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional. Belum adanya sinergisitas yang baik dengan Pemerintah dan Komunitas pedagang menjadi penghambat tersendiri.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Peneliti melakukan observasi dan wawancara untuk memperoleh data. Setelah data terkumpul, selanjutnya akan dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui proses editing dan interpretasi. Analisis difokuskan pada hubungan sinergi antara Kemendag dan Dinas

¹ Lia Aristawati, Jaka Bagus Hakiki dan Ramadhan Setia Nugraha

Pasar Kota Malang serta faktor-faktor penghambat pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa sinergisitas antara Kementerian Perdagangan dan Dinas Pasar Kota Malang adalah hubungan koordinatif untuk sinkronisasi kebijakan atau peraturan. Sementara itu, faktor yang menghambat pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional, yaitu: 1. Rendahnya kesadaran dari masyarakat untuk menaati peraturan yang ada; 2. Terbatasnya sumber daya manusia (SDM) yang ada pada Dinas Pasar Kota Malang, khususnya yang bertugas di Kantor Pasar; 3. Minimnya infrastruktur yang terdapat di pasar tradisional.

Kata Kunci: Sinergisitas, Pasar Tradisional, Pengelolaan dan Pemberdayaan

A. Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus daerah masing-masing sesuai dengan kebutuhannya. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya tidak serta merta menghapuskan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Hubungan tersebut dapat berupa hubungan hirarkis yang bersifat vertikal ataupun hubungan kerja fungsional.

Selain itu, terdapat pula hubungan kerja koordinatif, dimana terjadi hubungan kerja antar pejabat yang dimaksud² untuk memadukan (mengintegrasikan) dan menyelaraskan berbagai kepentingan dan kegiatan yang saling berkaitan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran bersama. Hubungan tersebut salah satunya adalah hubungan antara Kementerian Perdagangan dengan Dinas Pasar Kota Malang dalam pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional.

² Yaitu hubungan antara Kementerian Perdagangan dan Dinas Pasar Kota Malang.

Menurut Perda Provinsi Jawa Timur No.3 Tahun 2008³ pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) termasuk kerjasama dengan swasta berupa tempat usaha yang berbentuk toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil menengah, koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan melalui proses jual beli barang dagangan dengan tawar-menawar.

Sebagaimana diketahui terdapat dua jenis pasar, yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Perbedaan antara keduanya dapat dilihat secara langsung dari aspek fisik. Secara fisik bangunan pasar modern lebih baik dan memiliki fasilitas yang memadai dibanding pasar tradisional.

Pasar tradisional yang tersebar di seluruh tanah air, kini mulai tergerus oleh globalisasi. Keberadaannya semakin tersisihkan dengan adanya pasar modern dengan berbagai kelebihan fasilitas yang diberikan. Hal ini membuat pembeli lebih senang berbelanja di pasar modern daripada di pasar tradisional. Sebagaimana yang dikemukakan oleh N Dhrama bahwa rata-rata pengunjung pasar tradisional tinggal 40 persen (Republika, 2005). Sementara, di Jakarta terdapat sembilan pasar yang hampir punah karena konsumen beralih ke pasar modern (dikutip dari Leksono, 2009, p.2)⁴.

³ Perda Provinsi Jawa Timur No.3 Tahun 2008 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern di Provinsi Jawa Timur.

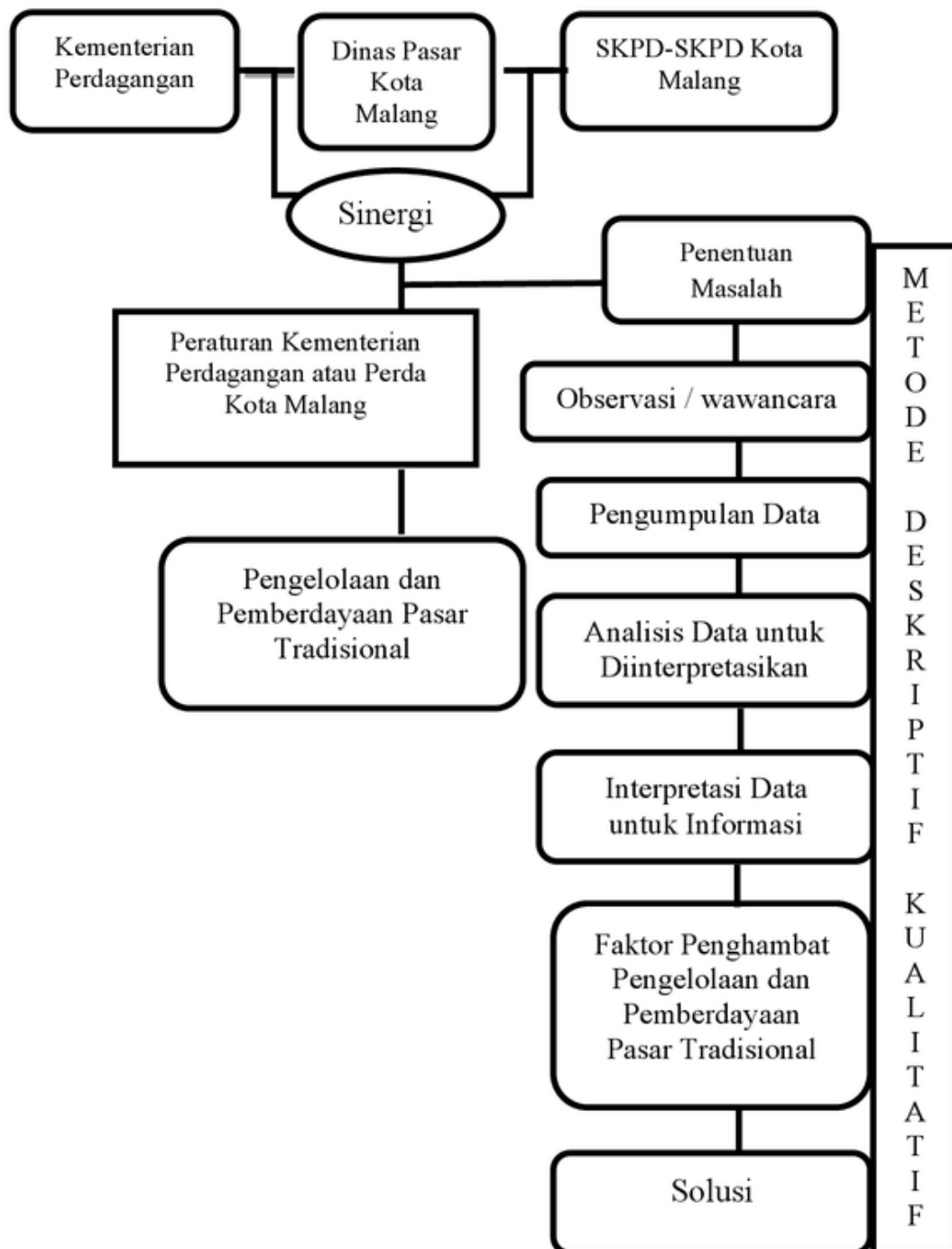
⁴ Salah satu penyebabnya adalah manajemen atau pengelolaan pasar tidak benar. Data di Jawa Barat juga menunjukkan bahwa *omzet* penjualan rata-rata turun 30-50 %, sementara rata-rata *gross profit margin* sektor ritel modern supermarket berkisar antara 25-30 sedangkan hypermarket lebih besar. Akibatnya, terdapat 20% pedagang yang gulung tikar, alih profesi menjadi pedagang kaki lima (pikiran Rakyat, 21 Mei 2007).

Sementara itu, kondisi pasar tradisional di Kota Malang sebagian besar masih diperlukan pembenahan baik dari tata kelola maupun dari segi fisiknya. Hal tersebut dapat dilihat dari tingkat kebersihannya yang masih memprihatinkan, penataan yang belum memperhatikan zonasi⁵, SDM yang tidak seimbang, keamanan yang masih kurang dan minimnya fasilitas yang ada.

Argumen yang akan dikemukakan oleh penulis dalam essay ini adalah belum optimalnya kinerja dinas pasar dalam pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional. Jumlah SDM yang kurang memadai berpengaruh terhadap penegakkan peraturan yang ada. Dengan demikian, perlu peningkatan sinergi, baik dengan Kementerian Perdagangan atau dengan SKPD lain untuk pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional. Guna mempermudah, argumen dalam penelitian ini dibangun dalam kerangka berfikir sebagai berikut:

⁵Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam Ekosistem pesisir. (Pasal 1 Angka 12 UU Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil)

Gambar 1. Kerangka Berfikir



Dari kerangka tersebut, metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Peneliti akan melakukan observasi dan wawancara untuk memperoleh data yang diperlukan. Setelah data terkumpul, selanjutnya data akan dianalisis untuk diinterpretasikan menjadi informasi. Informasi tersebut akan memberi gambaran terhadap berbagai faktor penghambat dalam pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional. Dengan demikian, dapat dikemukakan solusi dari permasalahan yang ada.

Masalah yang dibahas dalam essay ini sesuai dengan yang terdapat dalam *research proposal*, yaitu: 1. Bagaimana bentuk sinergisitas Kementerian Perdagangan dan Dinas Pasar Kota Malang dalam pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional?; 2. Faktor apa saja yang menghambat pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional?.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, sebagaimana yang dipaparkan oleh Moleong (2000) bahwa metode penelitian yang digunakan di lapangan adalah metode kualitatif dengan alasan, *pertama* lebih mudah menyesuaikan di lapangan apabila berhadapan dengan kenyataan ganda; *kedua*, metode ini menyajikan secara langsung hakikat peneliti dengan responden, dan *ketiga*, lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak pola-pola nilai yang dihadapi (dikutip dari Bagoes, 2004, p.27).

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang memberikan gambaran tentang fenomena-fenomena yang ada sebagai masalah yang diselidiki dari keadaan di lapangan sesuai dengan permasalahan penelitian. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bagoes (2004), data yang dihasilkan dengan teknik deskriptif adalah uraian dari hasil penelitian lapangan, ucapan-ucapan responden dan catatan lapangan.

Sementara itu, sumber data yang diperoleh dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder⁶. Data primer yang digunakan berupa, catatan, *recorder* dan gambar (foto) hasil observasi. Sedangkan data sekunder yang digunakan yaitu; peraturan daerah Kota Malang, buku-buku referensi yang mendukung penelitian dan profil Dinas Pasar Kota Malang.

Teknik pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan dengan observasi partisipasi⁷. Teknik lainnya yang digunakan adalah dengan wawancara mendalam yang tidak terstruktur⁸. Sementara itu, dalam pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Teknik ini bisa diartikan sebagai suatu proses pengambilan sampel dengan menentukan terlebih dahulu jumlah sampel yang hendak diambil, kemudian pemilihan sampel dilakukan dengan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, asalkan tidak menyimpang dari ciri-ciri sampel yang ditetapkan.

Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah Kasi Pemberdayaan PKL dan Pedagang pasar tradisional. Sementara itu, lokasi penelitian bertempat di Dinas Pasar Kota Malang dan Pasar Madyopuro. Pemilihan pasar Madyopuro sebagai salah satu lokasi penelitian berkaitan dengan klasifikasi pasar, dimana pasar Madyopuro merupakan pasar kelas I, namun dalam pengelolaannya belum optimal karena minim SDM⁹.

⁶ Sumber data primer adalah sumber data yang didapatkan secara langsung oleh peneliti. data sekunder adalah data yang didapat secara tidak langsung.

⁷ Observasi partisipasi di mana peneliti melakukan interaksi secara langsung dengan pedagang yang ada di pasar tradisional.

⁸ Wawancara mendalam yang tidak terstruktur adalah wawancara terhadap informan dengan menggunakan pedoman wawancara, yaitu membuat catatan tentang pokok-pokok yang akan ditanyakan sesuai dengan tujuan penelitian. Pokok-pokok yang dirumuskan tidak perlu ditanyakan secara berurutan. Demikian pula penggunaan dan pemilihan kata-kata untuk wawancara (Bagoes, 2004, p.29).

⁹ Pasar kelas I adalah pasar yang retribusinya menyumbang atau mendukung pendapatan asli daerah (PAD) yang cukup tinggi.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui proses editing dan proses interpretasi. Dari data tersebut akan mengungkapkan peristiwa sebagaimana adanya dalam bentuk kalimat. Analisis difokuskan pada hubungan sinergi antara Kemendag dan Dinas Pasar Kota Malang serta faktor-faktor penghambat pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional.

C. Hasil dan Analisa

1. Sinergisitas Kementerian Perdagangan dan Dinas Pasar Kota Malang dalam Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional

Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional, Dinas Pasar Kota Malang bekerjasama dengan beberapa SKPD dalam lingkungan Pemerintahan Kota Malang. Sebagaimana yang dituturkan oleh Bambang Pangestu, salah satu pegawai Kasi Pembinaan PKL:

“Hubungan hirarkis secara vertikal itu, Dinas Pasar bertanggung jawab kepada Wali Kota. Sedangkan hubungan secara horizontal dilakukan dengan SKPD-SKPD terkait dalam lingkungan Pemkot Malang, misalnya dengan Dinas PU, Disperindag, seperti itu. Kalau dengan kementerian Perdagangan itu, hubungannya hanya koordinasi dalam sinkronisasi peraturan”.

Dari penuturan tersebut dapat diartikan bahwa dalam pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional, Dinas Pasar bekerjasama dengan beberapa SKPD yang ada di lingkup Pemkot Malang. Kerjasama tersebut diantaranya yaitu dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) untuk melakukan pengawasan dalam hal standarisasi berat timbangan agar tidak terjadi kecurangan yang merugikan pembeli. Selain itu, dalam penataan dan

pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Dinas Pasar berkoordinasi dengan Satpol PP.

Sementara, hubungan kerja secara vertikal Dinas Pasar Kota Malang adalah dengan Wali Kota. Dinas Pasar bertanggung jawab langsung kepada Wali Kota Malang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya¹⁰. Hal tersebut sesuai dengan otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada pemerintahan daerah (*local Government*) untuk mengurus urusan dan kepentingan daerah masing-masing¹¹. Sedangkan hubungan dengan Pemerintah Provinsi ataupun dengan Kementerian Perdagangan hanya sebatas hubungan Koordinasi dalam sinkronisasi kebijakan yang ada.

Sinkronisasi tersebut salah satunya adalah tentang Peraturan Presiden (Perpres) No.112 Tahun 2007, Permendag N0.53 Tahun 2008 dan Perda Pemprov Jatim N0.3 Tahun 2008¹². Peraturan tersebut mengatur tentang zonasi maupun jadwal operasi pasar modern. Namun sayangnya, peraturan tersebut belum diturunkan dalam bentuk Perda Kota Malang. Peraturan yang ada saat ini berkaitan dengan pasar tradisional adalah Perda Kota Malang N0.12 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Pasar Daerah dan Tempat Berjualan. Sehingga, hubungan

¹⁰ Hubungan kerja hirarkis yang bersifat vertikal adalah hubungan kerja timbal balik antara atasan dengan bawahannya, dari tingkat pejabat tertinggi secara berjenjang sampai ke tingkat pejabat paling rendah. Dalam jenis hubungan vertikal ini terdapat hubungan perintah dan tanggung jawab sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing (Kansil, 2011, p.126).

¹¹ Menurut Antoft & Novack (1998, p.23-24) mengungkapkan manfaat *local goverment* dalam beberapa hal, yakni: *accountability, accessibility, responsiveness, opportunity for experience, public choice, spread of power, dan democratic values* (Muluk, 2009, p.5).

¹² Perpres No.112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; Permendag No.53 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; Perda Provinsi Jawa Timur No.3 Tahun 2008 tentang Perlindungan, Pemebrdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern di Provinsi Jawa Timur.

sinergisitas antara Kemendag dan Dinas pasar Kota Malang masih timpang.

2. Faktor-faktor Penghambat Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional

a. Kinerja Otoritas Pasar

Dihadapkan pada dinamika ekonomi yang semakin global dan kompetitif, kinerja pasar tradisional di berbagai wilayah di Indonesia terjadi stagnasi inovasi, sehingga tidak mampu mengimbangi perubahan. Aparat yang terbatas juga turut berpengaruh terhadap kinerja pasar tradisional.

Hasil penelitian yang dilakukan di Pasar Madyopuro, Kecamatan Kedung Kandang, dimana pada pasar tersebut perbandingan antara pegawai pasar dengan jumlah pedagang tidak seimbang. Sebagaimana yang dituturkan oleh Kepala Kantor Pasar Madyopuro, Imam Fauzi, jumlah pegawai pasar di Madyopuro ada tujuh orang yang terbagi atas satu orang Kepala Pasar, empat Pasukan Kuning, satu Juru Pungut, satu Keamanan dan Parkir. Sementara itu, jumlah pedagang yang ada kurang lebih 400 pedagang.

Artinya jumlah SDM yang minim tidak seimbang dengan jumlah pedagang. Hal tersebut akan berdampak pada, *pertama* kebijakan otoritas pasar dalam menjaga kebersihan pasar. *Kedua*, kinerja otoritas pasar dalam menangani keamanan pasar. *Ketiga*, kinerja otoritas pasar dalam menangani ketertiban pasar. *Terakhir*, kebijakan otoritas pasar dalam menangani retribusi pasar.

b. Infrastruktur Pasar

Infrastruktur pasar menjadi permasalahan klasik dari tahun ke tahun. Pasar tradisional yang ada di Indonesia sebagian besar berumur lebih dari 25 tahun. Sebagaimana menurut keterangan Asosiasi Pengelola Pasar Indonesia (Asparindo), sebanyak 70 % dari 13.000 bangunan pasar di Indonesia sudah berumur lebih dari 20 tahun

(www.feb.ub.ac.id, Desember 2011). Namun, dalam kenyataannya masih minim infrastruktur.

Sejalan dengan hal tersebut, dari hasil penelitian di Pasar Madyopuro terdapat dua MCK, satu Mushola, dan *radio land*. Hal tersebut juga tidak jauh berbeda dengan pasar-pasar tradisional lainnya yang ada di Kota Malang. Sebagaimana data dari Profil Dinas Pasar Tahun 2011, dari 13 pasar yang masuk dalam kategori kelas I , sebagian besar memiliki fasilitas yang minim jika dibandingkan dengan pasar modern.

Upaya pembangunan atau renovasi pasar tradisional selalu tidak terlepas dari kepentingan oknum penguasa kota. Sebagaimana yang dituturkan oleh salah satu pegawai Dinas Pasar:

“untuk relokasi PKL dalam satu lokasi itu masalahnya sangat kompleks, kita terhambat masalah lahan. Lahan Pemkot yang di tengah kota kebanyakan sudah dilakukan “tukar guling” dengan tanah milik investor yang ada di pinggiran kota, terus siapa juga yang mau kalau direlokasi di pinggiran”

Selain itu, sebagaimana diketahui bersama, pendanaan untuk pengadaan ataupun perawatan infrastruktur pasar tradisional bersumber dari APBD. Hal ini menjadi permasalahan tersendiri, karena dalam pengajuan program yang didanai oleh APBD harus melewati proses politik di DPR yang syarat akan kepentingan politik.

Selain itu, sumber dana dari APBD seringkali terhambat dalam proses pencairannya, sehingga membuat perawatan terhadap infrastruktur terbengkalai. Sebagaimana yang dituturkan oleh salah satu pegawai Kasi Pemberdayaan PKL:

“Untuk perawatan, pembangunan itu semua berasal dari APBD. masalahnya, tidak semua program yang kita ajukan itu disetujui oleh DPR, sehingga tidak bisa didanai oleh APBD. Untuk pengadaan infrastruktur itu menunggu pencairan dana APBD”.

c. Pedagang

Sebagaimana diketahui, pasar tradisional mengandalkan sistem harga, dimana pedagang tidak menentukan harga barang yang dijual secara *rigid* seperti pasar modern. Harga di pasar tradisional terbentuk melalui tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Sementara itu di pasar modern pengelolaannya dicirikan dengan penyediaan barang dan jasa yang mutu dan pelayanannya disertai standar tertentu¹³.

Pola transaksi penjual yang sekedar ada untung dan tidak memburu keuntungan yang maksimal, bila meminjam perspektif Capra (2000, p.25-26), adalah manifestasi adanya peran nilai moral yang menyertai kesakralan kolektif dan memuat sebuah tema etika bisnis (dikutip dari Leksono, 2006, p.150). Hal ini membuat pola hubungan emosional antar pedagang, sehingga terdapat rasa “sungkan” tidak enak atau tidak nyaman untuk bersaing sesama pedagang, yang menghambat zonasi dalam penataan pasar tradisional. Sebagaimana yang dipaparkan oleh salah satu pedagang sayur di Pasar Madyopuro:

“sebenarnya ya sudah diatur, tapi gak ada yang mau. Kemarin sudah dikumpulkan semua, mau ditata ayam-ayam, sayur-sayur, ikan sama ikan, tapi gak mau takutnya kalau ayam sama ayam langganannya berkurang”

Hal serupa juga diungkapkan oleh Kepala Pasar Madyopuro yang mengungkapkan bahwa penataan pasar terkendala oleh sikap pedagang yang enggan untuk dikelompokkan berdasarkan jenis barang yang dijual. Mereka beranggapan jika dikelompokkan maka langganan mereka akan berkurang.

Zonasi pasar juga terhambat oleh kepemilikan bedak atau kios. Jika pada awal kesepakatan penataan zonasi pemilik pertama adalah penjual sayur, namun ketika bedak tersebut sudah berpindah

¹³ Pasar modern antara lain *mall*, *supermarket*, *department store*, *shopping centre*, waralaba, toko mini swalayan, pasar serba ada dan sebagainya.

kepemilikan pada pihak kedua (karena dijual atau usahanya dilanjutkan oleh anaknya), maka penataan zonasi akan sulit untuk dilakukan.

Sementara itu, berkaitan dengan *omzet* jual pasar tradisional Kasi Pemberdayaan PKL Dinas Pasar Kota Malang, Hari Tjahjono merasa optimis bahwa pasar akan terus bertahan, mengingat pasar memiliki pangsa pasar sendiri. Senada dengan Leksono (2009, p.179) yang berpendapat bahwa dari segi kontinuitas sejalan dengan perkembangan penduduk, kemajuan tingkat kesejahteraan sosial ekonomi dan daya beli, perkembangan tuntutan dan tingkat kepuasan, pasar secara normatif sesungguhnya tidak akan kehilangan pangsaanya. Hal ini dapat terlihat dari penuturan salah satu pedagang sayur di Pasar Madyopuro:

“Kalau biasanya jam 2 malam sampai jam 12 siang. Kalau biasanya ya 800 ribu, ramainya hari Sabtu, Minggu karena banyak orang bayaran”.

Dari penuturan tersebut menunjukkan terdapat siklus mingguan yang dihadapi oleh pedagang yaitu setiap hari Sabtu dan Minggu, dimana pada hari tersebut pedagang menikmati *omzet* jual yang lebih banyak dibanding hari lain. Namun, gambaran mengenai *omzet* penjualan yang dialami para pedagang pada umumnya beragam, ada yang cenderung mengalami kenaikan ada pula yang cenderung mengalami penurunan.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Pada dasarnya pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional oleh Dinas Pasar Kota Malang belum optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari Jumlah SDM yang kurang memadai, sehingga berpengaruh terhadap penegakkan peraturan yang ada. Dengan demikian, perlu peningkatan sinergi, baik dengan Kementerian Perdagangan atau dengan SKPD lain untuk pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional.

Sinergisitas yang terjalin antara Kementerian Perdagangan dan Dinas Pasar Kota Malang adalah hubungan secara koordinatif untuk sinkronisasi kebijakan atau peraturan. Meskipun nyatanya tidak semua peraturan disinkronisasi oleh daerah. Misalnya saja Peraturan Kementerian Perdagangan No.53 tahun 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang belum diturunkan dalam bentuk Perda Kota Malang. Sedangkan untuk hubungan kerja hirarkis secara vertikal Dinas Pasar bertanggung jawab langsung kepada Walikota.

Sementara itu, berkaitan dengan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional yang dilakukan oleh Dinas Pasar terdapat faktor-faktor yang menghambatnya, yaitu: 1. Rendahnya kesadaran dari masyarakat untuk menaati peraturan dan kesepakatan yang ada; 2. Terbatasnya sumber daya manusia (SDM) yang ada pada Dinas Pasar Kota Malang, khususnya yang bertugas di Kantor Pasar; 3. Minimnya infrastruktur yang terdapat di pasar tradisional.

2. Saran

Pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional tidak akan berjalan secara optimal jika satu sama lain kelembagaan berjalan secara sendiri-sendiri. Sehingga perlu adanya sinergi dari ketiga lembaga (pasar, pemerintah dan komunitas) menuju ke arah kinerja yang lebih kreatif. Perlu adanya partisipasi dari pedagang untuk mematuhi peraturan yang ada. Partisipasi tersebut dapat diwujudkan dengan melakukan sosialisasi secara berkelanjutan terhadap para pedagang. Dinas Pasar sebagai pemegang otoritas utama dalam pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional harus meningkatkan kapasitasnya. Upaya tersebut harus diimbangi dengan kebijakan dari Pemerintah Kota Malang untuk memprioritaskan pendanaan untuk menjaga keberlanjutan pasar tradisional dengan penyediaan infrastruktur yang memadai. Dengan sinergitas ketiga komponen tersebut, maka pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional akan lebih optimal.

Daftar Pustaka

Buku

Dinas Pasar Kota Malang, 2011, *Profil Dinas Pasar Kota Malang Tahun 2011*, Dinas Pasar, Malang

Ikbar, Yanuar 2012, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif Panduan Membuat Tugas Akhir/Karya Ilmiah*, PT. Refika Aditama, Bandung

Kansil, C.S.T, dkk 2011, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta

Leksono 2009, *Runtuhnya Modal Sosial, Pasar Tradisional Perspektif Emic Kualitatif*, CV.Citra Malang, Malang

Mantra, Ida Bagoes 2004, *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Muluk, Khairul 2009, *Peta Konsep Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*, ITS Press, Surabaya

Peraturan

Peraturan Daerah Kota Malang No.12 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Pasar Daerah dan Tempat Berjualan Pedagang

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.53 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Jurnal

Bintoro, Rahadi Wasi 2012 “Aspek Hukum Zonasi Pasar Tradisional Dan Pasar Modern” , Jurnal Dinamika Hukum, Vol.10 No. 3 September 2010 (fh.unsoed.ac.id)

Fathia , Maharani 2013, “Efektifitas Pasal 23 Ayat 2 Peraturan Daerah Kota Malang No. 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian dan Perdagangan Terkait Jarak Pendirian Minimarket dengan Pasar Tradisional (Studi di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang)” *Artikel Ilmiah*, diakses tanggal 2 April 2013 (hukum.ub.ac.id)

Mulyadi, “Model Pengelolaan Pasar Tradisional dalam Perspektif Kemandirian Daerah Kota Surakarta “, diakses tanggal 2 April 2013 (e-journal.stie-aub.ac.id)

Research Proposal

Nafi’ah, Ulin dkk 2013, Sinergisitas Kementerian Perdagangan dan Dinas Pasar Kota Malang dalam Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional

USAHA WARALABA DAN PERDAGANGAN TRADISIONAL DI PERSIMPANGAN KEBERPIHAKAN

Oleh :
Pandu Phati¹

Abstraksi

Ekonomi Indonesia yang semakin berkembang di era globalisasi memicu berkembangnya berbagai bentuk perdagangan. Waralaba merupakan salah satu bentuk usaha perdagangan yang memajukan perekonomian di Indonesia. Akan tetapi usaha waralaba di Indonesia memiliki dampak negatif terhadap pedagang tradisional, karena pedagang tradisional kesulitan dalam mengembangkan usahanya. Adapun argumen kami ialah Disperindag sebagai SKPD yang menangani dan memiliki hak dan pemberi kebijakan-kebijakan kepada waralaba selama ini seringkali menyalahi aturan. Hal tersebut karena Disperindag secara dominan masih mendukung keberadaan usaha Waralaba sehingga, regulasi yang harusnya dibuat bisa memberi dampak yang positif, tetapi pada kenyataannya regulasi yang telah dibuat belum mampu menyesuaikan dengan keadaan sebagai mana mestinya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Dimana metode kualitatif menitikberatkan permasalahan pada fenomena sosial dan gejala sosial yang berkembang sesuai dengan kenyataan yang ada. Regulasi-regulasi yang telah dibuat oleh Pemerintah sudah ada, tetapi banyak mengalami hambatan, dalam arti kurang tegas dalam merealisasikannya yang mengakibatkan waralaba itu menjadi dominan dan merugikan pedagang tradisional. Selain itu, apabila terus dibiarkan kedepannya akan semakin menghilangkan keberadaan para pedagang tradisional.

¹ Erza Yuniantika, Yanuar Fikri dan Faisal Ridho

Dari hasil penelitian, tidak ada pernyataan yang menunjukkan adanya keberpihakan Disperindag terhadap pengusaha waralaba terkait jarak minimal antara waralaba dengan pedagang tradisional, namun kenyataannya tidak demikian. Masih sering dijumpai jarak antara waralaba dengan pedagang tradisional yang tidak sesuai aturan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Disperindag belum berhasil 100% dalam mensejahterahkan para pedagang tradisional yang ada di Kota Malang. Hal ini salah satunya karena kurangnya pengawasan serta cara penerbitan SIUP yang tidak sesuai dengan prosedur.

Kata Kunci: Waralaba, Pedagang Tradisional, Disperindag.

A. Latar Belakang

Ekonomi Indonesia yang semakin berkembang di era globalisasi memicu berkembangnya berbagai bentuk perdagangan. Waralaba merupakan salah satu bentuk usaha perdagangan yang memajukan perekonomian di Indonesia. Akan tetapi usaha waralaba di Indonesia memiliki *impact* negatif terhadap pedagang tradisional, karena pedagang tradisional kesulitan dalam mengembangkan usahanya. Terlebih lagi, masyarakat lebih memilih usaha waralaba untuk memenuhi kebutuhan mereka, dikarenakan *pertama*, pelayanan prima yang lebih baik. *Kedua*, display yang memudahkan pelanggan untuk memilih produk yang dibutuhkan, dan *terakhir*, produk yang disediakan lebih banyak jenis dan ukurannya. Hal ini mengakibatkan pedagang tradisional mengalami penurunan penghasilan.

Menteri Perdagangan sebagai aktor pusat yang memiliki wewenang dalam pemberian izin usaha, pada kenyataannya menerbitkan izin yang relatif mudah kepada para pengusaha waralaba. Sebaliknya, pemerintah terkesan tidak protektif kepada pedagang tradisional. Hal ini ditunjukkan dengan semakin banyaknya usaha tradisional yang tidak mampu bersaing dengan pengusaha waralaba di Indonesia yang semakin menjamur. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah pusat

melalui Dinas Perdagangan di daerah seharusnya selektif ketika memberi izin pendirian usaha waralaba, sehingga tidak menjadi masalah bagi pedagang tradisional dalam mengembangkan pemasaran. Sehingga salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah berkaitan dengan prosedur penerbitan SIUP.

Prosedur penerbitan SIUP menjadi hal yang penting diperhatikan oleh Pemerintah Daerah karena SIUP memiliki peran yang penting dalam menjalankan suatu usaha, sehingga Pemerintah tidak boleh sembarangan memberikan SIUP. Pada tingkat provinsi, aktor yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan SIUP adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan². Sementara itu, di tingkat Kabupaten/kota, Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga memiliki peran yang untuk menerbitkan SIUP. Salah satunya adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Malang, yang memiliki tupoksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 56 Tahun 2008 tentang perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang Perindustrian dan Perdagangan.

Realitanya di Kota Malang, persaingan antara pedagang tradisional dan pengusaha waralaba seperti *Indomart*, *Alfa Mart*, dan semacamnya sangat tidak sesuai dengan peraturan. Hal ini salah satunya berkaitan dengan jarak dan batas berdirinya Minimarket³. Selain itu, keberadaan waralaba kini semakin tidak terkendali,

² Pembentukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang nomor 6 tahun 2008 tentang organisasi dan tatakerja dinas daerah, dimana pada pasal 2 disebutkan bahwa dengan peraturan daerah tersebut dibentuk dinas termasuk di dalamnya adalah dinas perindustrian dan perdagangan yang memiliki tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perindustrian dan perdagangan.

³ Pasal 23 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang penyelenggaraan usaha perindustrian dan perdagangan, menyebutkan: (2) Terhadap pendirian Toko Modern yang dilakukan oleh pengelola jaringan minimarket hanya dapat dilakukan pada jarak 500 (lima ratus) meter antar minimarket, toko dan pasar tradisional/usaha perdagangan mikro.

dikarenakan setiap ada *Indomaret* pasti ada *Alfa Mart*. Mereka berdampingan dengan jarak yang sangat dekat yaitu kurang dari 500 meter. Hal ini tentu saja membuat pedagang tradisional kalah bersaing dengan *Indomaret* dan *Alfa Mart*. Ini membuktikan bahwa peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan selaku aktor daerah kurang tegas terhadap pelaku waralaba. Dalam hal ini berkaitan dengan pemberian izin oleh Disperindag yang relatif longgar kepada kedua perusahaan tersebut. Akibatnya, dapat mematikan pedagang tradisional.

Observasi awal kami mengenai menjamurnya waralaba dan ‘gulung tikarnya’ pedagang tradisional di Kota Malang, terlihat pada semakin menjamurnya minimarket di sepanjang jalan raya Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru. Terlebih lagi lokasi mereka saling berdampingan dengan jarak yang tidak sesuai dengan peraturan. Ironisnya, kawasan ini terbilang sangat ramai dengan pedagang tradisional yang kini mulai merugi dan tidak sanggup bersaing dalam menarik konsumen. Selain itu, di Jalan Sarangan terdapat minimarket yang letaknya kurang dari 500 meter dari Pasar Tawangmangu dan juga terdapat *Alfa Mart* dan *Indomart* yang bersebelahan yang hanya terpisahkan dengan sebuah rumah makan cepat saji (<http://hukum.ub.ac.id>).

Fokus yang ingin diteliti dalam essay ini adalah tentang keberpihakan regulasi aktor pusat dan daerah terhadap usaha waralaba dan pedagang tradisional. Hal penting lain yang ingin dikaji adalah, tentang penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)⁴ oleh Dinas perindustrian dan Perdagangan yang dinilai mengalami kegagalan. Contohnya: 1. Pendirian usaha waralaba yang dekat dengan warung

⁴**Surat izin usaha perdagangan** seperti yang kita kenal dengan singkatan SIUP yaitu surat izin untuk bisa melaksanakan usaha perdagangan. SIUP wajib dimiliki oleh orang atau badan yang memiliki usaha perdagangan. SuratIzin Usaha Perdagangan ini berfungsi sebagai alat atau bukti pengesahan dari usaha perdagangan yang pelaku usaha lakukan.

atau toko tradisional; 2. Terlalu dekatnya jarak antar minimarket waralaba yang jelas menyalahi Peraturan daerah Kota Malang.

Senada dengan fokus kami diatas, adapun argumen kami ialah Disperindag sebagai SKPD belum optimal dalam menjalankan kewenangannya terkait dengan kebijakan tentang waralaba. Hal tersebut karena Disperindag lebih condong mendukung keberadaan usaha waralaba, misalnya menurut Pasal 4 ayat (1) Permendag No. 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang perubahan No 36/M-DAG/PER/9/2007, pengurusan SIUP dikecualikan terhadap:

- a. Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di luar sektor perdagangan;
- b. Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan;
- c. Perusahaan Perdagangan Mikro dengan kriteria sebagai berikut:
 1. usaha perseorangan atau persekutuan;
 2. kegiatan usaha diurus, dijalankan, atau dikelola oleh pemiliknya atau anggota keluarga/kerabat terdekat; dan
 3. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. (<http://m.hukumonline.com>)

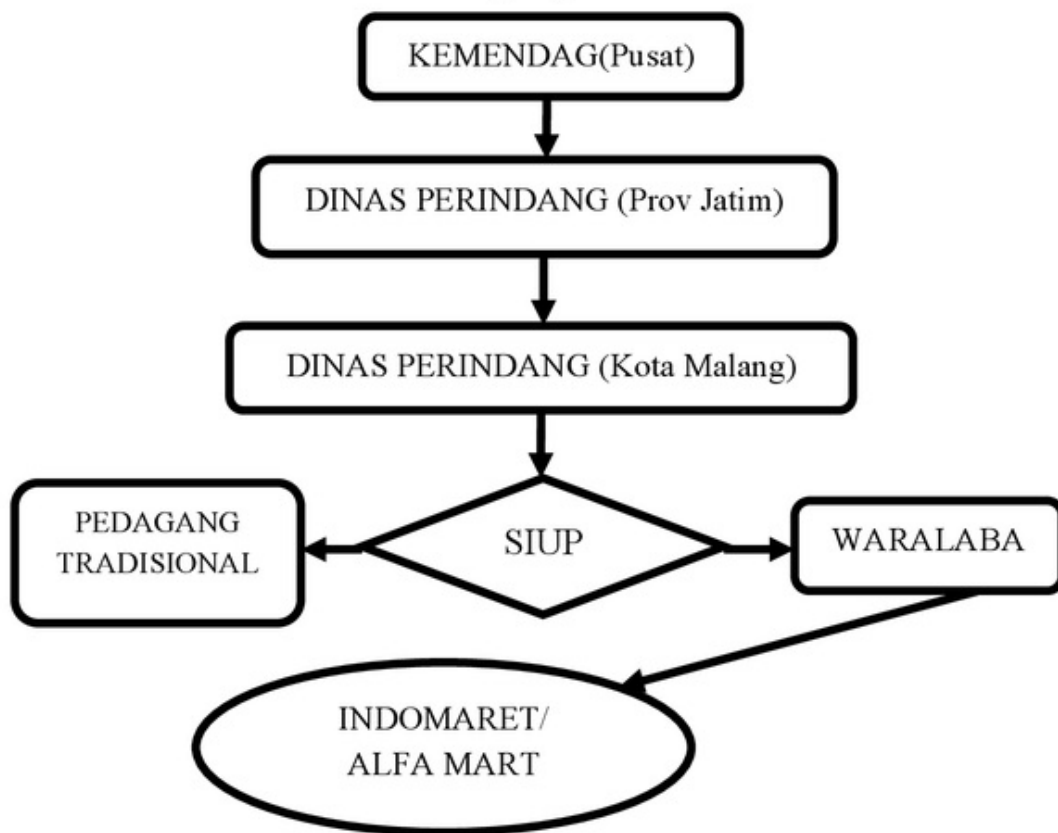
Dengan demikian, bisa dikatakan regulasi yang ada pada dasarnya lebih berpihak pada para pewaralaba dalam menjalankan usahanya. Hal ini kerap kali menjadikan senjata para pengusaha waralaba bahwa bisnis waralaba yang dijalankan masih mengikut prosedur dari pemerintah.

Seharusnya regulasi yang dibuat bisa memberi dampak yang positif, tetapi pada kenyataanya regulasi yang telah dibuat belum mampu menyesuaikan dengan keadaan. Inilah yang harus diperbaiki oleh pemerintah dalam menegakkan aturan-aturan yang ada agar tidak merugikan pihak manapun, sehingga tercipta suatu keseimbangan dan persaingan yang sehat dalam perdagangan, antara waralaba dan pedagang tradisional.

Perlu adanya alur yang memiliki tahapan-tahapan yang sistematis dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah melalui Dinas-dinas yang

berperan aktif dalam Perdagangan di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk menjalankan regulasi yang sehat dan seimbang antara objek-objek seperti usaha waralaba dan pedagang tradisional serta objek-objek lain yang juga menjadi pantauan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Hubungan regulasi tersebut dapat dilihat pada bagan berikut:

Bagan 1. Hubungan Pusat dan Daerah dalam Regulasi Waralaba dan Pedagang Tradisional



Sumber: Data Diolah

Masalah yang dibahas dalam essay ini, yaitu: 1. Bagaimana keberpihakan regulasi aktor pusat dan daerah terhadap fenomena waralaba?; 2. Bagaimana regulasi Disperindag dalam hal penerbitan SIUP pada usaha waralaba di Kota Malang?.

B. Metode Penelitian

Dalam essay ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Dengan metode kualitatif menitikberatkan permasalahan pada fenomena sosial dan gejala sosial yang berkembang sesuai dengan kenyataan yang ada. Metode kualitatif juga menerapkan kajian tentang proses pembuatan keputusan ditingkat manajemen suatu kegiatan usaha. Melihat fenomena maraknya usaha waralaba vs pedagang tradisional, dengan menggunakan metode kualitatif dapat membahas dan mengungkapkan permasalahan sosial yang ada di kalangan masyarakat. Tipe yang disusun adalah penelitian Deskriptif dan teknik penyimpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi.

C. Hasil dan Analisa

1. Keberpihakan Regulasi Aktor Pusat dan Daerah Terhadap Fenomena Waralaba

Bisnis atau usaha waralaba merupakan kegiatan usaha penjualan barang secara retail kepada masyarakat luas. Begitu populernya kegiatan usaha ini sehingga cepat sekali berkembang dan meliputi berbagai jenis bidang usaha. Tidak terkecuali di Indonesia. Jenis usaha waralaba yang mendominasi di Indonesia dan yang tersebar di daerah-daerah seperti perdagangan makanan dan minuman berupa Minimarket atau Supermarket. Namun waralaba yang berkembang di zaman modern ini menimbulkan banyak masalah yang akibatnya merugikan masyarakat kecil seperti pedagang tradisional. Apabila ini berlanjut, maka kapitalisme semakin menguasai perekonomian di Indonesia.

Berdasarkan observasi yang kami lakukan, terdapat pelaku waralaba yang melanggar peraturan/regulasi yang ada. Peraturan yang dilanggar itu mengenai jarak minimal antara minimarket, yang terkandung dalam Pasal 23 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010. Dimana dilapangan, kami mendapati minimarket yang berdekatan dengan jarak kurang dari 500 M. Minimarket tersebut

terdapat di Jalan Tlogomas, masuk di daerah perumahan Permata. Dimana pada lokasi tersebut terdapat *Alfa mart* yang bersebelahan dengan minimarket *Permata mart* yang hanya di pisahkan oleh TK.

Dalam pembahasan ini, kama akan mengupas lebih dalam tentang permasalahan-permasalahan waralaba di Kota Malang. Dimana kami lebih memfokuskan mengenai keberpihakan regulasi aktor pusat dan daerah, dalam hal ini kota 'Malang' terhadap fenomena waralaba. Dari data yang kami dapatkan, menunjukkan bahwa regulasi sudah ada dan sudah dijalankan oleh pemerintah pusat kepada daerah yaitu Disperindag untuk mentertibkan para pedagang atau penguasaha waralaba, yaitu: 1. Adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 mengenai Waralaba secara umum; 2. Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 12/M-DAG/PER/3/2006 mengenai ketentuan dan tata cara penerbitan surat tanda pendaftaran usaha Waralaba; 3. Permendag No. 31 Tahun 2008 mengenai Penyelenggaraan Waralaba, dan 4. Peraturan Walikota Malang Nomor 56 tahun 2008 mengenai uraian tugas pokok, fungsi dan tata kerja Disperindag (Kepala Disperindag).

Tetapi nyatanya, adanya peraturan tersebut belum mampu mengatur para pengusaha waralaba agar bisa berjalan sesuai peraturan. Hal tersebut karena di Kota Malang masih banyak melanggar peraturan dalam hal pendirian Minimarket, dalam hal ini di tunjukan pada waralaba *Indomaret* dan *Alfa Mart*, dimana keduanya selalu berdekatan dalam mendirikan Toko. Selain itu, pendirian minimarket tersebut juga berdekatan dengan pedagang tradisional atau pasar tradisional. Sementara itu, Disperindag justru menuturkan bahwa yang berhubungan para waralaba yang berdekatan dengan penguasa kecil atau pedagang tradisional tidak semuanya melanggar aturan, karena harus diliat secara menyeluruh terlebih dahulu. Apabila melihat dari prosedur SIUP, ada beberapa kriteria yang wajib melengkapi SIUP, diantaranya yaitu: apabila para pedagang tradisional tersebut menggunakan modal yang minim dalam artian 50 juta kebawah maka

tidak diwajibkan memiliki SIUP, dengan begitu waralaba tidak serta merta telah melakukan pelanggaran hukum. Hanya saja kita bisa pahami bahwa hal tersebut harus di atasi, karena merugikan pedagang tradisional (Kepala Disperindag).

Adapun teori yang kami gunakan untuk menguatkan esay ini adalah mengenai “Laissez-Faire” yang merupakan bentuk Ke-Egoisan dari para pemilik pemodal besar dalam mengatur tatanan Ekonomi (Marx). Analisis kami ialah gaya perekonomian yang kini berjalan di Indonesia sudah di pengaruhi gaya Kapitalisme sehingga pemodal besar mencari cara untuk menguasai ekonomi dan selalu melawan serta mencari sela untuk menembus peraturan-peraturan pemerintahan, agar bisa menjalankan roda bisnis yang ingin dicapai.

Teori selanjutnya yang kami anggap berhubungan dengan esay ini ialah Teori Neo-liberal, yang merupakan buah dari pemikiran politik yang sederhana, menawarkan penyederhanaan politik sehingga pada titik tertentu politik tidak lagi mempunyai makna, selain apa yang ditentukan oleh pasar dan pengusaha. Dalam Pemikiran Neo-liberal, politik adalah keputusan-keputusan yang menawarkan nilai-nilai, sedangkan secara bersamaan neo-liberal menganggap hanya satu cara rasional untuk mengukur nilai, yaitu pasar. Semua pemikiran di luar rel pasar dianggap salah (www.acehMarxist.com). Sehingga analisis kedua kami mengenai Teori liberal dalam jangkauan ekonomi ialah dimana pemerintah tidak memiliki kekuatan dalam mengantisipasi perdagangan luas akan menjadi tidak berdaya, dan bahkan malah bisa digerakkan oleh pihak luar ataupun pihak dalam negeri/kapitalisme lokal atau asing. Peraturan-peraturan yang telah dibuat hanya menjadi formalitas. Dimana pihak luar dapat melawan dan memainkan sesuka hati. Adapun keterangan mengenai hal tersebut bahwa disperindag mengatakan bahwa ini memang masalah yang sedang dicari permasalahannya, hanya saja masih dirundingkan untuk mencari jalan keluar. Adapun usulan yang di ajukan berupa peraturan yang lebih kuat

dan lebih mendorong para waralaba agar lebih *competitive* dalam menjalankan bisnis atau badan usahanya.

Data yang kami dapat mengenai rumusan masalah yang pertama ialah, di Jalan Sarangan terdapat minimarket yang letaknya hanya kurang dari 500 meter dari Pasar Tawangmangu dan juga terdapat *Alfa Mart* dan *Indomart* yang bersebelahan yang hanya terpisahkan dengan sebuah rumah makan cepat saji (<http://hukum.ub.ac.id>). Jadi bisa kita pahami bahwa regulasi sudah ada, tetapi gaya pemerintahan yang tidak tegas mengakibatkan regulasi-regulasi menjadi percuma dan belum bisa menyelaraskan keberadaan waralaba dan pedagang tradisional.

2. Regulasi Disperindag dalam Penerbitan SIUP pada Usaha Waralaba di Kota Malang

Menanggapi problem yang kedua, kami menganalisis hasil observasi yang kami pahami mengenai prosedur yang ada dalam regulasi penerbitan SIUP bagi usaha waralaba dan usaha tradisional yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Permendag No. 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan Permendag No. 36/M-DAG/PER/9/2007, pengurusan SIUP dikecualikan terhadap:

1. Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di luar sektor perdagangan;
2. Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan;
3. Perusahaan Perdagangan Mikro dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. usaha perseorangan atau persekutuan;
 - b. kegiatan usaha diurus, dijalankan, atau dikelola oleh pemiliknya atau anggota keluarga/kerabat terdekat; dan memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Setelah memahami dan menganalisis dari regulasi diatas, kami berpendapat bahwa regulasi yang ada memang menguntungkan usaha

waralaba, karena kita ketahui bahwa para pengusaha waralaba memiliki modal yang besar. Sehingga bentuk regulasi di atas sangat mendukung keberadaan waralaba. Ketika usaha waralaba berdampingan dengan pengusaha kecil/pedagang tradisional, tidak bisa disalahkan karena pedagang tradisional yang tergolong mikro dalam artian pemodal kecil tidak harus memiliki SIUP. Waralaba dapat dikatakan bersalah apabila minimarket yang berdekatan memiliki SIUP di masing-masing pihak. Regulasi diatas merupakan salah satu yang memang harus dibenahi/direvisi agar dikemudian hari tidak condong menguntungkan keberadaan usaha waralaba.

Teori yang kami angkat berhubungan dengan rumusan masalah yang kedua ialah teori Neo-liberalisme dalam cakupan kebijakan ekonomi ordoliberalisme yang mencakup 3 poin. *Pertama*, tujuan ekonomi neoliberal adalah pengembangan kebebasan individu untuk bersaing secara bebas sempurna dipasar. *Kedua*, kepemilikan pribadi terhadap faktor-faktor produksi diakui, *terakhir*, harga pasar bukanlah suatu yang alami, melainkan hasil dari penertiban pasar yang dilakukan oleh Negara melalui penerbitan undang-undang (Giersch,1961). Analisis kritis kami menanggapi teori yang kami anggap berhubungan dengan problem yang kedua ialah, bahwa ekonomi yang berkembang memiliki unsur neoliberal, yang adanya dominasi pihak luar dalam merebut perhatian pasar.

Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Negara, selalu bisa dimainkan oleh individu yang memiliki kepentingan yang dominan sehingga bisa melawan sistem yang telah dibuat oleh Pemerintah. Apabila mengacu pada teori di atas, pada poin terakhir, terciptanya kebijakan atau suatu peraturan yang dirancang oleh pihak luar bertujuan untuk memuluskan jalan individu atau sekelompok dominasi luar 'kapitalis' dalam permainan ekonomi yang diinginkan. Dengan demikian, sangat wajar apabila selalu terjadi ketidakseimbangan dalam perkembangan ekonomi. Menurut kami, hal ini juga yang begitu terasa

dalam perkembangan pemasaran antara waralaba dan pedagang tradisional.

Jadi, dalam proses penerbitan SIUP telah menggambarkan kemudahan bagi pihak waralaba dan tentu itu semua jelas merugikan pedagang tradisional, karena memang ada batasan-batasan tersendiri untuk kriteria penerbitan SIUP bagi pedagang tradisional. Menurut Pasal 3 (1) SIUP Kecil wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. (2) SIUP menengah wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. (3) SIUP besar wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha (perindagkop.bantulkab.go.id). Dengan dana yang begitu besar, tentu sulit di penuhi oleh pedagang tradisional, dengan kata lain hanya pedagang tertentu saja yang mampu memenuhi , sehingga pedagang tradisional yang memang minim akan modal tidak diwajibkan untuk memenuhi kepemilikan SIUP, yang kedepannya akan berdampak kurang baik bagi kelangsungan usaha dalam persaingan pemasaran dengan Usaha waralaba.

Dari beberapa waralaba yang ada di malang *Indomaret* dan *Alma Mart* memang menjadi dominan diantara yang lain karena memiliki jumlah minimarket yang banyak di antara waralaba yang lain, khusus Malang Raya yang terdiri dari Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu gerai eksistingnya 140 Outlet (www.tribunnews.com). Sementara, pesaing terdekatnya yaitu *Indomaret* dirasa juga memiliki jumlah yang dipercaya lebih unggul 10 % dari total gerai yang dimiliki oleh *Alfamart*. Lebih parahnya di tahun 2013 ini *Alfa Mart* ingin menambah 30 sampai 50 gerai di daerah Jatim, sehingga apabila ditotal

untuk diderah Jatim saja keseluruhan *Alfa Mart* 900 gerai (www.tribunnews.com). Dari data ini, bisa diketahui begitu gencarnya usaha waralaba khususnya *Indomaret* dan *Alfa Mart* untuk menguasai sektor ekonomi. Ini jelas merupakan tugas yang harus direspon dengan cepat oleh pemerintah pusat dan daerah,

Disperindag kota Malang harus mencari solusi atau gerakan yang bisa mengekang pergerakan pengusaha waralaba, agar tidak menyiksa para pedagang tradisional. Karena telah diketahui bahwa omzet para pedagang yang ada di pasar tradisional di kota Malang mengalami penurunan sebesar 15%. (www.indopaces.com). Ini jelas akan bertambah besar apabila Disperindag tidak bergerak cepat untuk melawan para pelaku waralaba yang semakin meluas keberadaanya di kota Malang.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Waralaba saat ini memang memiliki banyak problem yang harus dibenahi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan pusat maupun daerah harus cekatan dalam melihat realitas di lapangan. Adapun hasil yang dapat kami simpulkan yaitu: *Pertama*, regulasi yang sekarang berjalan belum mampu berperan secara seimbang terhadap keberadaan waralaba dan pedagang tradisional. Hal ini dikarenakan regulasi yang sering dilanggar, karena sikap Disperindag yang kurang tegas dalam pengawasan di lapangan sehingga masih banyak terdapat usaha waralaba yang tidak memperhatikan jarak minimum antara sesama waralaba atau dengan pedagang tradisional termasuk pasar tradisional.

Kedua, cara regulasi dalam penerbitan SIUP masih menguntungkan usaha waralaba, karena ada beberapa kriteria penerbitan SIUP yang sulit untuk di penuhi bagi pedagang tradisional yang minim akan permodalan dan justru memudahkan pewaralaba yang memiliki modal besar dalam membangun model usaha perdagangan. Dengan kata lain, Disperindag belum bisa dikatakan

berhasil 100% dalam mensejahterahkan para pedagang yang ada di Kota Malang. Hal tersebut karena kurangnya pengawasan yang intens, serta masih kurang baiknya prosedur penerbitan SIUP yang seringkali merugikan pedagang tradisional.

2. Saran

Untuk mewujudkan keberpihakan regulasi aktor Pusat dan Daerah terhadap usaha waralaba dan pedagang tradisional dapat dilakukan dengan: *Pertama*, Disperindag melakukan Survei mengenai para pewaralaba yang melanggar. Dimana ketika menemukan minimarket yang melanggar, bisa langsung bertindak lanjut permasalahan yang ada, serta betul-betul memberikan suatu sanksi yang member efek jera kepada waralaba yang melanggar. dengan begitu permasalahan yang ada bisa dicegah sedikit demi sedikit. Selain itu, dapat pula dibentuk tim pengawasan yang memang bergerak untuk memperhatikan perdagangan di daerah-daerah. *Kedua*, perbaikan prosedur penerbitan SIUP harus memikirkan ulang apakah memang harus dilakukannya revisi atau ada cara lain

Daftar Pustaka

- Anneahira, 2011, '*Kapitalisme menurut pandangan Marx*', diakses pada 13 Juni 2013, <<http://www.anneahira.com/tokoh-ekonomi.htm>>
- Fahtia, Maharani, 2013, '*Efektifitas Pasal 23 Ayat 2 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian Dan Perdagangan Terkait Jarak Pendirian Minimarket Dengan Pasar Tradisional*', diakses pada 20 Mei 2013. <<http://hukum.ub.ac.id/wpcontent/uploads/2013/01/Jurnal-Maharani-Fathia-0910110047.pdf>>
- No Author, 2011, '*Ratusan Pasar Tradisional Segera Mati Pelan-pelan digempur Indomaret dan Alfamart Omzet Pedagang Anjlok*', Jakarta, diakses pada 19 Mei 2013. <<http://www.asparindo.com/beritautama/read/49/ratusan-pasar-tradisional-segera-mati-pelan-pelan--digempur-indomaret--alfamart-omzet-pedagang-anjlok/>>
- No Author, 2012, '*Prosedur SIUP*', diakses pada 21 Juni 2013. <<http://m.hukumonline.com/pusatdata/detail/cl3459/node/lt4a0a533e31979/siup-and-tdp-bagi-kantor-hukum->>
- No Author, 2012, '*Menteri Perdagangan Republik Indonesia Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia*', diakses pada 20 April 2013. <[http://www.kemendag.go.id/files/regulasi/2012/08/Permen dag%20No.%2053%20Tahun%202012.pdf](http://www.kemendag.go.id/files/regulasi/2012/08/Permen%20dag%20No.%2053%20Tahun%202012.pdf)>

- No Author, 2012, '*Perda Masih Belum Melindungi Pasar Tradisional*', diakses pada 15 Maret 2013.
<<http://surabaya.tribunnews.com/m/index.php/2012/11/6/perda-masih-belum-melindungi-pasar-tradisional>>
- No Author, 2013, '*Indomaret*', diakses pada 13 Juni 2013.<<http://indomaret.co.id/profil-perusahaan/>>
- No Author, '*Teori Pra Klasik Merkantilisme*', diakses pada 21 Juni 2013. <<http://www.ut.ac.id/html/suplemen/esp4216/2.htm>>
- No Author, -, '*Surat Izin Usaha Perdagangan*', diakses pada 20 Juni 2013.
<http://perindagkop.bantulkab.go.id/documents/20100621140624-46_siup.pdf>
- No Author, -, '*Dinas Perindag dan Pasar kabupaten Malang*', diakses pada 23 Juni 2013.
<http://www.indoplaces.com/mod.php?mod=indonesia&op=view_region®id=75>
- Putri, Raisa Dwi Sesari, 2013, '*Membangun Citra Legal Dalam Bisnis Minimarket*', diakses pada 20 Mei 2013.
<<http://blogspot.com/2012/11/membangun-citra-legal-dalam-bisnis>>
- Ricky, 2011, '*Pengertian waralaba atau Franchise*', diakses pada 20 April 2013.
<<http://www.suwayuwo.com/2011/11/pengertian-waralaba-atau-franchise.html>>

Robin, 2011, '*Surat Izin Usaha Perdagangan*', diakses pada 20 mei 2013. <<http://tamasolusi.com/tag/pengertian-siup/>>

Surya, 2013, '*Alfamart Tambah 50 Gerai di Malang Raya*', diakses pada 23 Juni 2013. <<http://surabaya.tribunnews.com/m/index.php/2013/01/27/2013-alfamart-tambah-50-gerai-di-malang-raya>>

Yahya, Elfiera Juwita, 2010, '*Perjanjian Waralaba*', diakses pada 23 Juni 2013. <<http://ebookbrowse.com/128677-t-26733-perjanjian-waralaba-literatur-pdf-d454858027>>

BAGIAN II:
PROTEKSI LAHAN PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN
PENGHIJAUAN

OPTIMALISASI PROTEKSI LAHAN PERTANIAN DI TENGAH MARAKNYA KONVERSI LAHAN DI KOTA MALANG

Oleh :
Novia Suhastini¹

Abstraksi

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui kolaborasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal perlindungan lahan pertanian di Kota Malang. Hal ini menjadi penting Karena pertanian merupakan sektor yang strategis dan mempunyai peran yang penting bagi perekonomian serta memberikan sumbangan yang besar terhadap penyerapan tenaga kerja. Namun, masifnya laju konversi lahan pertanian ke non-pertanian merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi sektor pertanian. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah Kota Malang untuk mempertahankan lahan pertanian yang ada.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah menggambarkan realita empirik dibalik fenomena secara mendalam, rinci, dan tuntas. Penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian adalah dengan mencocokkan antara realita empirik dengan teori yang menggunakan metode deskriptif. Lokus penelitian adalah Dinas Pertanian Kota Malang.

Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa lahan pertanian produktif di Kota Malang telah berkurang disebabkan karena alih fungsi lahan. Hal ini terbukti dari data yang diperoleh dari tahun 2011 sampai 2012 menunjukkan bahwa lahan pertanian menurun. Alih fungsi lahan terjadi akibat meningkatnya papulasi manusia sehingga

¹Iffah Muthmainnah, Feri Ferdaus Ferdiansyah dan Lalu Tambahdawi

meningkatnya pembangunan pemukiman penduduk, bangunan mewah dan pembangunan infrastruktur.

Kata Kunci: Alih fungsi lahan pertanian, Kolaborasi pemerintah pusat dan daerah

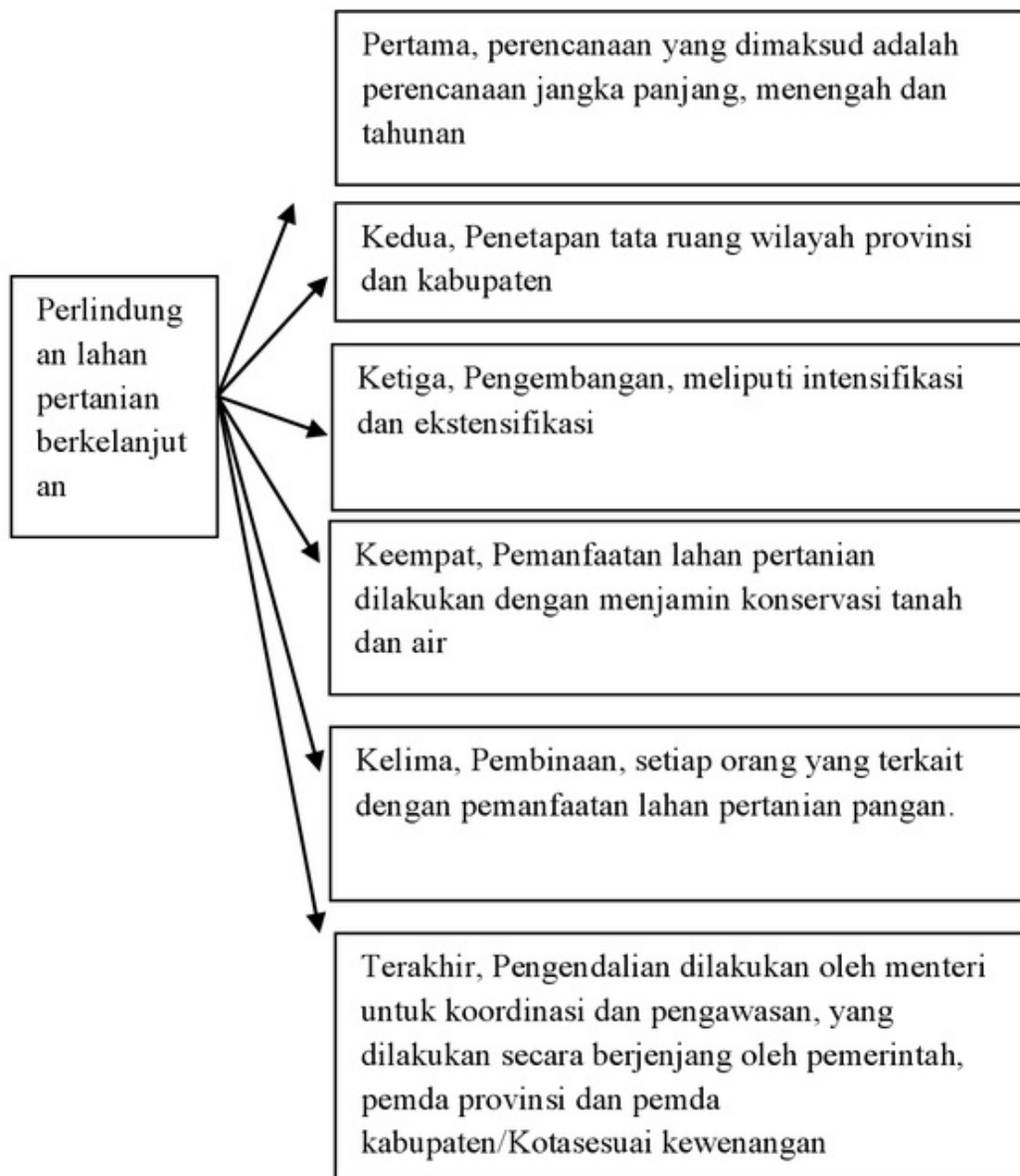
A. Latar Belakang

Dengan maraknya pembangunan yang dilakukan mulai dari pembangunan pemukiman penduduk, pusat perbelanjaan hingga gedung apartemen yang menjulang tinggi membuat pemerintah Kota Malang harus bekerja secara ekstra dalam mempertahankan lahan produktif pertanian yang ada. Sejak enam tahun terakhir lahan produktif pertanian semakin berkurang, pada tahun 2007 luas lahan pertanian Kota Malang masih 1.550 hektare dan semakin menyusut pada tahun-tahun berikutnya seluas 1.400 hektare pada tahun 2009, 1.323,50 hektare pada tahun 2011 dan menyusut hingga 1.282,00 hektare pada tahun 2012².

Adapun skema tahapan perlindungan lahan pertanian sebagaimana telah dijelaskan oleh pemerintah pusat dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 adalah sebagai berikut:

² Sumber : Laporan Penggunaan Lahan Pertanian Per Kecamatan tahun 2012 oleh Dinas Pertanian Kota Malang

Gambar 1. Tahapan Perlindungan Lahan Pertanian



Sumber: Data diolah

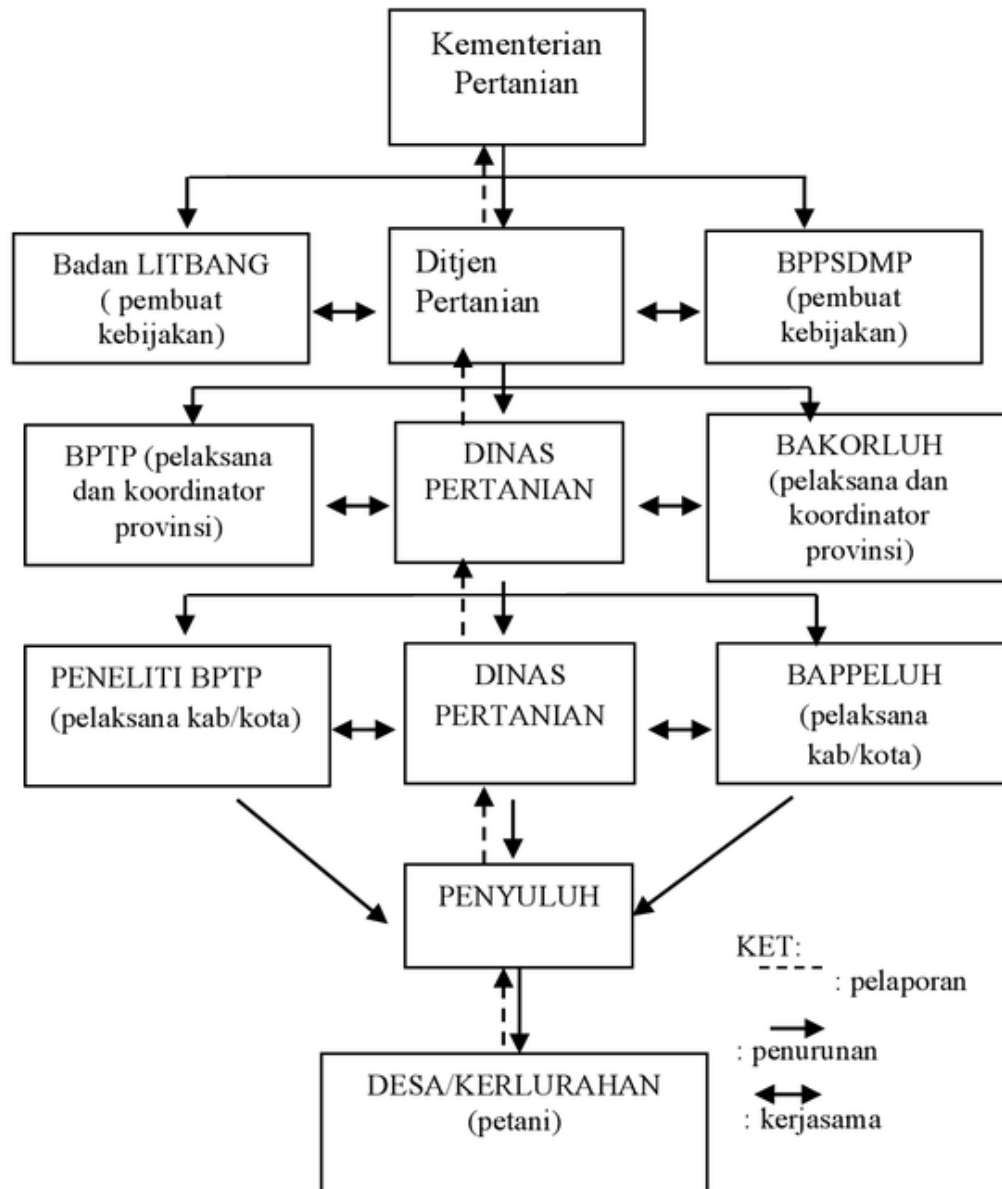
Maka dengan ini pemerintah daerah Kota Malang melalui Dinas Pertanian berupaya agar tetap bisa menjaga dan mempertahankan lahan produktif pertanian yang juga merupakan salah satu potensi

daerah. Dalam hal ini juga perlu adanya antisipasi dari Pemerintah Kota Malang, salah satunya dengan memperhatikan kebutuhan para petani pemilik lahan agar dapat meningkatkan hasil pertanian sehingga mengurangi konversi lahan. Selain itu, konversi lahan pertanian juga dapat mengurangi Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang ada di Kota Malang.

Argumen yang dikemukakan adalah kondisi lahan pertanian yang semakin sempit, dikarenakan banyaknya alih fungsi lahan pertanian. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang pesat sehingga lahan pemukiman yang dibutuhkan semakin banyak. Selain itu, pola hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah belum terjalin secara maksimal dalam hal proteksi lahan pertanian, terlihat dari banyaknya konversi lahan pertanian yang terjadi di Kota Malang, kondisi demikian disebabkan oleh karena para petani pemilik lahan pertanian, lebih tertarik dengan penghasilan yang lebih besar seperti pembuatan kos-kosan, atau penjualan tanah dengan harga tinggi dibandingkan dengan bertani yang hasilnya hanya didapat dalam jangka waktu tertentu. Dengan demikian, sempitnya lahan pertanian berdampak pada hasil produksi pertanian yang akhirnya berimbas kepada masyarakat.

Dalam hal perlindungan lahan pertanian produktif, terdapat pola hubungan antar level pemerintahan sebagaimana berikut:

**Gambar 2. Pola Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah
(Perlindungan Lahan)**



Sumber : Data diolah

Keterangan:

BALITBANG : Badan Penelitian dan Pengembangan
BAKORLUH : Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian
BAPELUH : Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian
BPTP : Balai Pengkajian Teknologi Pertanian
BPPSDMP :Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Pertanian

Sebagaimana pemaparan sebelumnya, dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan program produksi lahan produktif pertanian?
2. Bagaimana implementasi program produksi lahan produktif pertanian yang ada di Kota Malang?

B. Metode Penelitian

Untuk melakukan penelitian diperlukan sebuah metode agar penelitian dapat tersusun dengan logis dan beruntun. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah menggambarkan realita empirik dibalik fenomena secara mendalam, rinci, dan tuntas. Penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian adalah dengan mencocokkan antara realita empirik dengan teori yang menggunakan metode deskriptif (Moleong 2004, hal 131). Adapun Jenis penelitiannya adalah deskriptif, dimana penggambaran fenomena tentang konversi masif lahan pertanian akan diulas secara mendalam.

2. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan laporan penelitian berasal dari observasi, wawancara, dan dokumentasi (dokumen pribadi, media internet, dan dokumen resmi lainnya).

3. Lokasi Penelitian

Dinas Pertanian Kota Malang.

4. Analisis Data

Analisa data kualitatif memiliki beberapa tahapan yakni penyusunan data dalam kelompok-kelompok serta menganalisis hubungan-hubungan yang terjadi dari sebuah fenomena yang diangkat, kemudian dibuat penafsiran-penafsiran dan membandingkannya dengan fenomena-fenomena lain di luar penelitian tersebut. Berdasarkan pengelolaan data tersebut, kemudian dilakukan penarikan kesimpulan hasil penelitian (Dwi Priyo Utomo, 2011: 75).

C. Hasil dan Analisa

1. Kolaborasi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Perlindungan Lahan Pertanian Kota Malang

Kolaborasi pemerintah pusat dan daerah seperti pada gambar 2, menunjukkan bahwa pada tingkat pusat, kementerian pertanian berperan sebagai pengendali. Adapun dalam pelaksanaan kebijakan kementerian pertanian dibantu oleh BALITBANG (Badan Peneliti dan Pengembangan) sebagai koordinator peneliti dan pengembangan bagi kebijakan proteksi lahan pertanian. Selain itu, Direktorat jenderal dan BPPSDMP (Badan Pengembangan Potensi Sumber Daya Manusia Pertanian) bertugas sebagai koordinator pengembangan potensi SDM Pertanian melalui penyuluhan.

Pada level provinsi, yang bertindak selaku tim pembina ialah Dinas Pertanian Provinsi bersama dengan Balai Penelitian Tanaman Pangan (BPTP) dan BAKORLUH (Badan Koordinasi Penyuluhan) Provinsi. Kemudian pada tingkat Kabupaten/Kota yang berperan sebagai tim pelaksana adalah Dinas Pertanian bersama dengan BAPELUH dan peneliti BPTP Kabupaten/Kota. Adapun pada tingkatan terbawah, tim penyuluh terdiri dari peneliti BPTP dan BAPELUH yang langsung melakukan penyuluhan dengan masyarakat.

Peran pemerintah pusat dalam pertahanan areal lahan pertanian adalah menekankan kepada seluruh pihak baik pemerintah maupun petani mengenai pentingnya mempertahankan lahan pertanian produktif sesuai dengan peraturan-peraturan hukum yang berlaku³. Selain itu, perlu adanya strategi yang tepat dalam menjalankan peraturan-peraturan tersebut untuk mengatasi masalah konversi lahan pertanian produktif. Presiden Susilo Bambang Yudoyono menyatakan⁴ tidak efektifnya peraturan yang telah ada dapat diperbaiki dengan: (1) Memperkuat sistem administrasi tanah, (2) Meningkatkan koordinasi antar lembaga terkait, dan (3) Sosialisasi mekanisme implementasi tata ruang wilayah sampai ke tingkat masyarakat.

Namun, Lilis Nur Fauziah (2005)⁵, menyebutkan bahwa alih fungsi lahan pertanian di Indonesia bukan hanya dikarenakan peraturan perundang-undangan yang tidak efektif, tapi juga dikarenakan oleh tidakmenariknya sektor pertanian tersebut seperti halnya, mahalnnya pupuk, alat-alat produksi, kurangnya tenaga kerja petani dan diperparah dengan harga hasil pertanian yang selalu fluktuatif bahkan terus menurun. Pada kenyataannya, konversi lahan yang ada di Kota Malang pada setiap tahunnya selalu meningkat. Hal ini diakibatkan oleh meningkatnya populasi penduduk, karena menurut Maltus dalam Deliarinov (2005) yang berjudul *principles of population* menyebutkan bahwa ‘perkembangan manusia lebih cepat dibandingkan dengan

³ Peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2012 tentang sistem informasi lahan pertanian berkelanjutan, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri dalam negeri, peraturan menteri Negara agrarian/kepala badan pertanahan nasional hingga surat menteri Negara perencanaan pembangunan nasional yang mengendalikan konversi lahan pertanian ke nonpertanian (sumber: <http://diperta.jabarprov.go.id>)

⁴ Dalam seminar dan pameran pangan nasional bertema “*Jakarta food security summit, feed indonesia feed the world 2012*” (sumber : artikel oleh asdepl-deputi bidang perekonomian “ pencetakan lahan sawah baru dan tantangan ketahanan pangan” 2012)

⁵ Zainal Mustopa(2011) “*Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kabupaten Demak*” [http:// Eprints.undip.ac.id.pdf](http://Eprints.undip.ac.id.pdf)

produksi hasil-hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan manusia⁶. Hal ini didasari dari kenyataan bahwa lahan pertanian jumlahnya tetap dan tidak bisa berubah secara tiba-tiba.

Berikutnya menurut Winoto (2005), mengemukakan bahwa alih fungsi lahan pertanian juga disebabkan oleh empat faktor⁷, namun pada kasus peralihan lahan pertanian di Kota Malang terdapat dua faktor penyebab:

- a. Daerah persawahan banyak yang lokasinya berdekatan dengan daerah perkotaan
- b. Pembangunan prasarana dan sarana pemukiman, kawasan industri, dan sebagainya berlangsung cepat di wilayah berfotografi datar, dimana pada wilayah topografi seperti itu (khususnya di Kota Malang) ekosistem pertaniannya dominan areal persawahan.

Berikutnya merujuk pada artikel proposal penelitian, Kementrian Pertanian Dirjen Pengelolaan Lahan dan Air (Dirjen PLA) menunjukkan bahwa sekitar 187.720 hektar sawah beralih fungsi ke penggunaan lain setiap tahunnya⁸. Padahal apabila suatu lahan

⁶ Zainal Mustopa(2011) "*Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kabupaten Demak*" [http:// Eprints.undip.ac.id.pdf](http://Eprints.undip.ac.id.pdf)

⁷ Empat faktor penyebab menurut winito (2005):

1. Kepadatan penduduk di pedesaan yang mempunyai agroekosistem dominan sawah pada umunya jauh lebih tinggi dibandingkan agroekosistem lahan kering, sehingga tekanan penduduk atass lahan jauh lebih tinggi
2. Daerah persawahan banyak lokasinya dekat dengan daerah perkotaan
3. Akibat pola pembangunan di masa sebelumnya, infrastruktur wilayah persawahan pada umunya lebih baik dari pada wilayah laha kering, dan
4. Pembangunan prasarana dan sarana pemukiman, kawasan industry, dan sebagainya cenderung berlangsung cepat di wilayah berfotografi datar, dimana pada wilayah topografi seperti itu di ekosistem pertaniannya dominan areal persawahan.

⁸Lebih mengawatirkan lagi, data dari direktorat penatagunaan tanah badan pertanahannasional menggambarkan bahwa jika arahan rencana tata ruang

pertanian, terutama sawah beralih fungsi, maka mustahil akan kembali lagi menjadi sawah. Oleh sebab itu, usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun daerah khususnya di Kota Malang sekarang ini adalah mempertahankan lahan pertanian yang masih ada agar tidak beralih fungsi.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, pelaksanaan kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam perlindungan lahan pertanian meliputi *pertama*, Perencanaan, dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Kemudian perencanaan tersebut akan dijadikan acuan dalam penyusunan Perencanaan pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Perencanaan dapat berupa Rancangan Peraturan seperti yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang dengan membuat Raperda (Rancangan Pemerintah Daerah) tentang Rencana Kawasan Strategis Ekonomi Tahun 2013-2032. Dalam hal ini, Kementerian Pertanian berperan sebagai Pemerintah Pusat membuat Perencanaan tentang Kawasan Strategis Ekonomi yang menjadi acuan dalam pembuatan Raperda tersebut.

Kedua, Penetapan, maksudnya adalah penetapan Tata Ruang Wilayah pada Provinsi dan Kabupaten/Kota. Di Kota Malang, penetapan tata ruang wilayah pertanian terbatas dengan kepemilikan lahan pertanian. Tanah bengkok⁹ yang ada di Kota Malang memiliki luas 7,7 % sedangkan sisanya adalah milik pribadi. Oleh karenanya, dalam penetapan lahan pertanian, Pemerintah Kota Malang berupaya dengan menyediakan kebutuhan petani agar mendapatkan hasil pertanian melimpah guna menghindari terjadinya konversi lahan.

wilayah (RTRW) yang ada pada saat ini tidak di tinjau kembali, maka dari total lahan sawah beririgasi (7.3 juta hektar), hanya sekitar 4,2 juta hektar (57,6%) yang dapat dipertahankan fungsinya. Sisanya yakni 3,01 juta hektar (42,4%) terancam beralih fungsi ke penggunaan lain. (Artikel pencetakan lahan sawah baru dan ketahanan pangan oleh asdep-1 deputy bidang perekonomian.)

⁹ Tanah garapan milik pemerintah

Ketiga, Pengembangan, Pemerintah Kota Malang melakukan pengembangan dengan cara meningkatkan kesuburan tanah, peningkatan kualitas benih/bibit, pencegahan dan penanggulangan hama tanaman, pengembangan irigasi, pemanfaatan teknologi pertanian dan penyuluhan pertanian.

Keempat, Pemanfaatan, dilakukan dengan memanfaatkan lahan sesuai dengan peruntukannya dan pencegahan terhadap kerusakan irigasi. Pemanfaat lahan pertanian dilakukan agar hasil produksi pertanian di Kota Malang dapat meningkat sehingga dapat memotivasi petani pemilik lahan untuk tidak mengalih fungsikan lahan pertaniannya.

Kelima, Pembinaan, dilakukan melalui penyuluhan pada masing-masing tingkat pemerintahan sesuai bidangnya. Penyuluhan dilakukan oleh Dinas Pertanian melalui Kecamatan bekerjasama dengan peneliti BPTP dan BAPPELUH. Kemudian, dari Pemerintah Kecamatan akan menghimpun beberapa Kelurahan untuk melaksanakan penyuluhan terkait dengan penggunaan pupuk, budidaya tanaman dan lainnya.

Terakhir, Pengendalian, dilakukan melalui sensus pertanian yang dilakukan pada tahun 2013 agar lahan pertanian di Indonesia khususnya di Kota Malang dapat dipantau melalui data di setiap tahunnya. Pemerintah bekerja sama dengan Badan Pusat Pertanian (BPS) dan Dinas Pertanian Kota Malang untuk melaksanakan sensus pertanian guna memperoleh data yang sesuai dengan kondisi pertanian Kota Malang.

Dari hasil penelitian, Data yang diperoleh mengenai Luas Lahan Pertanian Kota Malang pada tahun 2011-2012 sebagai berikut:

**Gambar 3. Laporan Penggunaan Lahan Pertanian PerKecamatan
Tahun2012 di Kota Malang**

No	Kecamatan	Jumlah Lahan	
		2011	2012
1	Kedungkandang	615,50 Ha	610,00 Ha
2	Sukun	284,00 Ha	297,00 Ha
3	Klojen	0,00	0,00
4	Blimbing	129,00 Ha	129,00 Ha
5	Lowokwaru	295,00 Ha	246,00 Ha
Total Lahan		1.323,50 Ha	1.282,00 Ha

Sumber: Dinas Pertanian Kota Malang, 2012

Dari data diatas, terlihat bahwa penurunan lahan pertanian terjadi pada Kecamatan Kedungkandang 5,50 ha dan Lowokwaru seluas 49 ha. Pada Kecamatan Sukun mengalami peningkatan lahan seluas 13 ha. Penyebab penambahan luas lahan pertanian tersebut adalah adanya lahan kosong yang tidak digunakan, kemudian dijadikan lahan pertanian. Sedangkan pada Kecamatan Blimbing tidak mengalami perubahan luas area pertanian dan bahkan pada Kecamatan Klojen tidak ada lahan pertanian.

2. Implemetasi Program Produksi Lahan Produktif Pertanian di Kota Malang

Berdasarkan hasil penelitian di Dinas Pertanian Kota Malang, peta kepemilikan lahan pertanian terdiri dari:(1) Pemkot (Pemerintah Kota) Malang kurang lebih 7,7 %, (2) Pemilik Penggarap kurang lebih 52 % dan (3)sisanya adalah kepemilikan tidak diketahui sekitar 40,3 %. Lahan terluas pada kepemilikan pertanian Kota Malang adalah Pemilik Penggarap dan Kepemilikan Tidak Diketahui. Sedangkan Pemerintah Kotahnya memiliki sebagian kecil dari luas lahan. Sehingga, kemungkinan terjadinya konversi lahan sangat mendukung karena

lahan pertanian 80 % adalah milik pribadi warga Kota Malang. Akibat yang paling ‘tragis’ dari konversi lahan bagi masyarakat penggarap pertanian di Kota Malang adalah akan berkurangnya lapangan pekerjaan¹⁰.

Oleh sebab itu, upaya Pemerintah Pusat maupun daerah sangat penting dalam hal pertahanan atau proteksi lahan pertanian. Di Kota Malang, upaya pemerintah Kota adalah dengan mempertahankan dan melindungi lahan pertanian. Hal ini dikarenakan tidak memungkinkan untuk melakukan perluasan areal pertanian. Program yang diajukan seperti yang dijelaskan pada wawancara dengan Kepala Bidang Tanaman Kota Malang adalah dengan dibuatnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Kawasan Strategis dengan upaya LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang nomor 41 tahun 2009. Peraturan tersebut berisi tentang perlindungan lahan dengan upaya pemberian bibit unggul, pemberian dana atau bahkan pembuatan sertifikat tanah agar pemilik lahan tidak mengkonversi lahan pertaniannya. Selain itu, usaha yang dilakukan adalah dengan pertanian organik, olahan dan penyuluhan oleh masing-masing Kecamatan untuk penggunaan pupuk, bibit unggul dan budidaya tanaman agar produksi pertanian tidak mengalami penurunan. Seperti kasus pada Kecamatan Klojen, luas lahan pertaniannya adalah nol, maka Pemerintah Kota Malang berupaya untuk melaksanakan pertanian organik dan olahan.

Namun pada kenyataan di Kota Malang upaya yang dilakukan oleh pemerintah belum mampu memotivasi masyarakat agar tidak mengalihfungsikan lahan pertaniannya ke non pertanian. Oleh karena itu, peneliti menyatakan bahwa kolaborasi pemerintah pusat dan daerah di Kota Malang belum terlaksana dengan baik, karena dijelaskan juga bahwa kerjasama kelembagaan tersebut masih bersifat sentralistik dan

¹⁰ BPS mencatat sekitar 35,09% (38,88 juta orang) dari 110,80 penduduk yang bekerja pada periode agustus 2012 menggantungkan hidupnya di sector pertanian, baik sebagai petani atau buruh tani (Acmad Ali, S.ST., M)

instruktif. Seperti yang terlihat pada Gambar 2. (lihat halaman sebelumnya) yang juga membuktikan bahwa pihak Dinas Pertanian Kota Malang tidak akan melaksanakan tugas, apabila belum ada intruksi dari Pemerintah Provinsi maupaun Pemerintah Kabupaten/Kota.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian di Dinas Pertanian Kota Malang bahwa, argument awal yang di kemukakan penulis sesuai dengan hasil penelitian bahwa lahan pertanian produktif di Kota Malang telah berkurang. Sehingga perlu adanya upaya Pemerintah Pusat maupun Daerah dalam perlindungan lahan pertanian produktif di Kota Malang. Namun, dari penelitian membuktikan bahwa kolaborasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah belum terlaksana dengan baik. Hal ini terlihat dari masih banyaknya konversi lahan pertanian ke non-pertanian di sebabkan oleh semakin meningkatnya populasi penduduk yang berdampak pada semakin meningkatnya pembangunan pemukiman. Padahal, dengan meningkatnya populasi penduduk maka kebutuhan pangan juga akan semakin meningkat sedangkan apabila lahan pertanian di alih fungsikan ke non pertanian maka akan berdampak buruk pada kehidupan warga Kota Malang baik pada kebutuhan konsumsi maupun ketersediaan lapangan pekerjaan untuk petani penggarap. Oleh karena itu, upaya Pemerintah Kota Malang dalam memproteksi lahan pertanian produkti agar tidak terjadinya alih fungsi lahan seperti yang terjadi pada tahun sebelumnya adalah dengan memenuhi kebutuhan petani agar tercipta pertanian produktif sehingga konversi lahan dapat berkurang.

2. Saran

Dalam perlindungan lahan pertanian Kota Malang, perlu adanya kerjasama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang jelas dalam pelaksanaan peraturan yang telah ada, serta memperkuat

koordinasi antar satu dan lainnya. Sehingga upaya perlindungan lahan pertanian produktif dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Selain itu, Pemerintah Daerah tidak hanya menunggu instruksi dari Pemerintah Pusat, karena akan meyebabkan terjadinya pemerintahan yang sentralistik. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia menganut sistem desentralisasi¹¹. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga harus berupaya untuk memotivasi masyarakat petani agar tidak mengkonversi lahan pertanian, salah satunya seperti tidak ketergantungan pada pangan impor agar harga pangan lokal meningkat sehingga penghasilan para petani menjadi stabil.

¹¹ Sesuai dengan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah

Daftar Pustaka

- Achmmat, Ali, 2012, "*Memotret Pertanian Melalui Sensus Pertanian 2013*", diakses pada 16 Mei 2013 <<http://www.balipost.co.id>>
- Admin kompas, 2012, "*Mempersiapkan Lahan Abadi untuk Pertanian*", diakses pada 16 Mei 2013 <<http://www.diperta.jabarprov.go.id>>
- Moleong, LJ 2004, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung
- Oktavio, Nugrayasa, 2012, "*5 Masalah Yang Membelit Pembangunan Pertanian Di Indonesia*", diakses pada 16 Mei 2013 <<http://www.setkab.go.id>>
- Suhatini, Novia dkk 2013, *Kolaborasi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Perlindungan Lahan Pertanian Kota Malang*
- Undang-Undang nomor 14 tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan
- Utomo, DP 2011, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, UMM press, Malang
- Zainal, Mustopa, 2011, "*Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kabupaten Demak*", diakses pada 25 Juni 2013 <<http://www.eprints.undip.ac.id.PDF>>

AKSELERASI DINAS PERTANIAN KOTA MALANG MENUJU KETAHANAN PANGAN NASIONAL MELALUI PROGRAM P2BN

Oleh:
Rizki Ageng Kurnia¹

Abstraksi

Essay ini dibuat berdasarkan hasil penelitian atau studi lapangan yang dilakukan oleh penulis di Dinas Pertanian Kota Malang. Melalui essay ini, penulis diharapkan dapat menggambarkan realisasi program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) di Kota Malang. Program P2BN yang merupakan bagian dari pembangunan tanaman pangan ditetapkan untuk mempertahankan ketersediaan bahan pangan sehingga sekaligus juga dapat mewujudkan ketahanan pangan secara nasional. Dimana untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah menargetkan surplus produksi beras sebesar 10 juta ton pada tahun 2014. Ketika dalam realitasnya terdapat berbagai kendala, seperti semakin maraknya penurunan luas lahan pertanian. Penulis berpendapat bahwa pelaksanaan program ini tidak terealisasi dengan baik.

Adapun metode dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif dimana jenis penelitiannya adalah penelitian deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara lengkap mengenai realitas yang terjadi dalam masyarakat yang ada hubungannya dengan pelaksanaan program P2BN. Data diambil berdasarkan dua sumber, yaitu data primer berupa wawancara, observasi dan dokumentasi, dan data sekunder berupa membaca literatur-literatur yang terkait, seperti peraturan perundang-undangan dan berbagai macam jurnal.

¹ Faiz A. Musaad, Anter Maba, Zeta Kusuma Pramudita dan Hendriyadi

Berdasarkan metode yang digunakan, hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa program P2BN belum berjalan dengan baik atau bahkan sulit untuk direalisasikan. Semakin maraknya pengalihfungsian lahan pertanian menjadi nonpertanian menjadi kendala terbesar untuk merealisasikan program P2BN ini. Sehingga kemudian, muncul alternatif lain untuk mewujudkan ketahanan pangan yakni diversifikasi pangan. Selain itu, upaya pengoptimalan lahan pertanian juga dilakukan melalui kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Dengan begitu, berdasarkan realita yang ada untuk mewujudkan ketahanan pangan di Kota Malang, Dinas Pertanian Kota Malang hanya bisa menargetkan untuk mempertahankan sekaligus pengoptimalan lahan pertanian berupa sawah agar produksi beras tetap dapat mencukupi kebutuhan warga akan beras sebesar 167 ribu ton per tahun.

Kata Kunci:

Ketahanan pangan, P2BN (Peningkatan Produksi Beras Nasional), Penyusutan lahan, Diversifikasi pangan dan LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan)

A. Latar Belakang

Salah satu misi pembangunan tanaman pangan adalah mempertahankan ketersediaan bahan pangan. Bahan pangan merupakan komoditas strategis, ketersediaan bahan pangan mutlak menjadi prioritas karena dapat menciptakan ketahanan pangan dan stabilitas nasional. Komoditas padi merupakan komoditas pangan utama dan merupakan salah satu komoditas unggulan termasuk dalam 4 program sukses Kementerian Pertanian dalam mendukung swasembada pangan untuk tercapainya stabilitas nasional.

Beras atau padi menjadi bahan pangan pokok bagi lebih dari 95 persen penduduk Indonesia dan juga usahatani padi menyediakan lapangan pekerjaan dan sebagai sumber pendapatan bagi sekitar 21 juta

rumah tangga pertanian (data Kementan 2012). Selain itu, beras juga merupakan komoditas politik yang sangat strategis, sehingga produksi beras dalam negeri menjadi tolak ukur ketersediaan pangan bagi Indonesia. Pemerintah Indonesia sendiri telah menargetkan surplus produksi beras sebesar 10 juta ton pada tahun 2014 nanti. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan ketersediaan pangan nasional, Kementerian Pertanian meluncurkan program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN). Program ini diluncurkan karena memperhatikan total luas areal padi di Indonesia yang mencapai 12.879.039 ha, dengan produksi mencapai 64.329.329 ton, dimana produktifitas hanya mencapai 4,9 ton per hektare (data Kementan 2012), tentu jauh dari standar yang diharapkan yakni dapat menghasilkan lebih dari 10 ton per hektare.

Kegiatan P2BN ini juga dilaksanakan karena melihat adanya permintaan beras terus meningkat seiring dengan laju pertumbuhan penduduk, perubahan iklim menjadi lebih ekstrim akibat pemanasan global berdampak pada terganggunya produksi pangan. Pasar beras dunia menjadi terbatas sehingga kita harus swasembada beras secara berkelanjutan dan memiliki cadangan beras yang memadai. Selain itu, beras masih sebagai kontributor utama terhadap terjadinya inflasi sehingga harga beras harus senantiasa terkendali.

Dalam rangka merealisasikan program P2BN tersebut pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pertanian sangat perlu bersinergi dengan instansi di bawahnya sekaligus juga dengan pemerintah daerah. Oleh karena itu, Kementerian Pertanian telah mengeluarkan Permentan No. 45/Permentan/OT.140/8/2011 tentang Tata Hubungan Kerja Antar Kelembagaan Teknis, Penelitian dan Pengembangan, dan Penyuluhan Pertanian Dalam Mendukung Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN). Dalam penelitian kami melakukan studi di Dinas Pertanian Kota Malang, yang juga merupakan bagian dari tata hubungan kerja antar kelembagaan teknis dalam

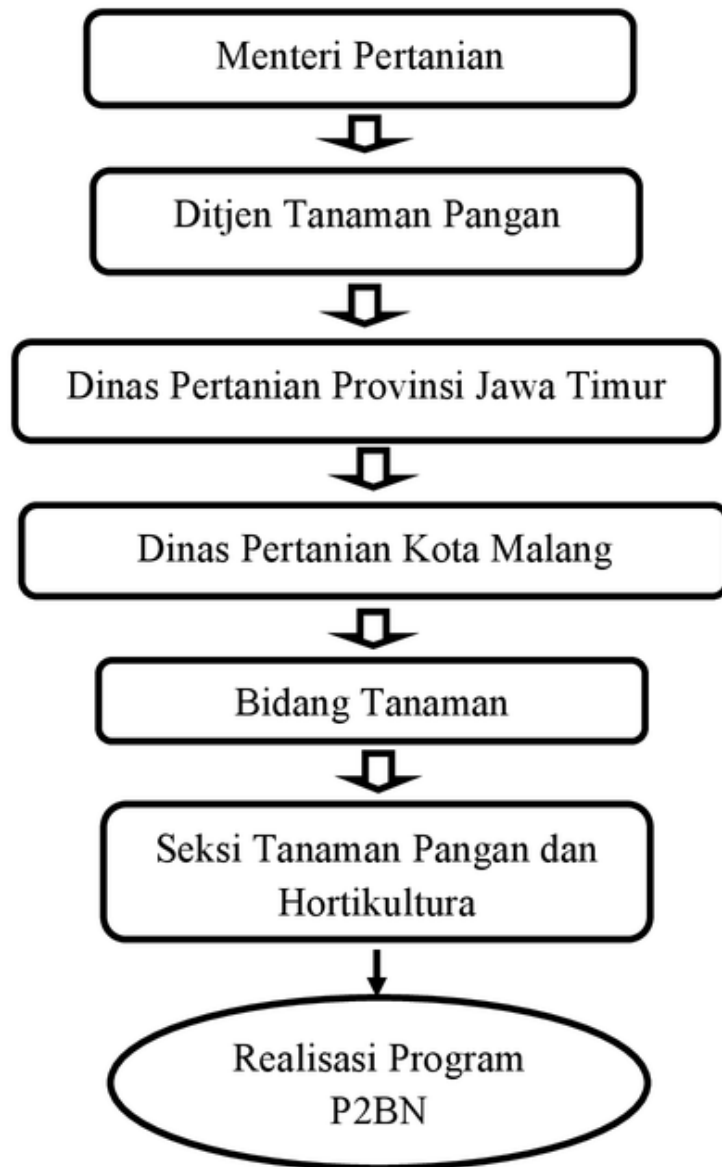
lingkungan Kementerian Pertanian di tataran daerah, dalam hal ini di daerah Kota Malang.

Kota Malang sebagai salah satu daerah di Jawa Timur yang memiliki luas lahan pertanian cukup besar tentu dapat menjadi salah satu daerah yang mendukung terealisasinya program P2BN tersebut. Namun, yang terjadi hampir sebaliknya. Upaya Dinas Pertanian Kota Malang terkesan sangat minim untuk mempertahankan keberadaan lahan pertanian yang semakin lama semakin terpinggirkan dengan semakin maraknya pembangunan pusat-pusat perbelanjaan dan perumahan-perumahan warga. Dengan adanya kendala-kendala tersebut, realisasi program P2BN ini di Kota Malang dirasa masih sulit untuk diwujudkan dengan baik.

Dinas Pertanian sebagai instansi teknis tentu harus memanfaatkan perannya untuk menekan pemerintah daerah yang notabene lembaga pengambil kebijakan untuk dapat mempertahankan atau bahkan memperluas lahan pertanian. Selain itu, adanya kerja sama dengan dinas lain yang terkait juga perlu dilakukan dalam upaya untuk memperluas dan mempertahankan lahan pertanian, misalnya saja yang kaitannya dengan penataan ruang dan wilayah

Adapun alur dari pelaksanaan program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) secara sederhana dapat dijabarkan sebagai berikut :

Gambar 1. Alur Pelaksanaan P2BN



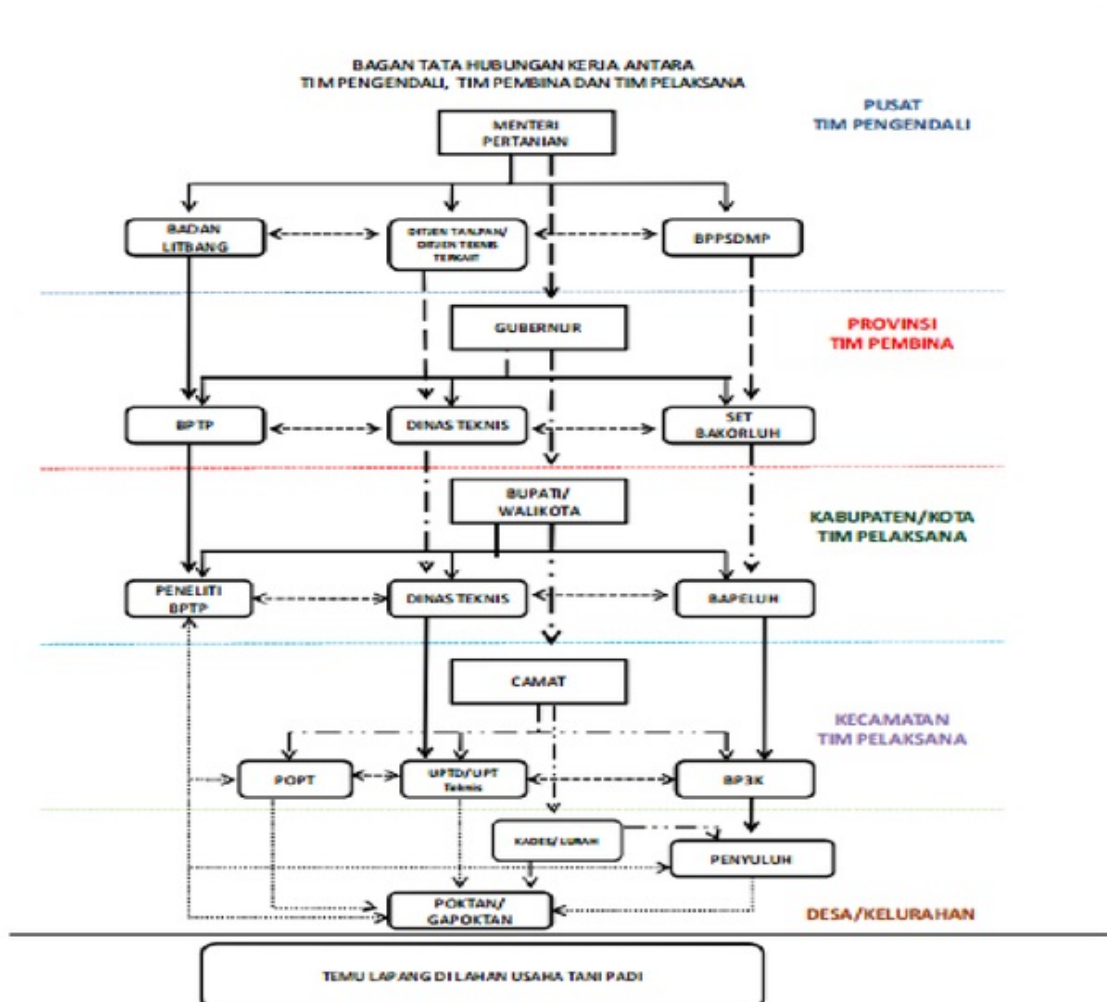
Sumber :

Peneliti Mengacu Permentan No.45/Permentan/OT.140/8/2011

Sedangkan berdasarkan Permentan No. 45/Permentan/OT.140/8/2011 tentang Tata Hubungan Kerja Antar Kelembagaan Teknis, Penelitian dan Pengembangan, dan Penyuluhan

Pertanian Dalam Mendukung Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN), alur hubungannya secara teknis adalah sebagai berikut :

Gambar 2. Alur Hubungan Antar Lembaga Pusat dan Daerah dalam Pelaksanaan P2BN



Sumber : Permentan No. 45/Permentan/OT.140/8/2011

Sebagaimana pemaparan sebelumnya, terdapat rumusan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi program P2BN di Kota Malang?
2. Apa saja kendala yang dialami Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan program P2BN?

3. Apa langkah-langkah yang telah ditempuh oleh Pemerintah Daerah Kota Malang untuk merealisasikan program tersebut?

B. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan secara kualitatif untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai implementasi program peningkatan produksi beras nasional serta dapat menggambarkan permasalahan dan alternatif dalam penyelesaian masalah untuk kemudian dibuat suatu kesimpulan atau generalisasi.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dimana tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau hubungan antara fenomena yang diuji. Dalam penelitian ini, peneliti telah memiliki definisi jelas tentang subjek penelitian dan akan digunakan dalam menggali informasi yang dibutuhkan. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah menghasilkan gambaran akurat tentang sebuah kelompok, menggambarkan mekanisme sebuah proses atau hubungan, memberikan gambaran lengkap baik dalam bentuk verbal atau numerikal, menyajikan informasi dasar akan suatu hubungan, menciptakan seperangkat kategori dan mengklasifikasikan subjek penelitian, menjelaskan seperangkat tahapan atau proses, serta untuk menyimpan informasi bersifat kontradiktif mengenai subjek penelitian.

2. Pengambilan Data

- a. Data Primer diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.
- b. Data Sekunder
 - i. Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan pemerintah
 - ii. Data-data yang berasal dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terkait dengan program P2BN

- iii. Jurnal atau artikel akademik yang telah terpublikasi terkait dengan peningkatan produksi beras nasional
 - iv. Data atau laporan dari lembaga non pemerintah yang terkait dengan masalah yang diangkat dalam penelitian.
3. Subyek Penelitian, subyek penelitian berkaitan dengan sumber informasi yang dianggap relevan dalam artian mampu memberikan informasi secara lengkap dan ilmiah mengenai penelitian yang dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil subyek penelitian Pejabat dan pegawai teknis Dinas Pertanian yang menjalankan program tersebut di daerah.
 4. Lokasi Penelitian, penelitian ini akan dilakukan di Kantor Dinas Pertanian Kota Malang, Provinsi Jawa Timur
 5. Analisis Data, analisis data ialah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang didasarkan oleh data. Peneliti akan menggunakan analisis data kualitatif yang akan memberikan gambaran dengan jelas mengenai program ini. Ditunjang dengan pengkolaborasian teori-teori sebagai bahan penunjang dalam menganalisis. Analisis secara kualitatif memungkinkan peneliti mengecek validitas data yang telah diperoleh melalui beberapa metode penelitian data. Dengan begitu data yang terkumpul dapat diuraikan secara sistematis dan kesimpulan yang didapat akan mudah untuk dipahami.

C. Hasil dan Analisis

Seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, bahwa pada pelaksanaannya program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) di Kota Malang belum berjalan dengan Hal ini disebabkan karena semakin menyusutnya luas lahan pertanian di Kota Malang paling tidak selama enam tahun terakhir ini.

Berdasarkan data Dewan Pimpinan Nasional Relawan Perjuangan Demokrasi (DPN-Repdem) Bidang Penggalangan Tani, yang kemudian dikonfirmasi juga oleh Dinas Pertanian Kota Malang, luas lahan pertanian Kota Malang 6 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 1.
Luas Lahan Pertanian Kota Malang Tahun 2007-2013

Tahun	Luas Lahan
2007	1550 hektare
2009	1400 hektare
2012	1300 hektare
2013	1282 hektare

Sumber : Data Dewan Pimpinan Nasional Relawan Perjuangan Demokrasi (DPN-Repdem)

Data di atas tentu sangat tidak mendukung dalam upaya untuk melaksanakan program peningkatan produksi beras (P2BN). Semakin berkurangnya lahan pertanian khususnya sawah tentu akan berakibat pada menurunnya produktivitas hasil pertanian, terutama padi.

Penulis sendiri beranggapan bahwa, Kota Malang kurang bisa berkontribusi dalam mendukung peningkatan produksi beras secara nasional. Menurut data yang dilansir *Surabaya Post* (April 2013), kebutuhan akan beras di Kota Malang mencapai 167.000 ton/tahun, dimana produksi beras di Kota Malang sendiri hanya sebesar 73.000 ton. Itu artinya harus ada tambahan produksi beras sebesar 94.000 ton untuk mencukupi kebutuhan beras masyarakat Kota Malang yang berjumlah kurang lebih 890 ribu orang. Upaya peningkatan produksi beras ini semakin sulit dilakukan karena melihat fakta bahwa lahan pertanian di Kota Malang hanya terdapat di empat Kecamatan, yaitu Kecamatan Lowokwaru, Kecamatan Blimbing, Kecamatan

Kedungkandang, dan Kecamatan Sukun. Sementara untuk Kecamatan Klojen tidak terdapat lagi lahan untuk pertanian, yang ada hanya lahan berupa pekarangan warga (Dinas Pertanian, 2013).

Dalam upaya untuk mengoptimalkan lahan pertanian yang ada, Dinas Pertanian Kota Malang telah mengalokasikan dana sebesar Rp. 1,2 Miliar untuk melakukan berbagai program pertanian seperti sosialisasi, pendampingan, dan bantuan teknologi kepada para petani yaitu berupa alat *transplanter* dimana dengan alat itu para petani nantinya bisa menanam bibit padi seluas 1 hektare hanya dalam waktu 2 jam. Dinas Pertanian sendiri berharap dapat memiliki 4 alat *transplanter* sehingga dapat meningkatkan produksi pangan khususnya beras serta dapat mewujudkan swasembada pangan di Kota Malang. Dengan begitu, meskipun lahan pertanian di Kota Malang berkurang namun produktivitasnya tetap terjaga.

Dinas Pertanian Kota Malang juga berupaya untuk mempertahankan sebisa mungkin lahan pertanian yang ada. Karena untuk memperluas lahan pertanian dipandang sudah mustahil untuk dilakukan mengingat semakin banyaknya lahan yang dikonversi menjadi lahan nonpertanian. Disamping itu, kurangnya perhatian Pemerintah Daerah untuk menekan jumlah pembangunan yang semakin membuat lahan hijau terutama lahan pertanian menjadi terpinggirkan. Upaya tersebut adalah berupa pengajuan usulan dalam Raperda mengenai Rencana Kawasan Strategis Ekonomi 2013-2032, dimana Dinas Pertanian mengusulkan adanya kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Usulannya adalah Kota Malang ke depannya harus memiliki setidaknya 700-800 hektare Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), yang mana lahan tersebut nantinya tidak dapat dikonversi menjadi lahan nonpertanian. Usulan ini sendiri mengacu pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 mengenai Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Usulan ini sendiri sudah memasuki tahap pembahasan tingkat komisi di DPRD Kota Malang,

sehingga diharapkan dapat mempertahankan keberadaan lahan pertanian.

Dalam usulan kebijakan LP2B dijelaskan bahwa nantinya pemilik lahan dan penggarap akan diberi insentif oleh pemerintah daerah, sehingga dengan begitu upaya mempertahankan sekaligus juga pengoptimalan lahan pertanian dapat direalisasikan. Namun, adanya kebijakan LP2B ini tentu bertolak belakang dengan program atau kebijakan yang telah ditetapkan terlebih dahulu yaitu P2BN.

Substansi yang lebih ditekankan dalam LP2B adalah menetapkan suatu luas lahan yang nantinya digunakan sebagai lahan pertanian. Dengan kata lain, sifatnya adalah mempertahankan lahan pertanian untuk kemudian dilakukan optimalisasi hasil pertanian dari lahan tersebut. Sementara itu, untuk melakukan peningkatan produksi padi tidak bisa lagi menitikberatkan pada peningkatan hasil, tetapi harus beralih pada perluasan areal pertanaman (Suwarno, 2012) atau bahkan kombinasi keduanya, yaitu ekstensifikasi (perluasan lahan) dan intensifikasi atau optimalisasi lahan (Muchtadi, 2013). Dengan begitu, usulan LP2B yang sebesar 700-800 hektare ini, peneliti pandang tidak sejalan dengan upaya untuk mendukung program peningkatan produksi beras. Disamping itu, temuan ini juga sedikit banyak sesuai dengan argumen awal peneliti bahwa Dinas Pertanian Kota Malang kurang maksimal dalam mempertahankan lahan pertanian yang ada.

Peneliti berpendapat bahwa seharusnya luas lahan yang dipertahankan dapat melebihi dari usulan yang diajukan sebesar 700-800 hektare, karena dengan begitu produksi beras tidak semakin menurun. Di sisi lain, adanya kebijakan diversifikasi pangan yang dicanangkan oleh pemerintah daerah sebagai alternatif untuk mewujudkan ketahanan pangan juga sedikit banyak semakin mempertegas bahwa upaya peningkatan produksi beras, terutama melalui cara perluasan lahan, sangat sulit untuk dilakukan.

Menurut Posman Sibuea (2012), diversifikasi pangan dipandang sebagai suatu kebijakan yang lebih dapat mewujudkan

ketahanan pangan secara nasional, karena tidak bergantung pada produksi beras saja sebagai bahan pangan utama, tetapi juga dapat memaksimalkan bahan pangan lokal nonberas untuk memenuhi kebutuhan akan pangan secara nasional. Dengan begitu, pemenuhan pangan tidak hanya berakibat pada pertumbuhan ekonomi tetapi juga memberi dampak pada aspek politik, sosial dan kedaulatan bangsa.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Dari penjabaran di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pelaksanaan program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) di Kota Malang belum dapat direalisasikan dengan baik. Bahkan jika melihat fakta yang terjadi di lapangan, program tersebut dirasa sulit untuk dilaksanakan. Semakin maraknya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan nonpertanian, seperti pemukiman warga, pusat perbelanjaan, dan perindustrian menyebabkan lahan pertanian di Kota Malang semakin mengalami penurunan, yang mana hal ini tentu menjadi kendala yang paling besar untuk mewujudkan peningkatan produksi beras.

Selain itu, upaya Dinas Pertanian Kota Malang yang belum maksimal dalam mempertahankan lahan pertanian yang ada atau bahkan memperluas lahan juga menjadi penyebab dalam tidak baiknya realisasi program P2BN. Di sisi lain, dengan adanya usulan untuk menetapkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) seluas 700 hingga 800 hektare, maka pada akhirnya program peningkatan produksi beras untuk mewujudkan ketahanan pangan di Kota Malang sulit untuk benar-benar direalisasikan dengan baik.

2. Saran

Mengingat realitas yang terjadi di Kota Malang bahwa lahan pertanian semakin menurun yang tentu akan berdampak pada penurunan produksi beras sekaligus juga pada ketahanan pangan, maka diversifikasi pangan dipandang dapat mewujudkan ketahanan pangan.

Daftar Pustaka

- Ainun, Yatimul,-. "*Lahan Pertanian Menyusut Kota Malang Kekurangan Beras*", diakses pada 9 April 2013<<http://regional.kompas.com>>
- Muchtadi, Tien R 2013, *Program Peningkatan Beras 2 juta ton/tahun*.
- Permentan No. 45/Permentan/OT.140/8/2011 tentang Tata Hubungan Kerja Antar Kelembagaan Teknis, Penelitian dan Pengembangan, dan Penyuluhan Pertanian Dalam Mendukung Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN).
- Sibuea, Posman, 2012, "*Ketergantungan Indonesia Pada Beras*", diakses pada 8 April 2013 <<http://gagasanhukum.wordpress.com>>
- Suwarno, 2011, "*Meningkatkan Produksi Padi Menuju Ketahanan Pangan yang Lestari*", diakses pada 8 April 2013 <<http://www.majalahpangan.com>>
- , "*Malang Kekurangan 94 ribu ton Beras*", diakses pada 10 April 2013<<http://www.surabayapost.co.id>>

MERAJUT KESEJAHTERAAN DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM RASKIN DI KOTA MALANG

Oleh
M. Dita Sakti Ananda¹

Abstraksi

Program bantuan beras untuk rakyat miskin atau disingkat dengan raskin merupakan program penanggulangan kemiskinan. Raskin merupakan salah satu program yang dicanangkan untuk memberikan bantuan pangan bagi masyarakat untuk meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Berbagai macam aktor baik itu dari Pemerintah Pusat dan Daerah bekerjasama dalam mensukseskan program tersebut. Akan tetapi, hubungan antara aktor tersebut mempunyai kendala seperti komunikasi hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah seperti yang terdapat dalam teori Edward III dan Sharansky, kualitas beras yang kurang baik, banyaknya RTS yang tidak tepat sasaran menyebabkan program raskin jauh dari kata sukses. Kendala-kendala yang terjadi dipengaruhi oleh mekanisme tata pendistribusian dan komunikasi antara aktor yang kurang baik.

Kata Kunci: Raskin, RTS, Mensukseskan, Aktor,
Komunikasi, kebutuhan.

A. Latar Belakang

Kemiskinan seringkali dipahami sebagai gejala rendahnya tingkat kesejahteraan semata, padahal kemiskinan merupakan gejala yang bersifat kompleks dan multidimensi, dimana berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Berbagai upaya dan kebijakan pembangunan telah dilakukan Pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan. Program-program penanggulangan kemiskinan yang

¹Ahmad Agus Amrin, Wahyudin Al-Arasy, Latiful Arif dan Fina Ferlina

selama ini dilaksanakan masih banyak mengalami kemacetan, penyelewengan bahkan memunculkan ketergantungan masyarakat terhadap Pemerintah sebagai pemberi bantuan dana dan fasilitas. Implementasi kebijakan 'Beras Rakyat Miskin' atau disingkat 'raskin' dilaksanakan karena kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan bantuan pangan benar-benar dibutuhkan terutama oleh masyarakat miskin.

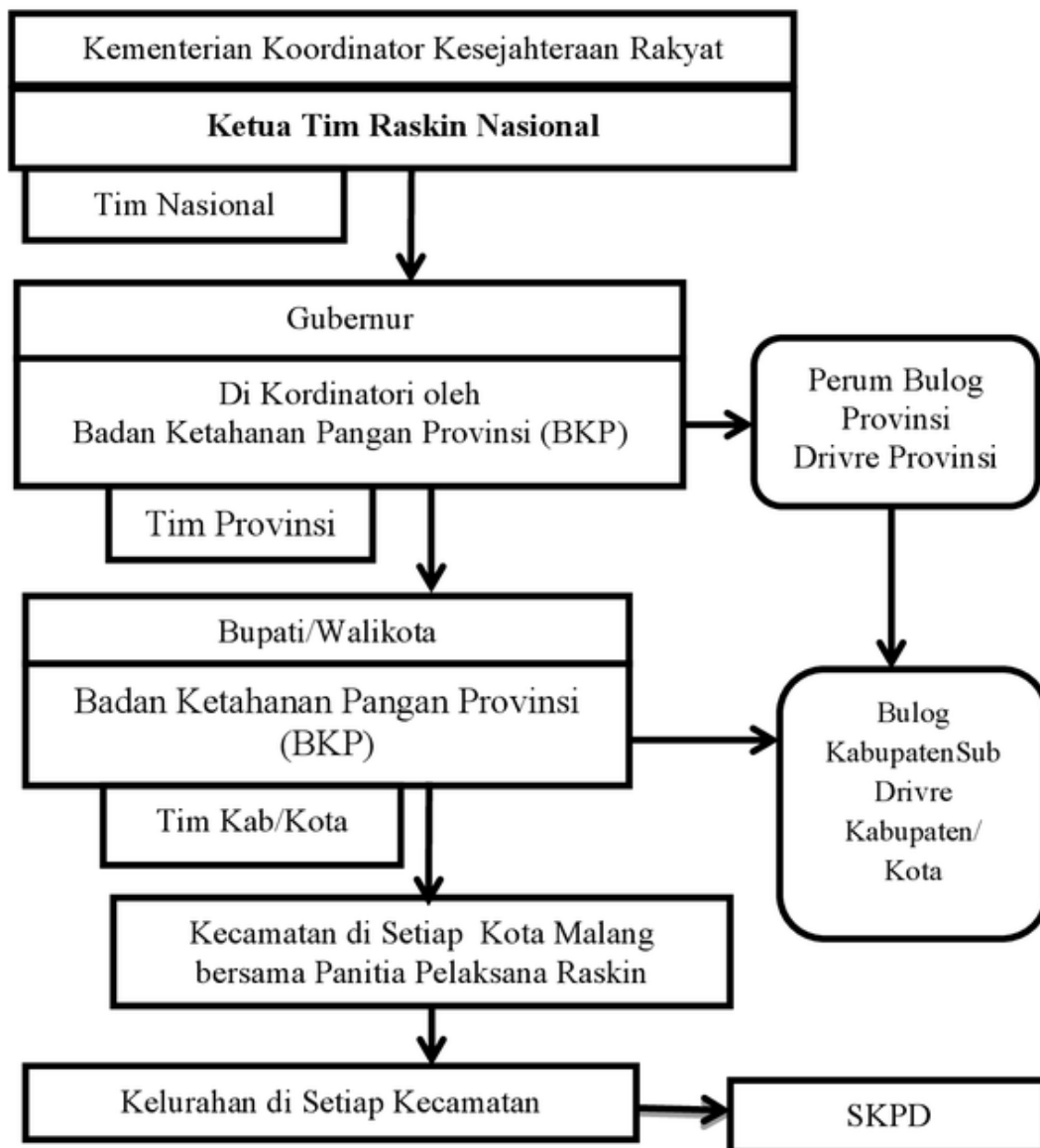
Strategi yang digunakan oleh BKBPM (Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat) dalam mendistribusikan raskin menggunakan konsep pembuatan tim dari tingkat pusat (Tim Nasional), Tingkat Provinsi (Tim Provinsi), dan tingkat daerah (Tim Kab/Kota). Pembuatan tim ini bertujuan untuk menghasilkan konsep 6T yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Pembuatan tim-tim tersebut berkoordinasi dengan beberapa tim dari tingkat pusat sampai tim tingkat Kabupaten/Kota sehingga konsep 6T bisa terwujud sampai pada sasaran yang ada pada data yang telah dibuat. Pembuatan tim ini, selain mempermudah strategi dalam pendistribusian juga mempermudah Pemerintah Kota Malang (BKBPM) bersosialisasi dengan masyarakat.

Proses implementasi raskin sebagai salah satu program penanggulangan kemiskinan tidak bisa lepas dari adanya proses komunikasi. Komunikasi yang dimaksud adalah adanya sosialisasi antara Pemerintah Pusat (Kemenko Bidang Kesra) dengan BKBPM Kota Malang dalam upaya penyaluran program tersebut, baik dalam hal penentuan kuota dan mekanisme pendistribusian. Oleh karena itu, adanya hubungan kerja yang baik antara Pemerintah Pusat yang dalam hal ini Kemenko Bidang Kesra dengan BKBPM Kota Malang sangat dibutuhkan untuk menjamin terlaksananya proses implementasi kebijakan yang efektif dan efisien.

Hubungan kerja antara Pemerintah Pusat yang dalam hal ini dikomandoi oleh Kemenko Bidang Kesra yang kemudian bekerjasama dengan BKBPM Kota maupun Kabupaten di setiap daerah. Dimana

Kemenko bidang kesra selaku ketua tim raskin nasional berkordinasi dengan Gubernur yang dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan (BKP) Provinsi Jawa Timur. Proses koordinasi tersebut kemudian berlanjut ke BKBPM Kota atau Kabupaten untuk merealisasikan proses implementasi program raskin ke masyarakat bekerjasama dengan Perum Bulog. Peran Perum Bulog dalam hal ini adalah sebagai penyedia barang sesuai kuota yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat melalui Kemenko Bidang Kesra untuk didistribusikan ke setiap daerah, salah satunya Kota Malang. Di setiap kabupaten/kota telah disediakan Sub Drive(gudang) oleh Perum Bulog dan sekaligus mengoperasikan pendistribusian dibawah komando Pemerintah Kab/Kota sesuai dengan data atau kuota di setiap daerah, termasuk Kota Malang. Titik distribusi atau pendistribusian raskin di tingkat kelurahan dilaksanakan oleh Pemerintah Kelurahan (Perangkat Kelurahan) sesuai dengan data atau kuota masyarakat miskin di masing-masing kelurahan. Adapun gambaran mengenai distribusi raskin, dapat dilihat pada bagan berikut:

Bagan 1. Ilustrasi penyaluran Raskin 1



Sumber: Data olahan

Berdasarkan hasil pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 2008 (PPLS08), Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang layak menerima raskin berjumlah 26.732. Jumlah tersebut berdasarkan data per 30 Oktober 2009 di lima kecamatan dan 57 kelurahan yang ada di Kota Malang, dan hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang.

Jumlah RTS penerima raskin dipastikan tidak ada perubahan sampai dengan bulan Juni 2010. Pada saat ini Pemkot Malang dengan pendataan Program Perlindungan Sosial Pada Tahun 2012 ini (PPLS11) menyatakan bahwa Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang layak menerima raskin yaitu 20.359 dari 57 Kelurahan Sekota Malang. Selain itu, Pemkot Malang juga menggunakan data yang lama dengan membandingkan data yang baru.

Dari hasil perbandingan, diketahui bahwa kelayakan penerimaan raskin Tahun 2009 dengan tahun 2012 dari 57 kecamatan mengindikasikan adanya penurunan tingkat penerima raskin. Dari 26.732 RTS yang layak menerima beras miskin pada tahun 2009 dan 2010, kemudian pada tahun 2012 jumlah tersebut menjadi 20.359 RTS. Selain itu, dari hasil perbandingan ini, menunjukkan bahwa Pemerintah Pusat dari Kemenko bidang Kesra dengan program raskinnya yang berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi (BKP) dan Pemerintah Daerah terutama BKBPM di setiap daerah memiliki strategi tertentu dalam menentukan tingkat kelayakan masyarakat yang pantas untuk menerima raskin. Jadi, pada program raskin merupakan program penanggulangan kemiskinan.

Selain itu, program raskin juga merupakan salah satu program yang dicanangkan untuk memberikan bantuan pangan bagi masyarakat untuk meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Sehingga penulis mengambil tema *Kolaborasi Pemerintah Pusat Dan BKBPM Kota Malang Dalam Implementasi Program Raskin Kepada Masyarakat* untuk mengevaluasi, mengkritisi dan memberikan solusi dalam pendistribusian raskin. Berdasarkan hal tersebut rumusan masalah yang kami kemukakan dan yang kami bahas dalam penelitian ini yaitu :

- a. Bagaimana strategi Pemerintah Pusat dan BKBPM Kota Malang dalam implementasi program raskin kepada Masyarakat ?

- b. Bagaimana hubungan kerja antara Pemerintah Pusat (Kemenko Bidang Kesra) dan Pemerintah Daerah (BKBPM) Kota Malang dalam implementasi program raskin ?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif seperti yang di jelaskan yang ada di bawah ini:

- a. Jenis Penelitian

Peneliti ini mendeskripsikan tentang Strategi Pemerintah Pusat dan BKBPM Kota Malang dalam implementasi program raskin kepada Masyarakat. Oleh karena itu, jenis penelitiannya bersifat deskriptif.

- b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi kepada objek maupun subjek dan sumber data sekunder yang diambil dari referensi buku-buku, jurnal, artikel, koran, internet, yang terkait dengan Strategi Pemerintah Pusat dan BKBPM Kota Malang Dalam Langkah Implementasi Program raskin kepada masyarakat.

- c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi atau terjun langsung pada lapangan, dokumentasi dengan bantuan alat teknologi seperti hp, kamera, *tape recorder*, dan sebagainya. Wawancara pada subyek atau objek dalam penelitian baik masyarakat maupun Dinas BKBPM Kota Malang.

- d. Subyek Penelitian

Subyek dari penelitian ini adalah Pemerintah Pusat (KEMENKO Bidang Kesra) dan BKBPM Kota Malang beserta masyarakat Desa Landungsari, Semeru, dan Oro-Oro Dowo Kota Malang.

e. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di BKBPM Kota Malang selaku dinas yang terkait dengan program raskin, Desa landungsari, Semeru, dan Oro-Oro Dowo Kota Malang.

f. Analisis Data

Analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yang terdiri dari reduksi data, display data, dan kesimpulan.

C. Hasil dan Analisis

1. Strategi Pemerintah Pusat dan BKBPM Kota Malang dalam Implementasi Program Raskin Kepada Masyarakat

Strategi kerja yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah dalam proses implementasi program raskin khususnya di Kota Malang dengan menggunakan strategi pembuatan tim di tingkat pusat yang terdiri dari pengarah, pelaksana dan sekretaris. Sementara, pada tingkat Provinsi terdiri dari penanggung jawab, ketua, sekretaris yang dikoordinir oleh Gubernur Jawa Timur melalui Badan Ketahanan Pangan (BKP).Tingkat Kabupaten/Kota Bupati dan Walikota langsung bertanggung jawab atas pelaksanaan program raskin di wilayahnya melalui BKBPM Kota Malang, dimana struktur keanggotaan timnya terdiri dari ketua, sekretaris dan beberapa bidang.

Strategi pembuatan Tim tersebut memang membantu dalam proses implementasi program agar terkoordinir dengan rapi. Dengan adanya proses komunikasi atau koordinasi yang terjalin antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang akan mempermudah proses pendistribusian raskin kepada masyarakat yang membutuhkan di setiap kecamatan. Namun, strategi yang dilakukan Pemerintah dalam implementasi program raskin ini masih memiliki kekurangan dalam pelaksanaannya, seperti:

- a. Beras yang diberikan terkadang tidak tepat sasaran.
- b. Kualitas barang yang tidak memuaskan/ jelek.

- c. Adanya pihak dari masyarakat yang mengklaim diri sendiri sebagai warga miskin untuk mendapatkan jatah raskin.
- d. Masyarakat terkadang tidak puas dengan Pemerintah Kota Malang dalam pendistribusian raskin per RTS.

Kekurangan dalam pelaksanaan tersebut memang tidak serta merta diperbaiki oleh Pemerintah Kota Malang dan Perum Bulog khususnya. Sementara itu, berkaitan dengan Sub Drivred di Kota Malang yang masih bermasalah dengan kualitas beras yang didistribusikan kepada masyarakat tidak layak konsumsi dan berbau apek². Terkait dengan hal ini, Perum Bulog memiliki peran besar dalam penyediaan beras untuk masyarakat. Dalam hal ini pihak tim di tingkat Kabupaten Kota mempunyai peran untuk mengontrol dan mengevaluasi terhadap kualitas dan kuantitas beras yang akan didistribusikan pada setiap RTS. Pemerintah Pusat (Kemenkokesra) dan Pemerintah Daerah Kota Malang (BKBPM) sebagai pembuat kebijakan dalam mengontrol dan mengevaluasi program tersebut sudah menunjukkan pelayanan yang efektif.

BKBPM mempunyai tugas dan wewenang untuk mengontrol dan mengevaluasi persoalan tersebut melalui tim yang telah dibuat nyatanya tidak berjalan dengan semestinya, seperti menindaklanjuti dan mengevaluasi terhadap persoalan yang terjadi dalam pendistribusian beras kepada masyarakat Kota Malang.

2. Hubungan Kerja antara Pemerintah Pusat (Kemenko Bidang Kesra) dan Pemerintah daerah (BKBPM) Kota Malang dalam Implementasi Raskin

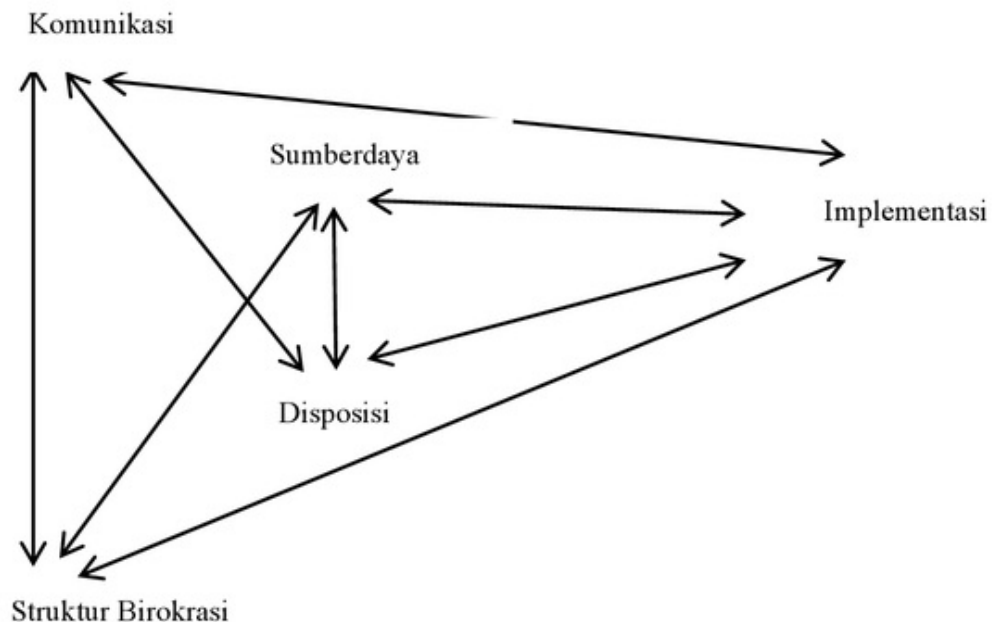
Pola hubungan kerja antara Pemerintah Pusat (Kemenko Bidang Kesra) dan Pemerintah Daerah Kota Malang (BKBPM) dalam proses implementasi program raskin untuk masyarakat pada dasarnya bersifat komando atau instruksi dari Pemerintah Pusat kepada

² Kompas.com Beras Raskin Jelek, Penerima di Malang Mengadu ke Dewan Kamis, 28 Juni 2012.

Pemerintah Daerah yang dikordinir oleh Kemenko Bidang Kesra dengan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh BKBPM di setiap Kota atau Kabupaten. Selain itu, hubungan kerjasama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam proses implementasi program raskin ini tidak lepas dari adanya proses komunikasi atau koordinasi yang baik antara kedua belah pihak dalam upaya penentuan kuota masyarakat yang berhak menerimanya, sampai kepada hal-hal teknis yang menyangkut pelaksanaan implementasi tersebut di lapangan. Dalam proses implementasinya, Pemerintah Pusat melakukan hubungan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kota Malang (BKBPM) sebagai sosialisator dan sebagai pengontrol dalam sebuah pendistribusian raskin kepada masyarakat.

Adapun teori yang digunakan untuk implementasi program raskin yaitu pola hubungan yang bersifat *Top-Down* antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan program untuk masyarakat. Disini Kami mengambil teori dari Edward III dan Sharkansky yang menyatakan bahwa *kebijakan publik adalah apa yang dikatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah*. Kebijakan negara itu berupa sasaran atau tujuan dari berbagai program pemerintahan. Edward III dan Sharkansky selanjutnya mengemukakan bahwa *kebijakan itu dapat ditetapkan secara jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan, atau dalam bentuk pidato pejabat pemerintah*. Sehingga sudah sangat jelas bahwa program-program pemerintah harus sesuai dengan peraturan yang ada. Adapun model implementasi tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1. Model Implementasi Menurut G. C Edward III



Sumber: Subarsono (2005:91)

Dari bagan diatas, dapat diuraikan lebih lanjut sebagai berikut :

- a. Variabel komunikasi yaitu proses informasi mengenai kebijaksanaan dari pelaksanaan tingkat atas kepada aparat pelaksana di tingkat di bawahnya.
- b. Variabel struktur birokrasi mencakup bagaimana struktur pemerintah, bagian tugas yang ada dan koordinasi yang dilakukan.
- c. Variabel Sumber daya: manusia, informasi dan sarana prasarana yang tersedia dalam pelaksanaan kebijakan ;
- d. variabel kecenderungan-kecenderungan atau dapat dikatakan sikap atau disposisi aparat pelaksana

Lebih lanjut, alasan penulis memilih model implementasi Edward III dan Ira Karansky didasarkan pada struktur komando yang

bersifat *top down* dengan kewenangan deskresi yang sangat sedikit. Asumsinya adalah bahwa setelah sebuah kebijakan dibuat, maka kebijakan tersebut akan diimplementasikan dan hasilnya akan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pengambil keputusan. Sedangkan pada kenyataannya, implementasi kebijakan adalah suatu proses yang kompleks yang berada dalam setting tertentu dan melibatkan banyak *stakeholder*. Pada dasarnya proses kebijakan adalah proses untuk mencapai misi yang telah ditetapkan (Jones, 1994).

Menurut George C. Edward III dan Sharkansky (dalam Subarsono 2005:90) ada empat faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan, yaitu faktor komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi dan disposisi. Model *Top-Down* yang diuraikan di atas memang memberikan gambaran alur teoritis dalam mekanisme implementasi program yang dirancang oleh Pemerintah. Akan tetapi kita bisa melihat dilapangan bahwa alur komunikasi antara pihak Pemerintah tidak sejalan dengan teori yang dijelaskan. Model (Edward III dan Sharkansky) menggambarkan secara jelas bagaimana letak hubungan antara pihak Pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi persoalan dalam implementasi raskin yang ada dilapangan. Pemerintah lebih condong memperkuat sistem birokrasi langsung ke implementasi daripada mengedepankan komunikasi langsung kepada masyarakat. Hal tersebut menyebabkan kurangnya membuka ruang publik untuk memberikan sosialisasikepada masyarakat seperti musyawarah terhadap kualitas barang, jumlah barang yang didistribusikan, dan kendala-kendala yang di alami. Pemerintah melihat dan menyelesaikan masalah hanya dari perspektif atas (Pusat) saja bukan dari perspektif bawah (masyarakat) yang berakibat tidak ada jalur komunikasi yang baik antara keinginan masyarakat dengan program yang dibuat oleh Pemerintah.

Pemerintah Pusat (Kemenko bidang kesra) dan Pemerintah Daerah Kota Malang (BKBPM) dalam hubungan implementasi dengan model koordinasi yang di kemukakan oleh Model (Edward III dan

Sharkansky) disini sudah sangat baik. Tetapi dalam sistem *Top Down* terkadang dalam koordinasinya mengalami egoisme dalam hubungan koordinasi sehingga progresnya lambat dalam sebuah implementasi kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah dan berakibat tidak meratanya sosialisasi yang efektif kepada masyarakat. Namun, beberapa kendala seperti adanya *miss communication* dalam koordinasi atau implementasi antara aktor (Pemerintah) dengan penerima kebijakan (masyarakat) sangat rentan sekaligus dikarenakan koordinasi atau implementasi antara Pemerintah dan masyarakat masih kurang optimal.

Solusi dari penelitian kami dalam pendistribusian raskin yang di tujukan di seluruh kecamatan di Kota Malang yaitu Pemerintah Pusat dan Daerah lebih mengoptimalkan koordinasi dan komunikasi kepada masyarakat yang baik. Adanya perbaikan dari sisi koordinasi , kontrol, hingga distribusi, sehingga sistim komando sesuai dengan konsep *top-down*, sehingga bisa terlaksana koordinasi yang baik. Dengan adanya korrdinasi yang baik, maka implementasi kebijakan yang direncanakan dapat terealisasi dengan baik.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Pemerintah Pusat (Kemenko bidang kesra) melakukan koordinasi dengan BKBPM Kota Malang dalam implementasi kebijakan pendistribusian raskin sudah bisa dikatakan baik dan terarah akan tetapi, masih ada beberapa hal yang terdapat didalamnya sehingga terkadang data yang di buat BPS masih belum akurat. Hal ini menyebabkan masih terjadinya salah sasaran walaupun dalam katagori kecil. Pemerintah Pusat (Kemenko bidang Kesra) dan Pemerintah Daerah Kota Malang (BKBPM) pada konsep *Top Down* dan teori implementasi yang dikemukakan Edward III banyak memunculkan pernyataan-pernyataan yang dalam realitanya belum bisa di katakan maksimal. Meskipun demikian, terlepas dari masih adanya masyarakat

yang belum mendapatkan raskindan keluhan masyarakat terkait kualitas beras yang diperoleh, program raskin ini bisa dikatakan sukses. Strategi yang dibuat dalam pendistribusian raskin yaitu dengan membuat tim-tim di beberapa jenjang Pemerintahan untuk memberikan kontribusi positif juga dalam mensukseskan program RASKIN yang telah dibuat.

2. Saran

Harus ada pembenahan kedepan sehingga program raskin bisa terealisasi secara sempurna oleh tim yang telah dibuat. Pembuatan tim tersebut bertujuan untuk mencapai 6T yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Kedepan program raskin diharapkan bisa bertransformasi menjadi program unggulan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.

Daftar Pustaka

Data Perubahan Jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) Program Raskin Tahun 2012 Di Kota Malang

Hasil PPLS 2008 dan PPLS 2

MenkoKesra, -, *Pedoman Umum Penyaluran dan Pendistribusian RASKIN Beras Untuk Rumah Tangga Miskin 2012*.

Moloeng, Lexy. J 2001, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.

Subarsono, AG 2005, *Analisis Kebijakan Publik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

“Penanaman Satu Milyar Pohon” DI KOTA BUNGA MALANG

Oleh:

Akhmad Nofrian Fahma¹

Abstraksi

Daerah Kabupaten Malang merupakan salah satu kawasan penting dalam menjaga ekosistem dan paru-paru dunia, khususnya di wilayah Jawa Timur dan Pulau Jawa pada umumnya. Kawasan ini memiliki luas hutan yang telah dikelola sendiri oleh Pemkab Malang atau diluar pengelolaan Perhutani seluas 127.089 Ha, yang meliputi hutan lindung seluas 46.207 Ha, hutan produksi seluas 44.180 Ha, hutan konservasi seluas 28.811 Ha, dan hutan rakyat seluas 7.891 Ha. Akan tetapi, tidak adanya monitoring langsung dari Kementerian Kehutanan mengakibatkan luas lahan sebesar 15.000 Ha masih termasuk dalam kategori kritis. Hal ini dikarenakan belum terjamahnya kawasan-kawasan kritis oleh pemerintah. Selain itu, tidak adanya hubungan kerja sama secara Horizontal sesama SKPD, misalnya antara Dinas Kehutanan Kabupaten Malang dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU) serta belum optimalnya kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Malang. Hal ini, dikarenakan tidak adanya solusi untuk keterbatasan tempat yang digunakan untuk melakukan pembibitan.

Hasil dari penelitian ini, yaitu: *Pertama*, sinergisitas dalam program “Penanaman Satu Milyar Pohon” merupakan gabungan dari konsep Desentralisasi dan Tugas Pembantuan. Adapun bentuk sinergisitas antara Kementerian Kehutanan dengan Dinas Kehutanan Kabupaten Malang, dapat ditinjau dari segi administratif maupun Proseduralnya. Akan tetapi, instansi yang terkait dalam program ini

¹ Muh. Azhar Farizi, Mohammad Afrien, Ratri Ganita Anggraini, Detalia Yolanda

masih terbilang *overload*. Misalnya, Dinas Pekerjaan Umum apabila ditinjau di lapangan, pohon-pohon yang ditanam oleh Dinas Kehutanan ditebang oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan alasan untuk keperluan pengerjaan jalan. Selain itu, karena tidak adanya monitoring langsung dari Kementerian Kehutanan, mengakibatkan luas lahan sebesar 15.000 Ha masih termasuk dalam kategori kritis. *Kedua*, belum efektifnya secara keseluruhan Implementasi program ini.

Kata kunci : Sintegritas Pusat dan Daerah, Lahan Kritis, Program Penanaman Satu Milyar Pohon

A. Latar Belakang

Daerah Kabupaten Malang merupakan salah satu kawasan penting dalam menjaga ekosistem dan paru-paru dunia, khususnya di wilayah Jawa Timur dan Pulau Jawa pada umumnya. Kawasan ini memiliki luas hutan yang telah dikelola sendiri oleh Pemkab Malang atau diluar pengelolaan Perhutani seluas 127.089 Ha, yang meliputi hutan lindung seluas 46.207 Ha, hutan produksi seluas 44.180 Ha, hutan konservasi seluas 28.811 Ha, dan hutan rakyat seluas 7.891 Ha, yang sebagian besar kawasan hutannya terletak di Kabupaten Malang bagian selatan yang meliputi kecamatan Pagak, Bantur, Gedangan dan Kalipare¹.

Namun ironisnya, potensi hutan seluas itu tidak mampu dikelola dengan baik oleh Pemkab Malang. Karena, terbukti lahan kritis di Kabupaten Malang masih cukup luas, mencapai sekitar 15.081 Ha². Dengan masih luasnya lahan yang kritis, maka memberikan dampak buruk terhadap lahan yang cukup signifikan seperti halnya, penurunan produktifitas lahan, erosi dan sedimentasi, bahkan banjir dan tanah longsor yang pada medio terakhir ini sering melanda wilayah selatan Kabupaten Malang.

¹<http://Kehutanan.malangkab.go.id>

²www.antaranews.com

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Kementerian Kehutanan dan Dinas Kehutanan meluncurkan suatu program, yaitu program Penanaman Satu Milyar Pohon “*One Billion Indonesian Trees*“. Penanaman satu Milyar pohon merupakan salah satu program dari Pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab dari pemerintah untuk berada pada garda terdepan dalam hal penanganan lahan kritis dan mengembalikan fungsi hutan sesuai dengan hakikatnya, dengan melibatkan seluruh *stakeholder* yang ada (*Non Institutional*). Mengingat program ini merupakan program yang diluncurkan dari Pusat, tentunya perlu dukungan dari Daerah dalam hal penyelenggaraannya. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme tugas yang jelas agar tujuan-tujuan yang diharapkan bisa tercapai dan bermanfaat.

Untuk mengukur akurasi dalam penyelenggaraan program tersebut, dapat ditinjau baik secara kelembagaan, yang meliputi struktural maupun fungsional, serta praksis pelaksanaan programnya di Daerah. Oleh karena itu, maka secara prosedural disistematiskan, sebagai berikut: 1. Perencanaan dan pelaksanaan: Dalam hal perencanaan, Dinas Kehutanan Kabupaten Malang membentuk kelompok kerja (*POKJA*), yang berguna untuk mensosialisasikan program ‘Penanaman Satu Milyar Pohon’ dan pembinaan kepada masyarakat. Selain itu untuk mengidentifikasi lokasi penanaman, baik yang di dalam hutan maupun di luar, serta menentukan bibit yang tepat untuk ditanam pada lokasi-lokasi yang telah ditentukan. Selain itu juga membangun kemitraan dengan lembaga-lembaga Non Pemerintahan; 2. Monitoring dan Evaluasi program yang diselenggarakan di Kabupaten Malang dilakukan oleh Bupati, dengan berbagai parameter, yakni keberadaan dan efektifitas kinerja kelompok kerja, keberadaan dan efektifitas kinerja untuk posko penyaluran bibit, serta realisasi jumlah bibit yang telah ditanam. Ditinjau dari sisi efektifitas kinerja kelompok kerja, telah mampu menjalankan tugasnya secara optimal, terlihat dengan suksesnya proses kampanye maupun sosialisasi mengenai

program Penanaman Satu Milyar Pohon. Hal ini terbukti dengan banyaknya partisipasi dari masyarakat. Namun dalam hal penyaluran bibit masih tersentral di Dinas Kehutanan, dalam artian setiap masyarakat yang membutuhkan bibit bisa mengajukan bibit di Dinas Kehutanan. Akan tetapi, tidak menutup kesempatan bagi masyarakat yang ingin melakukan pengadaan bibit secara swadaya.

Dalam hal realisasi jumlah bibit yang telah ditanam, telah mengalami peningkatan yang cukup signifikan, meskipun sempat terjadi keterbatasan stok bibit. Hal ini dikarenakan keterbatasan tempat untuk melakukan pembibitan serta proses pembibitan yang memakan waktu cukup lama. Untuk mewujudkan akuntabilitas dalam kinerja pelaksanaan program ini, maka dibutuhkannya suatu pelaporan. Dalam mekanisme pelaporannya dilakukan secara berjenjang. Seiring dengan perkembangan informasi dan teknologi, untuk memacu kepedulian masyarakat, dalam hal memantau dan melaporkan program ‘Penanaman Satu Milyar Pohon’, maka dikembangkanlah aplikasi *online* untuk pelaporannya. Adapun dalam hal pendanaan program ini didanai oleh APBD maupun APBN. Untuk penanaman, rata-rata pohon yang ditanam berjumlah 400 pohon/ha. Sedangkan dalam hal pelaksanaannya dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Malang, di bawah tanggung jawab Kementerian Kehutanan, yang sekaligus bertugas melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program tersebut.

Lahan kritis dapat didefinisikan sebagai lahan yang telah mengalami kerusakan sehingga berdampak pada berkurangnya fungsi lahan sampai pada batas ditentukan atau diharapkan³. Beberapa upaya dalam menangani lahan kritis ini pun telah dilakukan oleh Dinas Kehutanan, salah satunya dengan menanam pohon sengon. Dengan pertimbangan pohon ini cocok untuk ditanam di kawasan tersebut. Selain itu, pohon tersebut tidak banyak membutuhkan perawatan⁴.

³Wahono, 2002:3, Ade Iwan Setiawan, 1996:3

⁴<http://lppm.ipb.co.id>

Sedangkan dalam proses penanamannya diterapkan satu metode, yaitu metode demplot⁵. Dalam proses pelaksanaan, Dinas Kehutanan Pemkab Malang bekerja sama dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan Peningkatan Produktivitas Hutan (*POSPROHUT*) Bogor. Dengan metode demplot tersebut, masyarakat tidak hanya bisa menghasilkan kayu. Akan tetapi, juga dapat menghasilkan berbagai jenis tanaman lain, seperti jahe yang bisa ditanam di bawah sengon.

Dari berbagai upaya tersebut meskipun belum mampu menyelesaikan atau mengembalikan fungsi hutan sebagaimana mestinya, namun telah memberikan upaya penurunan yang cukup signifikan. Hal ini ditunjukkan dengan menurunnya jumlah lahan kritis dari yang sebelumnya mencapai 35.000 Ha kini tinggal 15.000 Ha yang masuk dalam kategori kritis⁶. Hal ini dikarenakan, belum terjamahnya kawasan-kawasan kritis oleh pemerintah daerah, sebagaimana data yang dirilis oleh Greenpeace, menunjukkan bahwa kerusakan hutan di Indonesia mencapai 3.800.000 Ha per tahun⁷ yang sebagian besar diakibatkan karena penebangan liar atau *illegal logging*⁸. Oleh karena itu, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kehutanan ikut bertanggung jawab dan berperan aktif dalam penanganan lahan kritis di berbagai daerah.

Konsepsi Program ‘Penanaman Satu Milyar Pohon’ yang dicanangkan oleh Kementerian Kehutanan melalui Instruksi Presiden,

⁵ Suatu metode penyuluhan pertanian kepada petani, dengan cara membuat laporan percontohan, agar petani bisa melihat dan membuktikan terhadap objek yang didemonstrasikan.

⁶ Disampaikan oleh kepala bagian PPSDM Dinas Kehutanan Kabupaten Malang, Ir. Imam Muslih dalam Interview yang dilakukan oleh tim peneliti di Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Malang Pada tanggal 29 Mei 2013

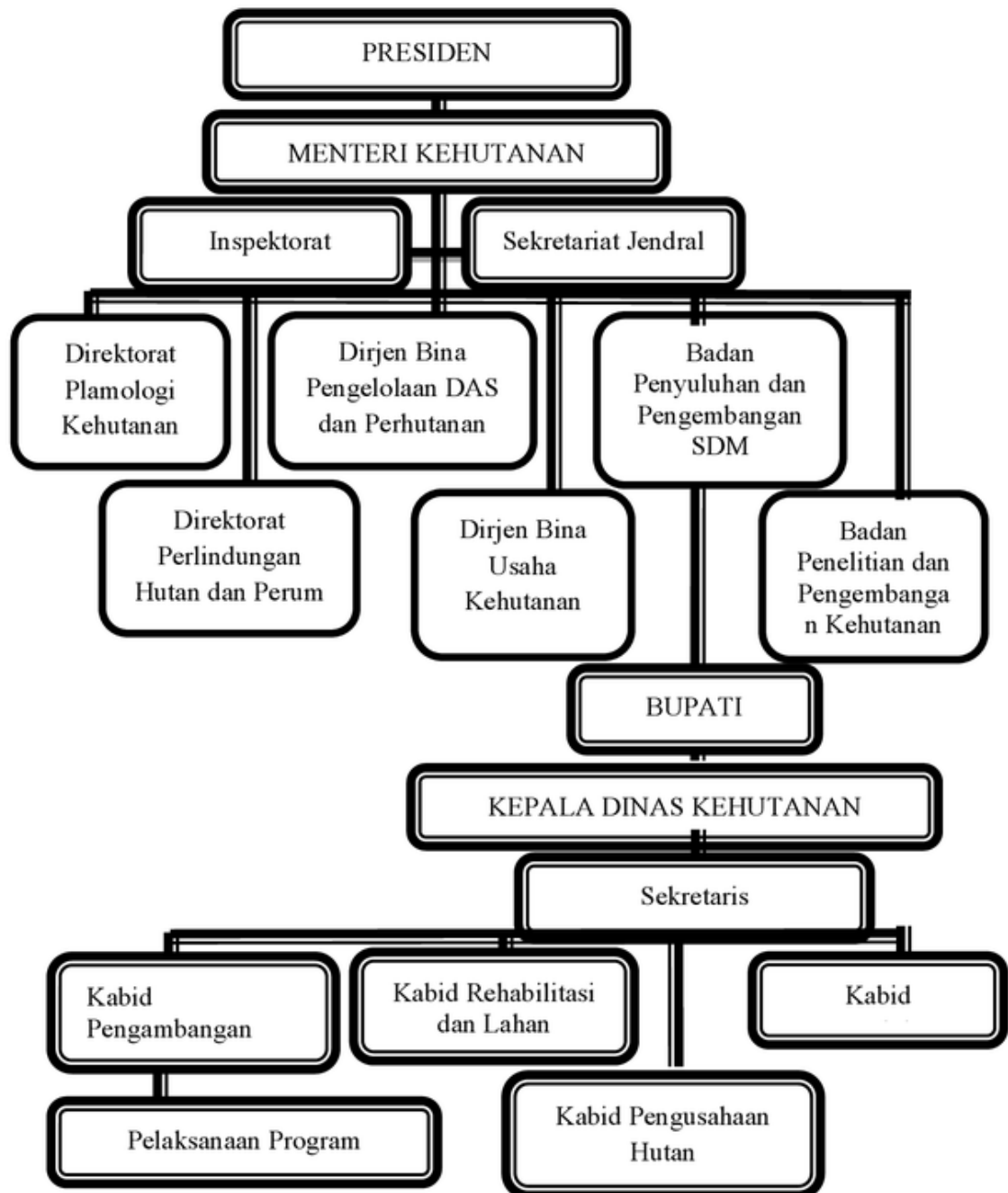
⁷<http://greenpeace.com>, diakses pada 30 Mei 2013

⁸ Illegal logging merupakan penebangan kayu secara tidak sah dan melanggar peraturan Perundang-undangan, yaitu berupa pencurian kayu didalam kawasan hutan Negara atau hutan hak (milik) dan atau pemegang ijin melakukan penebangan lebih dari jatah yang telah ditetapkan dalam perizinan

berdasarkan pada amanat UU Nomor 5 tahun 1967, menyatakan bahwa hutan di Indonesia sebagai sumber kekayaan alam dan salah satu unsur basis pertahanan Nasional yang harus dilindungi dan dimanfaatkan guna kesejahteraan rakyat. Gerakan ‘Penanaman Satu Milyar Pohon’ ini diselenggarakan secara Nasional dengan melibatkan seluruh komponen bangsa dalam rangka rehabilitasi hutan dan lahan kritis sertaantisipasi dampak perubahan iklim global. Hal ini dilakukan guna meningkatkan kepedulian seluruh komponen bangsa akan pentingnya fungsi pohon untuk penurunan emisi gas rumah kaca dalam mengurangi pemanasan global dan untuk mencapai pembangunan Indonesia yang bersih (*Clean Development Mechanism*). Dengan demikian seluruh komponen bangsa diajak untuk melakukan penanaman dan pemeliharaan pohon secara berkelanjutan guna merehabilitasi hutan dan lahan.

Berdasarkan pada UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dijelaskan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah. Dalam konteks penyelenggaraan Program ‘Penanaman Satu Milyar Pohon’ yang dicanangkan oleh Kementerian Kehutanan berdasarkan pada Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.16/Menhut/2012 tentang Panduan Penanaman Satu Milyar Pohon Tahun 2012. Dari Menteri Kehutanan didesentralisasikan melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam kepada Dinas kehutanan Kabupaten Malang, yang kemudian dalam pelaksanaannya menjadi tanggung jawab Dinas Kehutanan Kabupaten Malang. Hubungan tersebut digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1. Hubungan Kerja Kementerian Kehutanan dengan Dinas Kehutanan Kab. Malang

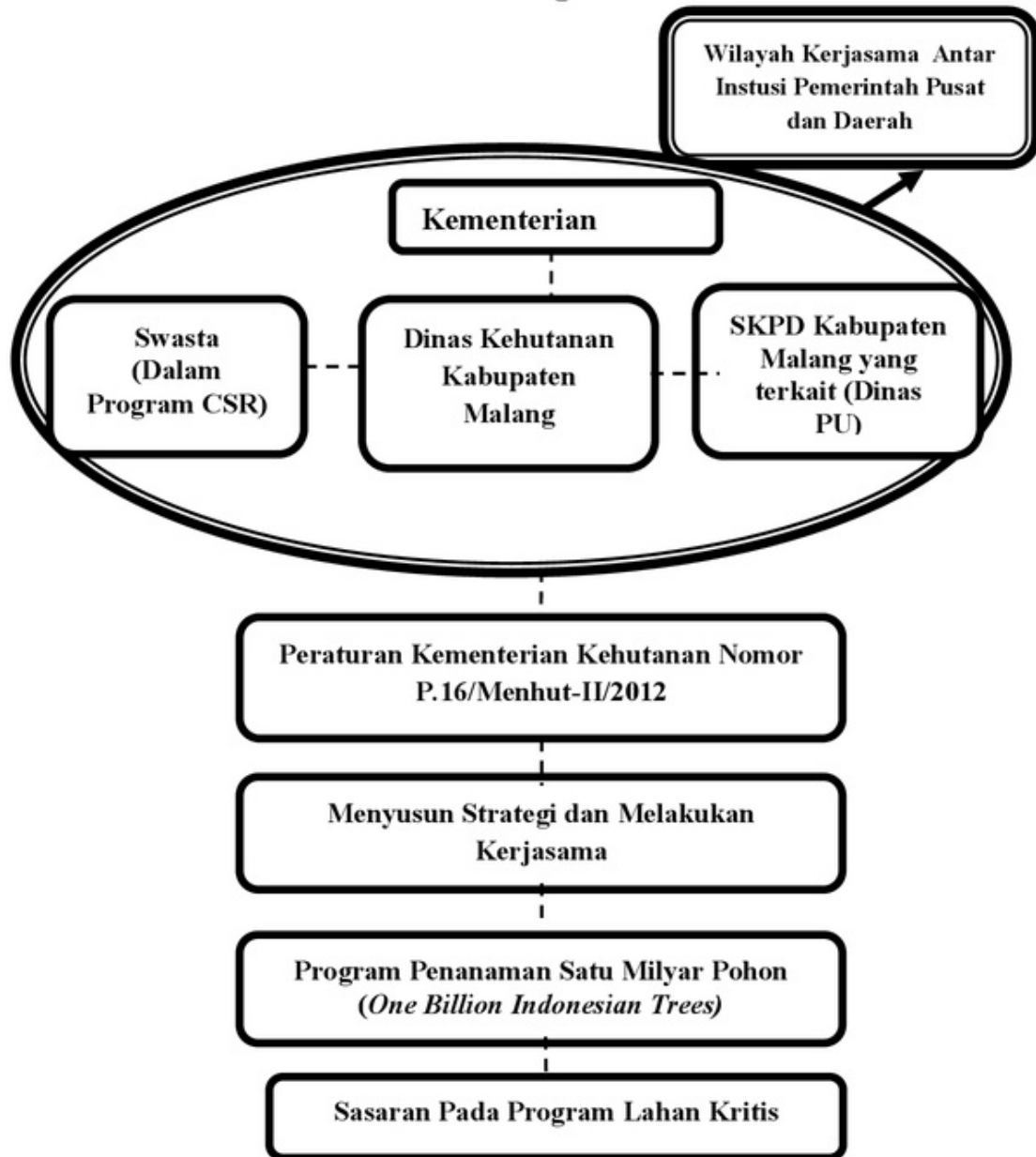


Sumber: Data Diolah

Masalah yang dibahas dalam essay ini sesuai dengan yang terdapat dalam *research proposal*, yaitu: 1. Bagaimana bentuk sinergisitas antara Kementerian Kehutanan dan Dinas Kehutanan Kabupaten Malang dalam melaksanakan program penanaman satu Milyar pohon untuk menangani lahan kritis di Kabupaten Malang?; 2. Bagaimana implementasi program penanaman satu milyar pohon untuk menangani lahan kritis di Kabupaten Malang?

Argumen yang akan dikemukakan oleh penulis dalam essay ini, yaitu tidak adanya monitoring langsung dari Kementerian Kehutanan, sehingga mengakibatkan luas lahan sebesar 15.000 Ha masih termasuk dalam kategori kritis. Hal ini dikarenakan belum terjamahnya kawasan-kawasan kritis oleh Pemerintah. Selain itu, tidak adanya hubungan kerja sama secara horizontal sesama SKPD, misalnya antara Dinas Kehutanan Kabupaten Malang dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU). Apabila ditinjau dari prosedural yang telah dilakukan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Malang, terlihat tidak adanya hubungan kerjasama tersebut. Sementara itu, jika ditinjau di lapangan, pohon-pohon yang ditanam oleh Dinas Kehutanan ditebang oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) dengan alasan untuk keperluan pengerjaan jalan. Dengan demikian, perlu adanya kerja sama horizontal sesama SKPD di Kabupaten Malang. Selain itu belum optimalnya kegiatan monitoring dan evaluasi yang juga dilakukan oleh Bupati Kabupaten Malang. Hal ini, dikarenakan tidak adanya solusi untuk keterbatasan tempat yang digunakan untuk melakukan pembibitan. Dengan demikian, perlu adanya solusi untuk permasalahan tersebut, sehingga implementasi program Penanaman Satu Milyar Pohon yang merupakan upaya untuk menangani lahan kritis di wilayah Kabupaten Malang dapat terealisasi.

Gambar 2: Kerangka Berfikir



Sumber: Data Diolah

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan, yaitu metode kualitatif deskriptif. Metode kualitatif artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumen resmi lainnya⁹. Sehingga akan memberikan gambaran tentang program yang akan diteliti oleh penulis. Diharapkan dengan metode yang digunakan oleh penulis dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang berguna bagi semua pihak.

Penelitian ini lebih memfokuskan pada studi kasus tentang lahan kritis yang menjadi aspek sinergisitas Pusat dan Daerah serta implementasi program Penanaman Satu Milyar Pohon yang merupakan penelitian yang rinci mengenai suatu obyek tertentu. Studi kasus ialah suatu pendekatan yang bertujuan untuk mempertahankan keutuhan dari obyek yang diteliti, artinya data yang dikumpulkan dalam studi kasus dipelajari sebagai suatu keseluruhan yang terintegrasi, dimana tujuannya adalah untuk memperkembangkan pengetahuan yang mendalam mengenai obyek yang bersangkutan yang berarti bahwa studi kasus harus disifatkan sebagai penelitian yang deskriptif¹⁰.

Pada penelitian ini, sumber data yang digunakan, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang didapatkan langsung dari responden penelitian¹¹ data ini diperoleh melalui interview dan observasi di Dinas Kehutanan Kabupaten Malang. Sedangkan data sekunder merupakan data primer yang diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain¹². Secara keseluruhan, data yang digunakan dalam penelitian ini

⁹ (lib.Uin-malang.ac.id/thesis/chapter_ii/07130097-hendra-kumiawan.pdf)

¹⁰ (repository.upi.edu/operator/upload/s_plb_0607065_chapter3.pdf)

¹¹ (globviews.files.wordpress.com/2009/03/10-metode-pengumpulan-data-instrumen-compitibility-mode.pdf)

¹² (globviews.files.wordpress.com/2009/03/10-metode-pengumpulan-data-instrumen-compitibility-mode.pdf)

meliputi Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri Kehutanan.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, sehingga akan memberikan gambaran yang jelas mengenai program ini. Selain itu, pengkolaborasian teori-teori sebagai salah satu referensi penunjang dalam proses menganalisis, sehingga data yang terkumpul dapat diuraikan secara sistematis dan kesimpulan yang didapatkan akan mudah untuk dipahami. Adapun untuk lokasi penelitian, penelitian ini dilakukan di Dinas Kehutanan Kabupaten Malang dan lokasi Penanaman Satu Milyar Pohon dilaksanakan.

C. Hasil dan Analisa

1. Hubungan antara Pusat dan Daerah dalam Program “Penanaman Satu Milyar Pohon”

Ada beberapa Tipologi dalam pendelegasian wewenang secara fungsional dari Pusat ke Daerah untuk penyelenggaraan program ini, yaitu:

1. Desentralisasi, Daerah bertugas melaksanakan program dimana anggaran yang digunakan langsung dari kas Daerah (APBD).
2. Dekonsentrasi, Pemerintah Pusat bertugas merencanakan dan menyediakan anggaran. Sedangkan untuk pelaksanaan program diserahkan kepada Provinsi, selanjutnya dari Provinsi meminta Kabupaten untuk melaksanakan program tersebut.
3. Tugas pembantuan, yaitu tugas yang diberikan oleh Pusat ke Kabupaten. Pusat yang merencanakan program sedangkan untuk Kabupaten yang melaksanakan program tersebut. Sedangkan untuk anggaran yang digunakan, langsung dari Pusat dan dalam mekanisme pelaporan Kabupaten langsung

melaporkan ke pihak Pusat. Sedangkan dalam pengawasan langsung dilakukan oleh Pusat.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, program “Penanaman Satu Milyar Pohon” merupakan gabungan dari konsep desentralisasi dan tugas pembantuan. Program ini bertujuan untuk menangani lahan kritis di wilayah Kabupaten Malang dan perubahan iklim. Dalam program ini, Dinas Kehutanan Kabupaten Malang bekerjasama dengan berbagai pihak antara lain: Pemerintah Pusat, Swasta, dan Masyarakat. Adapun peran Dinas Kehutanan dalam hal ini, yaitu hanya sebagai pemantau dan pemberi penyuluhan kepada masyarakat terkait tata cara perawatan. Yang menjadi tolak ukur kinerja Dinas Kehutanan, yaitu dapat dilihat dari seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat selama penyelenggaraan maupun setelah penyelenggaraan program.

Adapun bentuk mekanisme pertanggung jawaban dalam hal penyelenggaraan program ini, yaitu dari Dinas Kehutanan membuat laporan kepada Bupati dan secara langsung Bupati meneruskan laporan tersebut ke Menteri Kehutanan. Adapun beberapa hal yang disampaikan dalam laporan pertanggung jawaban tersebut, antara lain: 1. Berapa banyak pohon yang telah ditanam di wilayah tersebut; 2. Berapa banyak pohon yang berhasil ditanam (hidup); 3. Manfaat pohon yang ditanam bagi masyarakat. Pelaporan ini dilakukan Dinas Kehutanan Kabupaten Malang setiap tri wulan.

2. Implementasi Program Penanaman Satu Milyar Pohon untuk Menangani Lahan Kritis di Kabupaten Malang

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pembagian Tugas Pemerintah, yaitu peran dari Dinas Kehutanan Kabupaten Malang adalah sebagai Bina Industri. Bina Industri dalam artian ini, yaitu kewajiban dari Dinas Kehutanan untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat agar memanfaatkan hutan

tidak hanya sebagai barang mentah melainkan juga sebagai barang jadi. Adapun tugas dari bina industri, yaitu:

1. Mengawasi kinerja Perhutani
2. Pengawasan dan Penanganan Lahan kritis (Pemerintah Pusat yang menentukan kriteria dan menetapkan lahan-lahan yang masuk dalam kategori lahan kritis, lalu daerah yang memastikan apakah lahan tersebut termasuk dalam kriteria lahan kritis atau tidak).
3. Pengadaan dan Pengawasan Bibit.
4. Pusat pengembangan taman hutan rakyat.

Lebih lanjut, menurut Ir. Imam Muslih Kabag. PPSDM, lahan kritis merupakan lahan yang fungsinya terganggu, dengan ciri-ciri unsur hara yang mulai berkurang dan penyerapan air yang buruk¹³.

Kabupaten Malang sendiri memiliki luas hutan sebesar 127.089 Ha dimana 6000 Ha termasuk dalam kategori hutan Negara. Selain itu, untuk perawatan pohon Dinas Kehutanan menyerahkan kepada masyarakat yang memiliki lahan tersebut. Adapun peran Dinas Kehutanan dalam hal ini, yaitu hanya sebagai pemantau dan pemberi penyuluhan kepada masyarakat tentang tata cara perawatan. Disisi lain penyuluhan tersebut berguna untuk menjaring aspirasi dari masyarakat. Dari hasil penyuluhan tersebut Dinas Kehutanan memperoleh data sebesar 20% dari masyarakat yang menginginkan tanaman yang ditanam nanti adalah tanaman buah seperti Durian dan Alpukat.

Anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan "*Program Penanaman Satu Milyar Pohon*" berasal dari APBD dan APBN. Pelaksanaan "*Program Penanaman Satu Milyar Pohon*" rutin dilakukan setiap tanggal 28 November yang sekaligus bertepatan dengan Hari Menanam Pohon Dunia yang berdasarkan Keppres tahun 2008 guna menekankan gerakan masyarakat sadar menanam. Sementara itu, dalam pengadaan bibit dilakukan oleh Dinas Kehutanan,

¹³ Data didapat dari hasil interview, 29 Mei 2013

yang mana proses pembibitannya dimulai dari bulan Januari hingga mendekati bulan November yang kemudian bibit tersebut mulai dibagikan ke kelompok-kelompok Tani. Adapun jenis Pohon yang ditanam dikhususkan pada pohon yang berkambium¹⁴. Hal ini dikarenakan pohon yang berkambium mampu menghasilkan Oksigen lebih banyak dan mampu menghambat erosi pada tanah. Jenis pohon yang masuk dalam kriteria tersebut antara lain Kayu Sengon, Gaharu, Trembesi dan Mahoni. Selain itu, Dinas Kehutanan juga melakukan Agroforestry¹⁵ untuk menunjang manfaat tanaman untuk kondisi perekonomian masyarakat.

Adapun program ‘Penanaman Satu Milyar Pohon’ ini juga bekerja sama dengan pihak swasta. Dikarenakan pihak swasta mempunyai tanggung jawab sosial untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Melalui program CSR dari pihak swasta¹⁶, dalam program ‘Penanaman Satu Milyar Pohon’ sering mendapatkan berbagai macam sumbangan. Baik sumbangan dana, bibit, banner, sticker, maupun tenda.

Dinas Kehutanan Kabupaten Malang dan Bapak Ir. Imam Muslih, mengharapkan penanganan lahan kritis ini tidak hanya dibebankan kepada Dinas Kehutanan saja, melainkan juga dari semua pihak, bahkan bisa dilakukan dengan bekerjasama antar SKPD dalam proses pemenuhan target guna pengurangan emisi gas sebesar 28% yang dibebankan pemerintah pusat kepada Dinas Kehutanan¹⁷.

Target dan tujuan utama dari “*Program Penanaman Satu Milyar Pohon*”, yaitu: 1. Mengatasi Lahan Kritis di wilayah Kabupaten Malang; 2. Menangani perubahan iklim. Dinas Kehutanan juga berharap adanya kerjasama secara horizontal sesama SKPD di

¹⁴ Tanaman yang batang dan dahannya mengandung kayu.

¹⁵ Perpaduan tanaman hutan, perkebunan dan pertanian dalam satu lahan.

¹⁶ Pihak Swasta tersebut, antara lain: Bank, Lembaga Kemasyarakatan, BUMD dan Perusahaan-perusahaan Swasta

¹⁷ Data didapat dari hasil interview, 29 Mei 2013

Kabupaten Malang, misalnya dengan pihak Jasamarga dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) dapat lebih mensukseskan program penanaman pohon. Hal ini dikarenakan banyak kejadian di lapangan yang menunjukkan bahwa pohon-pohon yang ditanam oleh Dinas Kehutanan ditebang oleh Dinas PU maupun Jasamarga dengan alasan keperluan pengerjaan jalan. Dengan demikian, perlu adanya komunikasi dan kerja sama antar Institusi untuk saling mendukung program masing-masing Institusi.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Sinergisitas dalam Program “Penanaman Satu Milyar Pohon” merupakan gabungan dari konsep desentralisasi dan tugas pembantuan. Adapun bentuk sinergisitas antara Kementerian Kehutanan dengan Dinas Kehutanan Kabupaten Malang, dapat ditinjau dari segi administratif maupun proseduralnya. Dimana Kementerian Kehutanan yang merencanakan dan melakukan monitoring sedangkan Dinas Kehutanan Kabupaten Malang yang melaksanakan program tersebut. Akan tetapi, instansi yang terkait dalam program ini masih terbilang *overload* misalnya Dinas PU. Selain itu tidak adanya monitoring langsung dari Kementerian Kehutanan mengakibatkan luas lahan sebesar 15.000 Ha masih termasuk dalam kategori kritis.

Adapun Implementasi dalam program ‘Penanaman Satu Milyar Pohon’, secara keseluruhan belum efektif. Hal ini dikarenakan: 1. Masih banyaknya lahan kritis yang terdapat di wilayah Kabupaten Malang; 2. Dalam hal penyaluran bibit masih tersentral hanya di Dinas Kehutanan; 3. Sempat terjadi keterbatasan stok bibit dikarenakan keterbatasan tempat untuk melakukan pembibitan serta proses pembibitan yang memakan waktu cukup lama.

2. Saran

Adapun saran dari penulis untuk permasalahan tersebut, yaitu:
1. Perlu adanya monitoring langsung dari Kementerian Kehutanan serta

kerja sama antar SKPD Kabupaten Malang, untuk mensukseskan program ‘Penanaman Satu Milyar Pohon’, sebagai upaya untuk menangani lahan kritis di wilayah Kabupaten Malang; 2. Perlu diadakannya posko-posko penyaluran bibit agar penyaluran bibit tidak hanya tersentral di Dinas Kehutanan. Hal ini akan memudahkan pelayanan dalam penyediaan dan penyaluran bibit ke masyarakat, guna mensukseskan program ‘Penanaman Satu Milyar Pohon’.

DAFTAR PUSTAKA

- Globviews 2009, '*Metode Pengumpulan Data Instrumen*', diakses pada 20 Juni 2013 <globviews.files.wordpress.com/2009/03/10-metode-pengumpulan-data-instrumen-compitibility-mode.pdf>
- Green Peace, diakses pada 30 Mei 2013 <<http://greenpeace.com>>
- Irwanto, 2012, '*Kerusakan Hutan Di Indonesia*', diakses pada 1 juni 2013 <www.irwantoshut.net/kerusakan_hutan_indonesia.html>
- Dinas Kehutanan Kabupaten Malang, diakses pada 27 Mei 2013 <www.kehutanan.malangkab.go.id>
- Mahardika, Timur 2001, *Strategi Tiga Kaki (Dari Pintu Otonomi Daerah Mencapai Keadilan Sosial)*, Laperia Pustaka Utama, Yogyakarta
- Partisio, Arif 2004, *Cara Mudah Mengatasi Masalah Statistik dan Rancangan Percobaan dengan SPSS 12*, PT. EMK, Jakarta
- Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.16/Menhut/2012 tentang Panduan Penanaman Satu Milyar Pohon Tahun 2012, diakses pada 29 Mei 2013 <http://www.dephut.go.id/apl/uploads/P.16_2012_PanduanPenanamanSatuMilyar.pdf>
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan, diakses pada 30 Mei 2013 <www.penataanruang.net/taru/hukum/uu_no5-1967.htm>

Universitas Negeri Malang 2007, '*Metode Penelitian*', diakses pada 20 Juni 2013 <lib.Uin-malang.ac.id/thesis/chapter_iii/07130097-hendra_kurniawan.pdf>

Universitas Pendidikan Indonesia 2006, '*Metode Penelitian*', diakses pada 20 Juni 2013 <repository.upi.edu/operator/upload/s_plb_0607065_chapter3.pdf>

BAGIAN III:
KEMISKINAN, PENDIDIKAN DAN INFRASTRUKTUR

PERAN DINAS SOSIAL DALAM PENGENTASAN PMKS DI KOTA MALANG

Oleh:
Haeril¹

Abstraksi

Essay ini membahas tentang sinergitas antar aktor Pemerintah “dalam Pengentasan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) Melalui Program Penyelenggaraan Jaminan Kesejahteraan Sosial” studi kasus Dinas Sosial Kota Malang dalam bingkai Hubungan Pusat dan Daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan program jaminan kesejahteraan sosial dan untuk mengetahui sinergitas antar aktor Pemerintah dalam penyelenggaraan jaminan kesejahteraan sosial di Kota Malang.

Adapun dasar hukum penyelenggaraan program ini adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Serta Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 pasal 16 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Malang. Untuk mencari informasi dan memecahkan masalah tersebut, maka penulis menggunakan metode penelitian lapangan dan instrumen penelitian yang dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah teknis analisis kualitatif deskriptif dimana subyek penelitiannya adalah Dinas Sosial Kota Malang sebagai penyelenggara pelayanan di bidang kesejahteraan sosial.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui Dinas Sosial Kota Malang sebagai penyedia

¹ Octavia Dhetaningrum R.R, Nurul Anggraeni, Erwin Nizar dan Aditya Jones

layanan publik dalam penyelenggaraan jaminan kesejahteraan sosial belum menunjukkan inisiasi dan sinergitas kerja yang positif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Hal ini terlihat dari program pelayanan kesejahteraan sosial yang masih sangat terbatas, kapasitas sumber daya manusia dan pelaksana pelayanan kesejahteraan sosial baik secara substansi teknis maupun praktis masih terbatas. Selain itu, koordinasi dan komunikasi pada berbagai sektor dan level (Pemerintah dan Pemerintah Daerah), masih belum optimal. Selain itu, kegiatan bantuan dan jaminan sosial bagi PMKS masih tumpang tindih satu sama lain. Hal tersebut terjadi karena terhambat oleh sarana dan prasarana kantor yang tidak memadai, juga anggaran dari Pusat untuk menjembatani pelaksanaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk PMKS yang masih sangat minim.

Kata Kunci: Sinergitas, program, Layanan, Inisiasi, PMKS

A. Latar Belakang

Telah banyak sekali dijumpai kesenjangan sosial ekonomi dan masalah kesejahteraan yang dialami oleh masyarakat. Tak lain halnya dengan kondisi masyarakat di Kota Malang Jawa Timur. Dinamika Kota Malang selama ini, tidak bisa kita pungkiri mengalami beberapa problematika baru. Keberhasilan pembangunan Kota Malang pada masa lalu, juga masih menyisakan beberapa masalah, baik masalah kesenjangan sosial, pendidikan, lingkungan hidup, tata kelola daerah, dan masih banyak lainnya.² Sehingga dari berbagai permasalahan tersebut juga berdampak pada timbulnya masalah baru seperti masalah

²Menjalankan upaya tata kelola pemerintahan daerah, memang harus berpangkal dan berujung pada paradigma “Membangun Kesejahteraan Masyarakat Secara Adil dan Menyeluruh”. Namun, dalam aplikasi dan implementasinya, semua pihak juga harus ikut berpartisipasi aktif dalam meraih tujuan kesejahteraan bersama tersebut. Maka, dalam membangun kesejahteraan bersama, juga harus menjadi tanggung jawab bersama. <http://ojok-lali.com/> Bunda Heri Pudji Utami, *strategi-lima-kaki/*

kesejahteraan sosial. Hal ini terlihat dari masih banyaknya masyarakat yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan meningkatnya masalah-masalah sosial, seperti: kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial, dan penyimpangan perilaku, tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, menurunnya tingkat ekonomi, penyimpangan norma, serta meningkatnya kriminalitas.³

Permasalahan kesejahteraan sosial tersebut dilatarbelakangi adanya perubahan dalam kehidupan masyarakat Kota Malang di era globalisasi saat ini, yang dibarengi dengan meningkatnya kebutuhan hidup. Persaingan hidup yang semakin ketat, ketidakmampuan dan keterbatasan masyarakat untuk beradaptasi, sehingga menghambat seseorang untuk memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang tersedia.

Sumber daya bisa berupa kebutuhan primer, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, peluang usaha dan pekerjaan, serta dapat berupa kebutuhan sekunder, seperti sarana pengembangan usaha, sarana perjuangan hak asasi, sarana saluran politik, pemenuhan pengembangan karir, dan lain-lain.⁴ Masalah-masalah sosial tersebut dapat melahirkan dehumanisasi dan melemahnya nilai-nilai serta hubungan antar manusia. Lebih lanjut, semua masalah sosial tersebut telah menjadi hambatan utama bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial (Suharto Edi, 2005).

Ada dua faktor yang menyebabkan masalah-masalah sosial itu muncul. *Pertama*, faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang (faktor internal). Rendahnya kualitas sumberdaya manusia karena tingkat pendidikan (keterampilan) atau kesehatan rendah atau ada

³ Mediacenter.Malangkota.go.id

⁴ Kesejahteraan sosial merupakan suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat, sehingga mampu mengembangkan diri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya yang dapat dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial (UU No 11 Tahun 2009 pasal 1 dan 2).

hambatan budaya (budaya kemiskinan). *Kedua*, faktor-faktor yang berasal dari luar kemampuan seseorang.⁵ Hal ini dapat terjadi karena birokrasi atau peraturan-peraturan resmi (kebijakan), sehingga dapat membatasi atau memperkecil akses seseorang untuk memanfaatkan kesempatan dan peluang yang tersedia. Dengan kata lain, masalah-masalah kesejahteraan sosial bukan terjadi karena seseorang malas bekerja atau tidak mempunyai kemampuan sebagai akibat keterbatasan atau rendahnya kualitas sumberdaya manusia, tetapi karena ada hambatan-hambatan atau tekanan-tekanan struktural (Rukminto Isbandi, 2003).

Oleh karena itu, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ditekankan untuk lebih memperhatikan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) karena dengan perhatian tersebut dapat mewujudkan sinergitas pembangunan kesejahteraan sosial antara Pemerintah Pusat, Provinsi serta Kabupaten/Kota. Tidak hanya itu, Pemerintah dan masyarakat seharusnya mempunyai tanggung jawab yang sama dalam penanggulangan permasalahan sosial. Oleh karena itu, upaya penanganan masalah kesejahteraan sosial tersebut akan lebih baik lagi hasilnya melalui kerjasama kemitraan dengan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat khususnya dari tokoh masyarakat dan Orsos (Organisasi Sosial) dengan lintas sektor lainnya⁶.

Oleh karena itu, pembangunan kesejahteraan sosial ini menjadi bagian tak terpisahkan dari pembangunan nasional. Pemerintah dan Pemerintah daerah Kota Malang serta masyarakat harus berupaya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk mengatasi PMKS menjadi kerangka kegiatan yang utuh, menyeluruh, berkelanjutan dan

⁵ DepSos.go.id, 2012 "Laporan Kegiatan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Pacet,

⁶Nasikun, 2003. Sistem Sosial Indonesia, PT. Rajawali Press, Jakarta.

bersinergi, sehingga kesejahteraan sosial masyarakat lambat laun dapat meningkat.⁷

Argumen kelompok yang akan di kemukakan dalam essay ini ialah tentang penyelenggaraan jaminan kesejahteraan sosial yang secara implementasi oleh Dinas Sosial belum maksimal, diantaranya, kurang terkoordinirnya bantuan sosial baik yang dilakukan perseorangan maupun perusahaan/kelompok peduli dan lain sebagainya, sehingga ketika pelaksanaannya terjadi tumpang tindih, dan sinergitas peran antar Pemerintah dan Pemerintah Daerah belum optimal dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS. Hal ini tercermin dalam aspek pelayanan kelembagaan yang disediakan, serta penyediaan anggaran untuk menjembatani pelaksanaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk PMKS yang masih sangat minim.

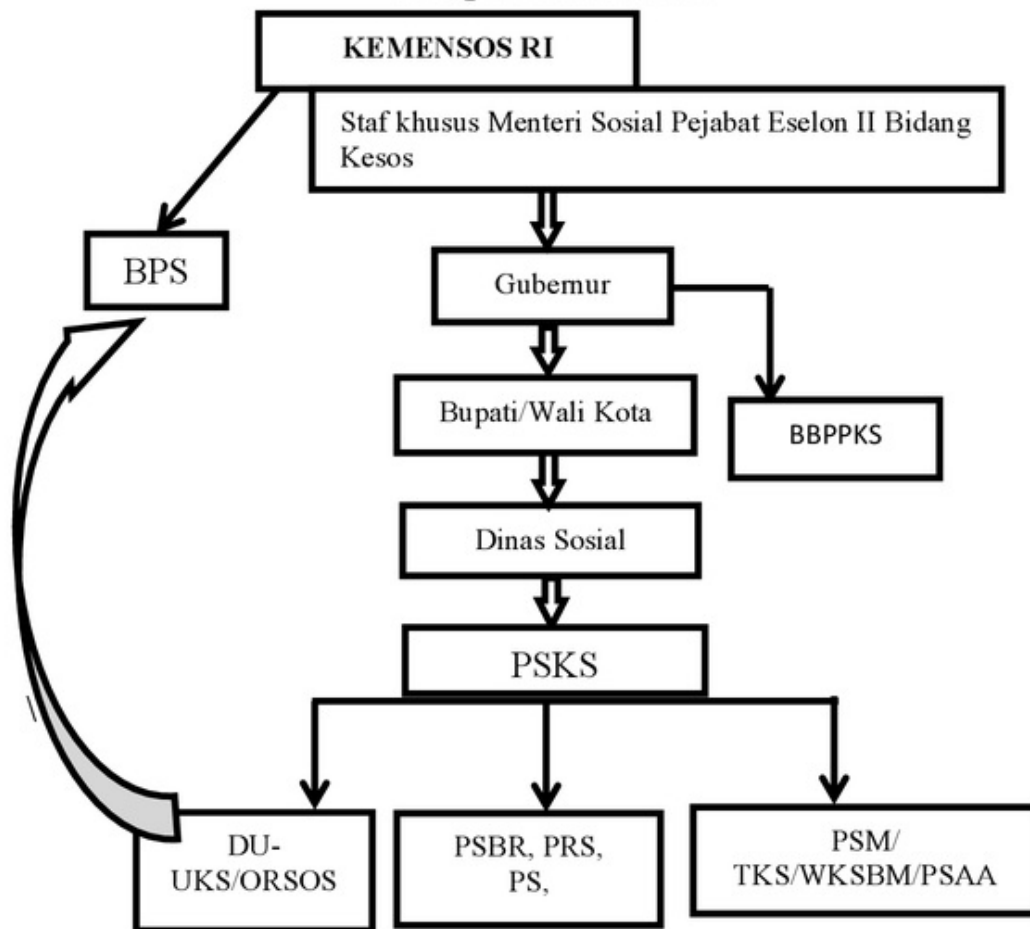
Dengan demikian, dari latar belakang di atas, adapun masalah yang muncul ialah:

1. Bagaimana pelaksanaan program jaminan kesejahteraan sosial di Kota Malang ?
2. Bagaimana sinergitas antar aktor Pemerintah dalam penyelenggaraan jaminan kesejahteraan sosial di Kota Malang?

Adapun struktur pola hubungan sinergitas antar aktor pemerintah dalam hal ini adalah Pusat dan Daerah dalam Pengentasan PMKS melalui program penyelenggaraan jaminan kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut:

⁷PMKS adalah seseorang keluarga atau kelompok masyarakat yang karena sesuatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (Jasmani, rohani dan sosial) secara mamadai dan wajar (Salinan PERDA Kota Malang Nomor 6 TAHUN 2012).

Gambar 1. Pola Hubungan antar Aktor Pemerintah dalam Pengentasan PMKS



Sumber: Salinan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 pasal 16 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Malang.

B. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan adalah metode Penelitian Kualitatif. Dalam pelaksanaannya, peneliti tidak mengambil jarak dengan yang diteliti. Hubungan yang dibangun didasarkan pada saling

kepercayaan. Dalam praktiknya, peneliti melakukan hubungan dengan yang diteliti secara intensif (Jonathan, 2009).

2. Jenis Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui sinergitas antar aktor Pemerintah dalam penyelenggaraan jaminan kesejahteraan sosial serta untuk mengetahui pelaksanaan program jaminan kesejahteraan sosial di Kota Malang. Untuk itu, penelitian ini lebih menitikberatkan pada jenis penelitian deskriptif (*Descriptive Research*). Menurut Usman (2009) penelitian deskriptif bermaksud membuat pemerian (penyandaraan) secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu.

Deskriptif berarti bersifat menggambarkan atau melukiskan sesuatu hal dalam arti sebenarnya (harfiah) dapat berupa gambar-gambar atau foto-foto yang didapat dari data lapangan atau peneliti menjelaskan hasil penelitian dengan gambar-gambar dan dapat pula berarti menjelaskannya dengan kata-kata. Pelaku atau responden yang menjadi objek dan subjek penelitian, kegiatan atau kejadian yang diteliti, dan konteks (lingkungan) tempat penelitian dilakukan dilaporkan dengan cara deskriptif sehingga pembaca memahami dengan baik laporan hasil penelitiannya (Marzuki, 2003).

3. Subyek Penelitian

Subjek penelitian adalah individu, benda, atau organisme yang dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian. Istilah lain yang digunakan untuk menyebut subjek penelitian adalah responden, yaitu orang yang memberi respon atas suatu perlakuan yang diberikan kepadanya.

Dikalangan peneliti kualitatif, istilah responden atau subjek penelitian disebut dengan informan, yaitu orang yang member informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakannya (Wiwik Sundari, 2008).

4. Sumber Data

Sumber data ada dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Dimana data primer menurut Marzuki (1991) adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya dan dicatat untuk pertama kalinya. Data primer ini dapat diperoleh langsung dari pencatatan hasil observasi, wawancara dan partisipasi aktif (dikutip dari Haryanto, 2007).

Sementara itu, data sekunder menurut Hayanto (2007) adalah data yang telah diolah oleh pihak lain atau data yang diperoleh secara tidak langsung, melainkan berasal dari orang kedua. Data sekunder diperoleh melalui pencatatan data dari bahan bacaan dan instansi yang terkait (dikutip dari Adianshari, 2012).

5.

T

Teknik Pengambilan Data

Dalam penelitian ini peneliti memilih wawancara dan Observasi sebagai teknik pengambilan datanya. Wawancara merupakan proses komunikasi yang sangat menentukan dalam proses penelitian. Dengan wawancara data yang diperoleh akan lebih mendalam, karena mampu menggali pemikiran atau pendapat secara detail. Oleh karena itu dalam pelaksanaan wawancara diperlukan ketrampilan dari seorang peneliti dalam berkomunikasi dengan responden. Seorang peneliti harus memiliki ketrampilan dalam mewawancarai, motivasi yang tinggi, dan rasa aman, artinya tidak ragu dan takut dalam menyampaikan wawancara (Surakhmad, 1994).

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang diselidiki. Agar observasi yang dilakukan oleh peneliti memperoleh hasil yang maksimal, maka perlu dilengkapi format atau blangko pengamatan sebagai instrumen. Dalam pelaksanaan observasi, peneliti bukan hanya sekedar mencatat, tetapi juga harus mengadakan pertimbangan kemudian mengadakan penilaian ke dalam suatu skala bertingkat.

Seorang peneliti harus melatih dirinya untuk melakukan pengamatan. Banyak yang dapat kita amati di dunia sekitar kita dimanapun kita berada. Hasil pengamatan dari masing-masing individu akan berbeda, disinilah diperlukan sikap kepekaan calon peneliti tentang realitas diamati. Boleh jadi menurut orang lain realitas yang kita amati, tidak memiliki nilai dalam kegiatan penelitian, akan tetapi menurut kita hal tersebut adalah masalah yang perlu diteliti (Usman, 2009).

C.Hasil dan Analisis

Terdapat dua kelompok program dalam Dinas Sosial Kota Malang, yaitu:

1. PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) adalah sumber daya penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta sumber pendanaan.⁸ PSKS sebagai penyelenggara kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, penguatan sosial, dan perlindungan sosial dan diklat setiap anggota masyarakat dalam upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.⁹ Program PSKS telah diakui sebagai gerak dasar

⁸ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 pasal 32, dan 33 tentang sumber daya penyelenggaraan kesejahteraan sosial: a. sumber daya manusia, b. sarana dan prasarana, c.sumber pendanaan, dimana sumber daya manusia sesuai dengan penjelasan pasal 33 adalah: a. tenaga kesejahteraan sosial, b. pekerja sosial profesional, c. relawan sosial, dan d. penyuluh sosial serta pasal 36 tentang sumber pendanaan "A. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, B. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, C. Sumbangan Masyarakat, d. dana yang disisihkan dari badan usaha sebagai kewajiban dan tanggungjawab sosial dan lingkungan; e. bantuan asing sesuai dengan kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undang; serta f. sumber pedanaan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁹ Peraturan Mneteri Sosial RI Nomor 77/ HUK/2010.

pembangunan bidang kesejahteraan sosial. Adapun yang termasuk dalam kelompok ini antara lain, PDS, PSM, WKSBM, ORSOS, PSM, TKS, DU-UKS, WPKS, Karang Werda, Karang Taruna, PSBR, PRS, PS, PSAA.¹⁰

2. PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) adalah seseorang keluarga atau kelompok masyarakat yang karena sesuatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara mamadai dan wajar.¹¹ Ada 22 item yang menjadi sasaran kegiatan kesejahteraan sosial di Kota Malang, antara lain: anak balita terlantar, anak terlantar, wanita rawan sosial ekonomi, anak nakal, anak jalanan, korban tindak kekerasan, lanjut usia terlantar, penyandang cacat, tuna susila, pengemis, gelandangan, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, korban penyalahgunaan NAPZA, keluarga fakir miskin, keluarga berumah tidak layak huni, keluarga bermasalah sosial psikologis, komunitas adat terpencil, korban bencana alam, korban bencana social, pekerja migran terlantar/ bermasalah sosial, orang dengan HIV/ AIDS (ODHA), Keluarga rentan.¹²

Kedua jenis program ini menjadi dasar bagi proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program jaminan kesejahteraan sosial. Akan tetapi, untuk memperoleh data yang valid dan akurat maka diperlukan metodologi dan instrumen yang benar-benar mampu mengukur jenis PMKS berdasarkan konsep dan indikatornya.¹³ Karena masalah kesejahteraan sosial akan selalu terjadi

¹⁰Sabardi, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Malang.

¹¹Salinan Perda Kota Malang Pasal 16 Ayat 1 Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tata kerja Dinas Daerah.

¹²Dinsos Kota Malang

¹³ Isbandi Rukminto Adi. 2008. Intervensi Komunitas “Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat. Penerbit Jakarta Rajawali.

di manapun dan kapanpun, sehingga diperlukan penanganan yang holistik dari mulai perencanaan sampai pelaksanaan kegiatan.¹⁴

Dalam mensinergikan pembangunan kesejahteraan sosial untuk mendukung peningkatan pengelolaan program jaminan kesejahteraan sosial, peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM kesejahteraan sosial, maka Dinas Sosial Kota Malang dalam pelaksanaan program jaminan kesejahteraan sosial juga mengacu pada 5 program prioritas kesejahteraan sosial yang di selenggarakan oleh Provinsi, diantaranya: penyantunan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat, bimbingan sosial dan keterampilan gelandangan pengemis, koordinasi permasalahan rehabilitasi sosial, pendampingan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, penyantunan dan bantuan terhadap Wanita Tunasusila (WTS) yang di anggarkan langsung oleh Pemerintah Pusat.¹⁵

Karena informasi yang di sampaikan oleh aparat Dinas Sosial masih dalam pola teori dan konseptual maka penulis memberanikan diri untuk bertanya, mengenai implementasi secara nyata dilapangan oleh Dinas Sosial Kota Malang sendiri dalam penyelenggaraan jaminan kesejahteraan sosial, dan aparat Dinas Sosialpun menjawab dengan jawaban yang begitu mengagetkan, dimana selama terbentuknya Dinas Sosial Kota Malang, baru sekali mengadakan pelatihan dan bimbingan terhadap 1 item yang termasuk dalam kategori PMKS yaitu Bimbingan Sosial dan keterampilan Gelandangan Pengemis dan waria di Hotel Olnino Kota Malang, dengan alasannya kepada penulis, bahwa 1 item saja Dinas Sosial sudah kapok apalagi 22 item “ujarnya”.

Kemudian dalam pendataan masyarakat yang masuk dalam kategori PMKS (penyandang masalah kesejahteraan sosial) dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan kemudian di sampaikan ke

¹⁴Isbandi Rukminto adi, 2005.Ilmue Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial.Depok Fisip UI Pers.

¹⁵ Dinas Sosial Kota Malang

BPS.¹⁶BPS akan mengolah data dari Dinas Sosial Kota Malang. Data yang nantinya akan di pakai menjadi acuan Pemerintah dalam menentukan kategori PMKS ialah data yang sudah diolah oleh BPS bukan data langsung dari Dinas Sosial, karena secara fungsional Dinas Sosial hanya formalitas sebagai pelaksana pendataan.¹⁷

Dalam melaksanakan program jaminan kesejahteraan sosial, Dinas Sosial Kota Malang tidak didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, itu terlihat dari Konversi kantor Badan Narkotika Malang yang kemudian dialih fungsikan menjadi kantor Dinas Sosial Kota Malang pada 1 Januari 2013. Kemudian belum adanya website Dinas, dengan alasan karena Dinas Sosial Kota Malang adalah Dinas yang baru, jadi belum ada anggaran yang cukup untuk membuat website Pemerintahan, serta belum adanya teknisi perihal spesialisasi masalah teknologi dan informasi.¹⁸

Padahal website Pemerintah Daerah untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat luas serta menjadi alat komunikasi yang paling cepat, tepat, efektif dan efisien.¹⁹

¹⁶Badan Pusat Statistik sebagai lembaga pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang kegiatan statistik serta koordinasi dan memfasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi Pemerintah di bidang kegiatan statistic. Info BPS.go.id

¹⁷Sabardi Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Malang.

¹⁸ Dinas Sosial Kota Malang

¹⁹Juga sebagai sistem jaringan informasi yang terpadu bagi pemerintahan daerah, dengan aplikasi berbasis teknologi informasi internet, untuk menunjang peningkatan pembangunan daerah dalam menjalankan fungsinya untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat daerahnya (UU Nomor 14 Tahun 2008).

D. Penutup

1. Kesimpulan

Kesejahteraan Sosial adalah kondisi dimana terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Oleh karena itu, dari berbagai permasalahan kesejahteraan sosial di atas, maka tantangan ke depan bagi pembangunan bidang kesejahteraan sosial adalah bagaimana meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS. Hal ini dapat diantisipasi dengan cara mendukung peningkatan pengelolaan program kesejahteraan sosial, peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM kesejahteraan sosial, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik, yang bersinergi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

2.Saran

Untuk mengoptimalkan program-program dari Dinas Sosial tersebut, perlu adanya peran aktif masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial. dengan demikian, Pemerintah harus memfasilitasi berbagai kebijakan dan program untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam bentuk pelatihan berupa wadah-wadah partisipasi bagi masyarakat, serta sarana penunjang kegiatannya.

Daftar Pustaka

Buku

- Adi, Rukminto Isbandi 2003, *Pemberdayaan, pengembangan masyarakat dan Intervensi komunitas*, FE-UI, Jakarta
- Adi,Isbandi Rukminto 2005, *Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Fisip UI Pers, Jakarta
- Adi, Rukminto Isbandi 2008, *Intervensi Komunitas “Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat”*, Rajawali, Jakarta
- Kuncoro, Mudrajad 2004, *Otonomi dan Pembangunan Daerah (Reformasi, Perencanaan, dan Peluang)*. Erlangga, Jakarta
- Mardiasmo 2004, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. ANDI, Yogyakarta
- Marzuki2003, *Metodelogi Riset*, BPFE.UII, Yogyakarta
- Nasikun 2003, *Sistem Sosial Indonesia*, PT. Rajawali Press, Jakarta
- Pusat Pengembangan Ketahanan Sosial Masyarakat (PPKSM), (2004). *Bimbingan Sosial TKSM Model Peningkatan Ketahanan Sosial Masyarakat (Replikasi)*, Depsos RI, Jakarta
- Salahudin 2012, *Korupsi Demokrasi dan Pembangunan Daerah*, Lembaga Anti Korupsi Pro Otonomi Daerah Bima, Dompu, Sumbawa (LAPINDA BIDOS) NTB Bekerjasama dengan Buku Litera, Yogyakarta

Suharto, Edi 2010, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik (Social Policy as Public Policy)*, Alfabeta,-.

Sundari, Wiwik, 2008, *Metode dan Analisis Data*. UNDIP Institutional Repository

W, Surakhmad1994, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar*, Tarsito, Bandung

Peraturan

Salinan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 pasal 16 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Malang.

Internet

Adianshari, 2012, '*Pengaruh Nilai-nilai Sosial Terhadap Estabilitas Pembangunan.*', diakses pada 11 Juni 2012 <<http://Adianshari.blogspot.com/2012/01/pengertian-penelitian-kualitatif.html>>.

Musianto S, Lukas, 2009, '*Perbedaan Pendekatan Kuantitatif dengan Pendekatan Kualitatif dalam Metode Penelitian.*', diakses pada 11 Juni 2012 <<http://penelitianstudikasesus.blogspot.com/2009/03/pengertian-penelitian-kualitatif.html>>.

Salinan UU No 11 Tahun 2009 pasal 1 dan 2, diakses pada 30 Maret 2013, <<http://www.kemsos.go.id>>

PROGRAM RUMAH SUSUN DAN RUMAH MURAH SOLUSI MENANGANI PEMUKIMAN KUMUH DAN PADAT PENDUDUK DI KOTA MALANG

Oleh:
Alif Sixnory Pratama¹

Abstraksi

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji berbagai program yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dalam mengatasi permasalahan pemukiman padat penduduk dan kumuh, serta untuk mengetahui model kolaborasi hubungan antara Pemerintah pusat dan pemerintah Daerah Dinas Pekerjaan Umum. Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini mencoba menggambarkan kebijakan-kebijakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada pada pemukiman padat penduduk dan kumuh di Kota Malang, karena permasalahan yang sering kita jumpai pada kota-kota yang padat akan penduduknya terletak pada pemukiman yang mereka tempati.

Kata kunci: Kolaborasi hubungan pusat dan daerah Dinas Pekerjaan Umum, masalah Pemukiman padat penduduk dan kumuh, serta program Rumah Susun dan Rumah Murah.

A. Latar Belakang

Pemukiman yang layak dan persoalan kemiskinan di kota Malang merupakan masalah yang serius. Jika kedua masalah tersebut tidak ditangani dengan baik dikhawatirkan menyebabkan terbentuknya daerah miskin yang akan berdampak pada lahirnya berbagai persoalan

¹ Revita Dwi Cahyani Laut Vianty, Mohammad Sayid Karim, dan Nehru Prayogo

sosial di luar kontrol atau kemampuan Pemerintah Kota untuk menangani dan mengawasinya. Terdapat sebanyak 10 kawasan pemukiman kumuh di kota Malang, atau yang disebut juga sebagai *slum area* yang sering dipandang potensial menimbulkan banyak masalah perkotaan karena sumber terjadinya perilaku menyimpang, seperti kejahatan, dan penyakit sosial lainnya. Sepuluh kawasan tersebut adalah Kampung Keramik Dinoyo, Summersari, Kotalama, Jodipan, Ciptomulyo, Kebalen, Embong Brantas, Betek, Kampung Industri Saniter Klaseman, dan Kampung Industri Tempe Sanan.

Beragam upaya dan program sedang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut, misalnya; program rumah susun dan rumah murah dan berbagai program lainnya dari Kementrian Perumahan Rakyat (Mempera) yang di telah disosialisasikan kedaerah melewati Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Timur. Program tersebut selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Malang. Pemerintah Daerah harus cermat dan tepat dalam memilih program dari pusat, karena tidak setiap daerah memiliki kemampuan untuk menerapkan program dari pusat.

Dinas Pekerjaan Umum Kota Malang telah mengambil rumah susun dan rumah murah sebagai program dari pusat yang akan mereka realisasikan dalam mengatasi permasalahan pemukiman padat penduduk dan kumuh di kota Malang. Akan tetapi, program tersebut masih belum dimaksimalkan oleh Pemerintah Kota Malang karena sulitnya mencari lahan untuk pembangunan rumah susun dan juga rumah murah. Tidak hanya itu, masih banyak dijumpai permukiman masyarakat miskin hampir di setiap sudut kota yang disertai dengan ketidaktertiban dalam hidup bermasyarakat di perkotaan. Sosialisasi saja dirasa tidak cukup untuk mengatasi permasalahan yang ada. Sebagai contoh, pendirian rumah maupun kios dagang secara liar di lahan-lahan pinggir rel kereta api maupun di pinggir sungai Dinoyo.

Dapat dijelaskan bahwa bukanlah kemauan mereka untuk menjadi sumber masalah bagi kota namun karena faktor-faktor

ketidakberdayaanlah yang membuat mereka terpaksa menjadi ancaman bagi eksistensi kota yang mensejahterahkan. Keluhan yang paling sering disampaikan mengenai permukiman masyarakat miskin tersebut adalah rendahnya kualitas lingkungan yang dianggap sebagai bagian kota yang mesti disingkirkan². Masyarakat miskin di perkotaan terbilang unik dengan berbagai problematika sosialnya sehingga perlu mengupas akar masalah dan merumuskan solusi terbaik bagi kesejahteraan mereka. Karena itulah penelitian ini penting untuk membahas tentang pemukiman kumuh dan upaya untuk mengatasinya di kota Malang. Lokus yang kami pilih adalah pada Dinas Pekerjaan Umum kota Malang.

Argumen yang dikembangkan dalam bahasan kami adalah pemukiman padat penduduk dan kumuh/*slum area* sering dipandang potensial menimbulkan banyak masalah perkotaan, karena merupakan sumber timbulnya berbagai permasalahan sosial. Dalam hal ini Pemerintah Kota Malang khususnya Dinas Pekerjaan Umum harus lebih memprioritaskan masalah pemukiman padat penduduk dan kumuh dalam penyusunan program tiap tahunnya. Selain pengadaan program rumah susun pemeritah juga harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak menghuni lahan yang seharusnya steril dari pemukiman seperti daerah aliran sungai yang sering dipakai oleh masyarakat yang kebanyakan ditempati oleh masyarakat daerah luar malang.

Pemerintah kota sebenarnya sudah memiliki Strategi Pembangunan Pemukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) yang sudah lama direncanakan oleh pemerintah kota Malang dari tahun 2009. Strategi tersebut juga didukung Dinas Pekerjaan Umum yang memiliki konsep pembangunan rusun yang memiliki kesamaan dengan

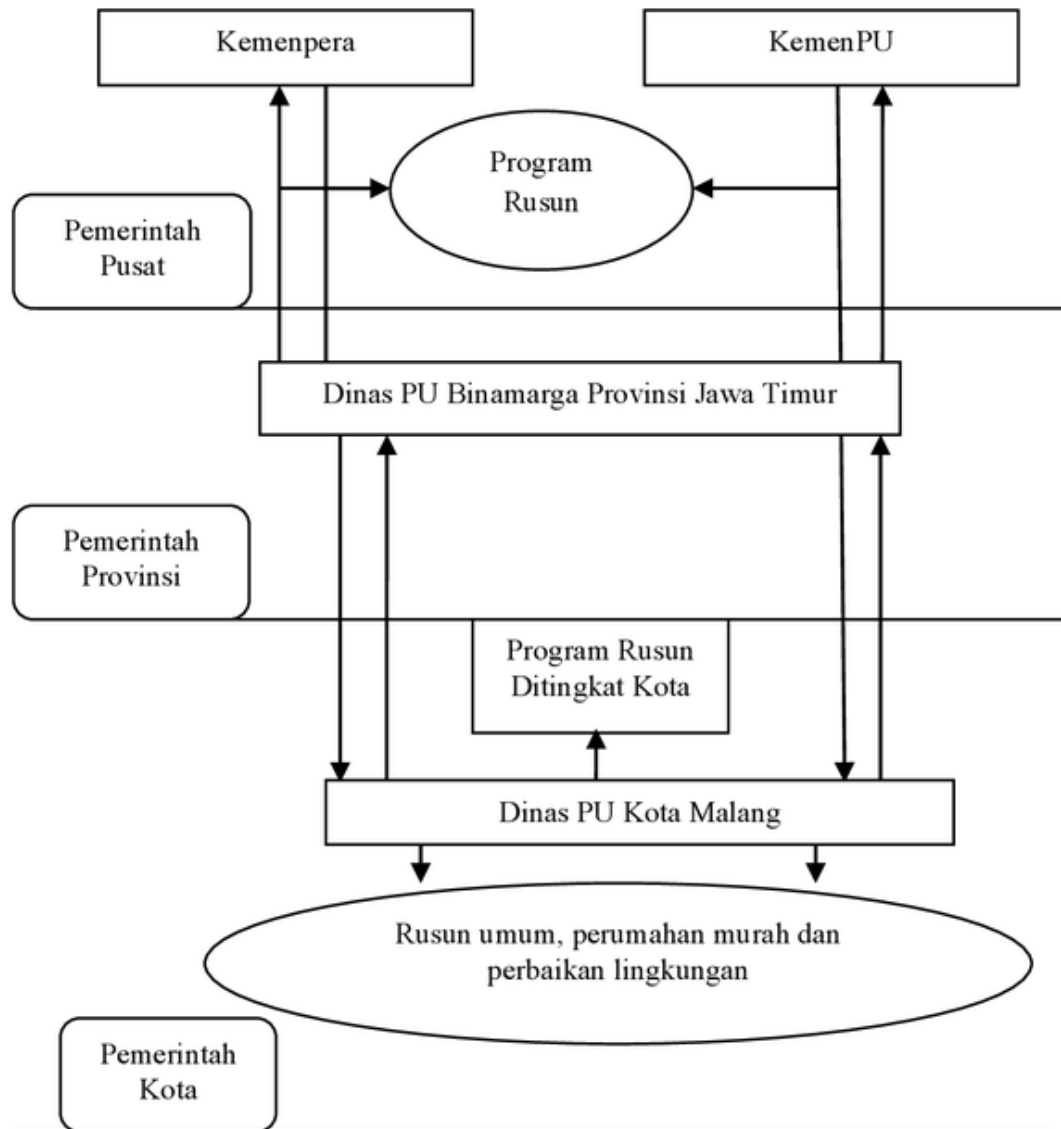
² Lingkungan hidup yang layak harus bejarak minimal 20 meter dari bibir sungai dan rel kereta api. Hal ini masih seting dijumpai dikarenakan masyarakat tidak mempunyai pilihan lain untuk mendapat tempat hidup yank layak.

program Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jatim dan juga Kemenpera. Pengajuan rusun pun sudah dilayangkan kepada Kementerian Perumahan Rakyat (Menpera), Menpera pun sudah mengalokasikan khusus pembuatan rusun. Akan tetapi, sosialisasi kepada masyarakat yang tinggal di pemukiman padat penduduk dan kumuh mengenai program ini belum begitu ditanggapi oleh masyarakat. Karena jika program ini dijalankan maka masyarakat yang tinggal di pemukiman padat penduduk akan dipindah ke rumah susun yang berdurasi 5-10 tahun.

Sebagian besar masyarakat memilih tinggal ditempat yang mereka huni sekarang, meskipun banyak dari mereka yang tidak memiliki izin untuk tinggal dan mendirikan bangunan disana. Dinas Pekerjaan Umum sendiri juga tidak bisa dengan leluasa mengusir area pemukiman ilegal tersebut. Jika masyarakat dilibatkan, persoalan mengenai permukiman kumuh dapat segera diselesaikan.

Dari penerapan analisa situasi tersebut, maka dibangun kerangka berfikir yang mengaitkan Menpera dengan program rusun yang diturunkan ke tingkat Provinsi Jatim dan Kota Malang, sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka Berfikir



Sumber: Data Diolah

B. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif yang sangat berguna sebagai sumber data yang langsung melalui pengkajian deskriptif penelitian yang akan dilakukan. Sumber data diperoleh dari hasil turun lapang dalam studi kasus yang menjadi konsep penelitian. Melalui penelitian ini juga di harapkan mampu melihat secara mendasar apa yang menjadi permasalahan utama pemukiman kumuh dan padat penduduk di Kota Malang.

2. Teknik Pengambilan Data

- Observasi
- Wawancara
- Dokumentasi

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan yaitu data sekunder dari literatur artikel dan data.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kota Malang, yang beralamat di Jl. Bingkil No. 1 Malang.

5. Analisa Data

Proses yang dilalui dari sebuah pencarian data dan sekaligus menyusun data dengan sistematis melalui data-data yang diperoleh, dengan penggabungan data menjadi sebuah kategori yang dapat dipelajari secara langsung, sekaligus penjabaran dari data dan sebuah kesimpulan agar mudah untuk di pahami oleh pembaca.

C. Hasil dan Analisa

Hubungan dari Pemerintah Pusat menuju Pemerintah Daerah yakni provinsi dan kota / kabupaten, Kemenpera(Kementrian

Perumahan Rakyat) telah membuat beberapa program untuk mengatasi permasalahan pemukiman kumuh yang akan disosialisasikan ke Pemerintahan tingkat Kota/Kabupaten melalui Pemerintah Provinsi. Namun tidak semua program bisa direalisasikan oleh Pemerintah Daerah karena setiap program dari Kemenpera memiliki persyaratan yang tidak semua daerah bisa memenuhinya. Pemerintah Daerah memilih program yang dirasa sangat dibutuhkan di daerah dan mendukung dari program di daerah itu sendiri. Untuk mengatasi permasalahan pemukiman penduduk di Kota Malang, Pemerintah Kota dan Dinas Pekerjaan Umum telah merealisasikan beberapa program yang diadakan oleh Pemerintah Pusat yakni Kemenpera dan Kementrian Pekerjaan Umum untuk mengatasi pemukiman kumuh dan padat penduduk. Beberapa program tersebut adalah pembangunan rumah susun, perumahan murah khusus MBR (masyarakat berpenghasilan rendah), PSU (prasarana sarana umum), pembangunan jalan, pavingisasi jalan, IPAL atau fasilitas pendukung lainnya.

Pembangunan rumah susun merupakan program untuk mengatasi permukiman padat penduduk dan kumuh. Pembangunan rusun ada 2 jalur yaitu jalur pertama, dimana Kemenpera membantu untuk membangun kawasan perumahan khusus tetapi lebih kepada instansi-instansi seperti perumahan khusus tentara untuk Angkatan Darat di Rampal, rusun untuk mahasiswa seperti pembangunan rusunawa di Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Negeri Malang dan Universtas Brawijaya. Sedangkan jalur yang kedua dari Kemen PU hanya membangun 1 rumah susun saja yang berada di daerah Mburing.

Dinas Pekerjaan Umum Kota Malang berencana akan melakukan pembangunan rumah susun tahap II di daerah Mburing tahun depan dan bertepatan pada bulan Agustus. Pembangunan rumah susun tersebut merupakan tawaran Program dari KemenPU yang diterima oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Malang. Selain itu, Dinas Pekerjaan Umum daerah juga mengusulkan beberapa program prioritas

kepada provinsi, selanjutnya tugas provinsi menampung semua usulan-usulan dari beberapa program dari daerah-daerah dan selanjutnya usulan program-program tersebut akan diajukan kepada pemerintah pusat yang kemudian akan di survei oleh Pemerintah Pusat untuk menyetujui dan membiayai program tersebut. Persyaratan yang diberikan oleh pusat ke daerah dalam pembangunan rumah susun adalah daerah harus menyediakan lahan kosong yang akan dibangun untuk rumah susun, selanjutnya jika persyaratan semua sudah lengkap baru pihak dari satuan kerja provinsi akan melakukan survei dan kemudian melaporkan kepada pemerintah pusat dan selanjutnya akan disetujui oleh pemerintah pusat.

Setelah rumah susun dibangun nantinya akan diprioritaskan untuk orang-orang yang dianggap kurang mampu atau orang-orang yang berpenghasilan rendah dan yang menempati daerah disekitar pemukiman kumuh (pinggir-pinggir sungai). Penempatan rumah susun hanya bersifat sementara, dalam batas waktu maksimal penempatannya 6 tahun. Hal tersebut karena rumah susun dihuni secara bergantian.

Proses sosialisasi perlu dilakukan Pemerintah Kota kepada masyarakat yang tinggal di pemukiman padat penduduk agar mau pindah ke rumah susun yang telah dibangun dan disediakan untuk mereka. Dinas Pekerjaan Umum membuat beberapa usulan yang diminta oleh masyarakat kepada pemerintah pusat, tetapi pemerintah pusat hanya menyetujui satu usulan saja yang menjadi prioritas kebutuhan masyarakat yaitu pembangunan rumah susun untuk warga yang menempati kawasan pemukiman kumuh yang dianggap tidak layak untuk dihuni karena lingkungannya yang berdekatan dengan sungai dimana itu juga akan mengancam kesehatan dan keselamatan warga yang menempati lahan tersebut. Dana yang di pakai oleh Dinas Pekerjaan Umum dalam pembangunan rusun adalah dana dari APBD kota, dimana dana itu dipakai untuk membangun rumah susun yang terletak di jalan Mburing.

Sementara itu, pembangunan rusun yang kedua akan segera dilaksanakan pada bulan Agustus. Pembangunan rumah susun di daerah, pemerintah daerah hanya menyediakan lahan untuk tempat didirikannya rumah susun tersebut kemudian pemerintah pusatlah yang akan menyediakan dana untuk pembangunannya. Program bantuan dari pemerintah pusat yang kedua yaitu rumah murah yang terletak di daerah Madyopuro. Pemerintah memberikan rumah bersubsidi di tersebut seharga 88 juta rupiah dengan tipe rumah 36, bantuan lainnya antara lain ialah berupa PSU, tempat pembuangan sampah dan air bersih. Program ini juga salah satu opsi dari pemerintah daerah untuk mengatasi permasalahan pemukiman kumuh dan padat penduduk di Kota Malang.

Realisasi program rusun dan rumah murah dari Pemerintah Kota dan Dinas Pekerjaan Umum Kota Malang mengalami beberapa kesulitan, diantaranya adalah masalah sosialisasi yang terkadang mengalami perdebatan dengan masyarakat kurang setuju untuk pindah dari lahan yang mereka tempati ke rumah susun. Hal tersebut karena kebanyakan dari mereka sudah cukup tinggal di tempat tersebut. Walaupun masyarakat yang tinggal dipemukiman padat penduduk dan kumuh kebanyakan adalah ilegal, namun Dinas Pekerjaan Umum Kota Malang tidak bisa melakukan penggusuran lahan. Dimana lahan didaerah sungai brantas merupakan daerah yang mulanya kosong namun warga mendirikan bangunan tanpa seijin Pemerintah Kota. Banyaknya birokrasi *on the street* yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu membuat warga bisa mendirikan bangunan didaerah yang sebenarnya harus steril dari bangunan atau pun penduduk.

Masalah tersebut menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Malang telah kecolongan dengan berdirinya bangunan ilegal dipemukiman penduduk di daerah yang seharusnya tidak dihuni oleh masyarakat tetapi masih dipaksakan untuk dihuni karena mereka tidak mempunyai lahan untuk mendirikan rumah. Dinas Pekerjaan Umum sendiri telah melakukan sosialisasi terhadap masyarakat yang tinggal di pemukiman

padat penduduk agar mau pindah dan tinggal di rusun. Namun dengan rencana dari Dinas Pekerjaan Umum yang akan membuat rumah susun tersebut hanya bisa ditinggali oleh masyarakat dengan durasi 6 tahun karena bersifat bergantian, tetapi masyarakat banyak yang menolak dan lebih memilih untuk tinggal di tempat yang mereka huni selama ini. Pihak Pemerintah dan Dinas Pekerjaan Umum Kota Malang sebenarnya bisa melakukan penggusuran kepada pemukiman padat penduduk dan kumuh yang kebanyakan berstatus ilegal, namun Pemerintah Kota dan Dinas Pekerjaan Umum lebih memilih untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat di pemukiman padat penduduk dan kumuh untuk menghindari terjadinya konflik antara masyarakat dengan Pemerintah Kota Malang.

Dinas Pekerjaan Umum mengaku bahwa beralih fungsinya lahan kosong terutama di daerah aliran sungai menjadi pemukiman penduduk sulit untuk di bendung, karena pembangunan pemukiman yang cepat oleh penduduk membuat pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Pemerintah Kota Malang kesulitan dalam mengatur pemukiman tersebut. Pembangunan pelengsengan yang telah dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Malang di daerah aliran sungai malah menjadi area pemukiman baru yang ilegal oleh masyarakat yang kebanyakan berasal dari luar daerah Malang. Seperti daerah aliran sungai di daerah MT Haryono Dinoyo, sejak dibangunnya pelengsengan oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum Kota Malang area tersebut lama-kelamaan menjadi area pemukiman padat penduduk. Hal ini dinilai oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum Kota Malang sebagai suatu hal yang salah, karena akan menimbulkan masalah baru yang harus diselesaikan oleh pihak Pemerintah Kota beserta Dinas yang terkait.

Kurang tegasnya Pemerintah Kota Malang juga menjadi penyebab terbentuknya area pemukiman padat penduduk dan kumuh di Kota Malang, terutama di daerah aliran sungai dan juga pinggiran rel kereta api. Seharusnya masalah ini bisa dicegah atau diminimalisir. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa jumlah penduduk di Kota Malang

tidak hanya berasal dari Kota Malang, melainkan juga berasal dari daerah-daerah lainnya. Banyaknya masyarakat yang berasal dari luar Kota Malang yang mengadu nasib di kota ini membuat mereka harus tinggal di Kota Malang.

Beberapa alternatif yang ditempuh oleh orang-orang dari luar Malang adalah dengan membuat rumah di Malang secara sah, tinggal bersama saudara, tinggal di kos-kosan atau kontrakan, atau membuat rumah ilegal di area lahan kosong pinggir sungai. Alternatif yang terakhir ini lah yang menjadi permasalahan baru bagi pemerintah Kota Malang. Seperti di daerah aliran sungai MT Haryono Dinoyo, kebanyakan warga yang tinggal disana adalah para pendatang yang ingin bekerja di Kota Malang. Daya tarik Kota ini lah yang bisa memberikan manfaat namun juga tidak pernah luput dari permasalahan pemukiman padat penduduk dan kumuh.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Pemukiman kumuh dan padat penduduk di Kota Malang memang menjadi masalah yang perlu di perhatikan dan diselesaikan oleh pemerintah daerah demi kenyamanan masyarakat di daerahnya sendiri. Selain demi kenyamanan untuk masyarakatnya, penyelesaian masalah pemukiman padat penduduk juga berdampak pada kemajuan daerahnya. Berbagai masalah pun muncul karena lambatnya birokrasi pemerintahan kita dalam menangani masalah tersebut. Bantuan dari pemerintah pusat juga sangat dibutuhkan oleh pemerintah daerah untuk mensukseskan program-program yang telah dibuat oleh pemerintah daerah. Ketegasan pemerintah kota Malang dalam menertibkan pemukiman padat penduduk dan kumuh juga harus ditingkatkan, pemerintah juga harus mengawal lebih baik lagi lahan-lahan di daerah aliran sungai agar tidak dihuni oleh masyarakat yang nantinya akan menjadi pemukiman padat penduduk dan kumuh yang baru.

2. Saran

Permasalahan pemukiman kumuh dan padat penduduk di kota-kota besar, termasuk Kota Malang merupakan masalah klasik perkotaan, sehingga untuk mengatasinya perlu adanya sosialisasi dan pelaksanaan peraturan yang ada secara konsisten. Selain itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut pemerintah daerah dapat bekerjasama dengan pemerintah pusat untuk membangun rumah susun atau rumah murah.

DAFTAR PUSTAKA

Sukarelawati, E 2012, "SPPIP" Pemkot Malang Prioritaskan Kawasan Kumuh', *Antara News Jawa Timur*, 29 November, diakses pada 23 Mei 2013 <<http://www.antarajatim.com/lihat/berita/99859/sppip-pemkot-malang-prioritaskan-kawasan-kumuh>>

_____, 2009 'Dua Rusun Direncanakan Dibangun di Dua Titik DAS Brantas', *Malang Raya*, 1 Juli, diakses pada 20 Mei 2013 <<http://malangraya.web.id/2009/07/01/dua-rusun-direncanakan-dibangun-di-dua-titik-das-brantas/>>

_____, 2009 'Bappeda Identifikasi Kawasan Untuk Rumah Susun', *Malang Raya*, 1 Juli, diakses pada 19 Mei 2013 <<http://malangraya.web.id/2009/07/01/bappeda-identifikasi-kawasan-untuk-rumah-susun/>>

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN GRATIS DALAM SKEMA BOS DI KOTA MALANG

Oleh:
Arief Setiawan¹

Abstraksi

Essay ini di buat berdasarkan hasil penelitian atau studi lapangan yang dilakukan oleh penulis di Dinas Pendidikan Kota Malang. Melalui essay ini, diharapkan dapat menggambarkan bagaimana kerjasama pemerintah Pusat-Daerah dalam implemetasi kebijakan untuk pendidikan gratis dalam skema program BOS di kota Malang. Tetapi realitas yang ada pada tataran implementasi nya tidak sesuai dengan peraturan atau sistem penyelenggaraan BOS yang berlaku, seperti adanya penyalahgunaan dana BOS, adanya pungutan liar dan manipulasi data siswa oleh pihak sekolah yang nantinya akan merugikan pihak orangtua selaku wali murid yang di bebaskan.

Metode dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif dimana jenis penelitiannya adalah penelitian deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara lengkap mengenai realitas yang terjadi dalam implementasi program BOS tersebut. Data diambil berdasarkan dua sumber, yaitu data primer berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi, dan data sekunder berupa membaca literatur-liiteratur yang terkait, seperti peraturan perundangan-undangan dan berbagai macam literatur lainnya.

Berdasarkan metode yang digunakan, hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa implementasi Program BOS ini masih sangat buruk karena perbuatan dari beberapa pihak sekolah yang tidak mengikuti

¹Daryanto Prakoso, Arman Rahman Nampira, Nana Yuniarti, Andi Rahman

peraturan perundang-undangan dalam implementasi program BOS yang berlaku sehingga menyebabkan banyak pengaduan-pengaduan masyarakat bahwa masih mahal biaya sekolah dan akhirnya banyak siswa-putus sekolah karena hal tersebut, melihat indikator implementasi BOS ini hanya sebatas dilakukan secara teknis saja tetapi pada implementasinya masih belum berjalan dengan baik. Maka dari itu sangat dibutuhkan kerjasama kelembagaan khususnya antara pemerintah Pusat-Daerah dalam mengawasi jalannya pelaksanaan BOS tersebut.

Kata Kunci: BOS, Kerjasama Kelembagaan, Implementasi BOS

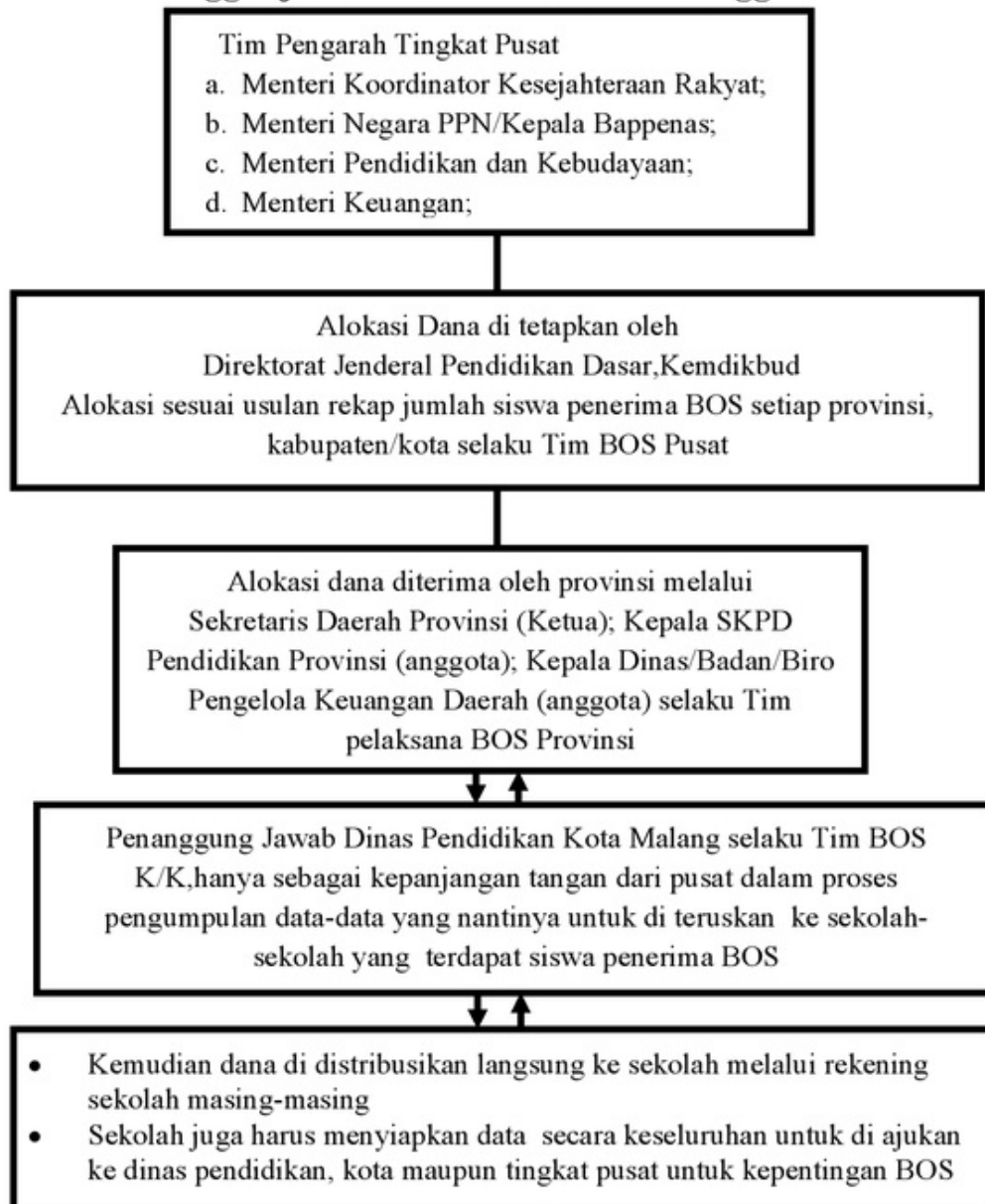
A. Latar Belakang

Pada zaman modern pendidikan merupakan salah satu bentuk meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia agar tidak tertinggal dengan bangsa lain. Unsur penting guna mewujudkan tujuan tersebut adalah kebijakan pendidikan. Dalam hal ini, pemerintah telah mengimplementasikan kebijakan pendidikan gratis dengan program wajib belajar sembilan tahun untuk warga negara Indonesia.

Akan tetapi, mewujudkan pendidikan yang aksesibel untuk seluruh lapisan masyarakat juga membutuhkan dana yang tidak sedikit. Oleh karena itu, di butuhkan peran Pemerintah Pusat dan Daerah untuk mendukung terwujudnya urusan wajib ini dengan berbagai program yang telah dirumuskan oleh pemerintah diantaranya; program BOS. Dasar hukum pengadaan program BOS diantaranya yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 Tentang Petunjuk teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana BOS Tahun Anggaran 2013, Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan.

Substansi dari jenis dan kebijakan pendidikan gratis seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab Negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) serta satuan pendidikan lain yang sederajat. Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Adapun distribusi pendanaan BOS sebagaimana ditunjukkan bagan berikut:

**Gambar 1. Alur distribusi Dana pendidikan gratis/BOS Pusat
sesuai Permendikbud No 76 tentang Juknis Penggunaan dan
Pertanggungjawaban dan BOS Tahun Anggaran 2013**



Sumber: Permendikbud No 76 tentang Juknis penggunaan dan pertanggungjawaban BOS Tahun Anggaran 2013

Dalam program kebijakan pendidikan gratis ini, untuk konteks Kota Malang. Pembiayaan berasal dari negara, sebesar 20 % dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan dibantu oleh Pemerintah Daerah Kota Malang yang disebut dengan BOSDA yang termaktub dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat 1 yang berbunyi "Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di tahun 2011". Mengingat bahwa performa Kota Malang baru saja mendapatkan penghargaan otonomi *award* di bidang layanan pendidikan. Penghargaan itu diperoleh lantaran layanan pendidikan di Kota Malang memiliki unsur 4M, yakni mudah, murah, mutu, dan merata. Menanggapi hal tersebut, sejumlah LSM di Kota Malang justru menilai penghargaan tersebut tak layak diberikan pada Kota Pendidikan.

Kota Malang masih sangat kacau akibat maraknya pungutan liar (pungli), sehingga menimbulkan banyak pengaduan dari masyarakat. Pada tahun 2011 saja terdapat 25 jenis pengaduan, dan tahun 2012 ada 52 jenis pengaduan. Namun Dinas Pendidikan seolah tidak menindaklanjuti persoalan ini. Bahkan berdasarkan data BPS tahun 2012, sekitar 3.000 anak di Kota Malang putus sekolah (*beritajatim.com*). berdasarkan fakta di atas, masih banyak keluhan tentang adanya pungli di sekolah-sekolah yang secara tidak langsung malah membebani siswa dan orang tua selaku wali murid. Padahal seharusnya, dengan adanya program pendidikan gratis ini lebih meringankan beban biaya pendidikan bagi warga di kota Malang khususnya warga miskin atau tidak mampu. Disinilah akhirnya dibutuhkan peran Pemerintah dalam menjalankan program pendidikan gratis tersebut ke arah yang lebih baik dengan pengalokasian dana

yang tepat sasaran tanpa ada unsur apapun untuk mewujudkan ikon Kota Malang sebagai Kota pendidikan.

Hipotesis dari penelitian ini setelah didasarkan dari fenomena adalah program pendidikan gratis dalam skema program BOS ternyata belum di selenggarakan dengan baik dikarenakan masih banyaknya pengaduan dari masyarakat dan banyaknya angka putus sekolah di Kota Malang dan juga banyaknya pungli di sekolah-sekolah yang seharusnya sudah teralokasikan melalui dana BOS. Maka dari itu perlu adanya penekanan-penekanan pada sistem yang harus diperhatikan dimana setelah mengetahui letak dimana permasalahan dalam program BOS di Kota Malang harus diawasi agar dalam implementasinya tidak ada indikasi hal yang tidak di inginkan. Berdasarkan pemaparan dalam latar belakang, maka dikuatkan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kerjasama kelembagaan Pemerintah Pusat-Daerah dalam implementasi kebijakan pendidikan gratis dalam skema program BOS?
2. Bagaimana implementasi kebijakan pendidikan gratis dalam skema program BOS?

B. Metode Penelitian

Di dalam melakukan penelitian diperlukan metode penelitian yang disesuaikan dengan pokok permasalahan yang akan diteliti, untuk mendapatkan data dan informasi dalam mendukung penulisan ini. Untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi secara jelas baik arah maupun ruang lingkupnya adalah menentukan langkah-langkah yang perlu diambil, yaitu dengan metode penelitian kualitatif, karena dengan cara ini obyek penelitian dapat diungkapkan secara rasional dan sistematis.

1. Jenis Penelitian deskriptif/Institusional

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana jenis penelitiannya adalah penelitian deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara lengkap mengenai realitas yang

terjadi dalam implementasi program BOS tersebut. Metode penelitian kualitatif dengan maksud berusaha untuk memberikan gambaran keadaan obyek atau permasalahan dan alternatif dalam penyelesaian masalah yang akhirnya akan membuat kesimpulan atau generalisasi. Gambaran tersebut dielaborasi dengan teori-teori yang memadai agar diperoleh analisis kritis sekaligus analisis kebijakan yang harus dilakukan oleh pihak pembuat kebijakan yang seilmiah mungkin tanpa bermaksud mengklaim ini sebagai kebenaran tunggal.

2. Teknik Pengambilan Data

Menurut Irawan Soehartono, teknik pengambilan data ialah upaya khusus yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data yang menunjang penelitiannya, yang beberapa cara dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

i. Observasi

Observasi ialah kegiatan pengamatan tanpa harus mengajukan pertanyaan untuk mendapatkan data-data yang terukur dan diketahui langsung.

ii. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan jalan mengadakan komunikasi dengan sumber data. Komunikasi tersebut dilakukan dengan dialog (tanya-jawab) secara lisan, baik langsung maupun tidak langsung. Wawancara merupakan suatu proses pengambilan data yang benar-benar riil karena kita langsung mendapatkan informasi langsung dari orang yang hendak kita wawancarai khususnya disini wawancara terkait program BOS di Kota Malang.

iii. Dokumentasi

Merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subyek penelitian. Dokumen yang diteliti dapat berupa berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi.

3. Sumber Data

i. Data Primer

Data primer adalah dokumen yang didapatkan langsung dari obyek penelitian atau yang secara langsung mengalami peristiwa yang akan diteliti. Sumber data primer memiliki kekuatan karena diperoleh secara langsung oleh narasumber sehingga keakuratan datanya bisa terjamin.

ii. Data Sekunder

Data sekunder biasanya digunakan sebagai pendukung data primer atau lebih melengkapi data penelitian. Data sekunder bisa didapatkan dari buku-buku ilmiah, dokumen-dokumen resmi, koran, internet atau sumber-sumber lain yang kira-kira bisa memberikan penjelasan tambahan mengenai penelitian yang dilakukan.

C. Hasil dan Analisis

Seperti yang sudah di jelaskan di atas bahwa dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pada pasal 34 ayat (2) menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat (3) menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSNAS) bagi SD/MI/SDLB dan SMP/MTs./SMPLB di Kota Malang sendiridimaksudkan untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar. Selain itu, program BOSNAS ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Malang dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan kepada masyarakat, yang pada gilirannya akan meningkatkan peran serta masyarakat khususnya dalam pengawasan program dan pendanaan pendidikan. Hal ini sejalan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008.

Tetapi pada realitanya masih jauh dari harapan, dimana dalam proses perencanaan tidak sesuai dengan proses pelaksanaan di lapangan. Hal ini karena disebabkan oleh berbagai faktor, sebagaimana yang di lansir oleh *beritajatim.com* dimana Kota Malang masih sangat kacau akibat maraknya pungutan liar (pungli). Sehingga menimbulkan banyak pengaduan dari masyarakat. Pada tahun 2011 saja terdapat 25 jenis pengaduan, dan tahun 2012 ada 52 jenis pengaduan. Namun, Dinas Pendidikan seolah tidak menindaklanjuti persoalan ini. Bahkan berdasarkan data BPS tahun 2012, sekitar 3.000 anak di Kota Malang putus sekolah. Begitu pula dengan indikasi terjadinya penyalahgunaan dana BOS dan manipulasi data siswa yang dapat terjadi karena kurangnya sistem kerjasama pengawasan dari Kemendikbud dan Dinas Pendidikan sendiri.

Penulis beranggapan bahwa indikator suatu program dapat dikatakan sukses apabila dalam implementasi teknis dan pelaksanaan program tersebut berjalan dengan baik, tetapi disini penulis melihat bahwa program BOS yang sudah dijalankan di Kota Malang sudah dijalankan dengan baik secara teknis saja sedangkan dalam pelaksanaan programnya masih belum sesuai dengan harapan melihat masih banyaknya permasalahan yang sudah dijelaskan di atas.

Dari sinilah kemudian penulis beranggapan bahwa harus adanya sikap intensif dari berbagai SKPD yang terkait untuk meminimalisir terjadinya kecurangan dari pihak-pihak sekolah dengan berbagai cara yaitu:

- Pemantauan
Untuk mengarahkan, mengendalikan, dan menilai penyelenggaraan program Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) bagi SD/MI/SDLB dan SMP/MTs/ SMPLB di Kota Malang, maka diperlukan pemantauan dan penilaian yang terpadu, intensif dan berkelanjutan.
- Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat

Inspektorat Pemerintah Kota Malang, Dinas Pendidikan Kota Malang, Pengawas Sekolah dan masyarakat melakukan kerjasama dalam pengawasan terhadap pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) bagi SD/MI/SDLB dan SMP/MTs./ SMPLB Kota Malang, mulai dari pelaksanaan dan penggunaan dana BOSDA yang benar sesuai ketentuan yang berlaku. Pengaduan masyarakat dapat dilakukan melalui mekanisme yang berlaku.

- **Pelaporan**

Laporan kegiatan dan realisasi keuangan penyelenggaraan program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSNAS) bagi SD/MI/SDLB dan SMP/MTs./ SMPLB Kota Malang dilakukan oleh setiap sekolah penerima bantuan setiap akhir tri bulan didasarkan pada laporan kegiatan. Laporan ini merupakan bagian dari bukti fisik pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah dilaksanakan dan dilaporkan ke Kemendikbud.

Dengan adanya cara seperti diatas, diharapkan agar dalam implementasinya sekolah-sekolah di Kota Malang lebih transparan dan menjalankan mekanisme BOSDA sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya pemungutan liar, dan penyalahgunaan dana BOSDA yang tidak diinginkan.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Melihat penjelasan di atas dapat di simpulkan secara umum oleh penulis bahwa indikator suatu program dapat dikatakan sukses apabila dalam implementasi teknis dan pelaksanaan program tersebut berjalan dengan baik, tetapi disini penulis melihat bahwa untuk program BOS yang sudah dijalankan di Kota Malang tersebut sudah dijalankan dengan baik secara teknis saja sedangkan dalam program

pelaksanaannya masih belum sesuai dengan harapan melihat masih banyaknya permasalahan yang ada.

Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Secara khusus program BOS bertujuan untuk: 1. Membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT (Terbuka) negeri terhadap biaya operasi sekolah, kecuali pada rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) dan sekolah bertaraf internasional (SBI). Sumbangan/pungutan bagi sekolah RSBI dan SBI harus tetap mempertimbangkan fungsi pendidikan sebagai kegiatan nirlaba, sehingga sumbangan/pungutan tidak boleh berlebih; 2. Membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta; 3. Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah.

2. Saran

Untuk realisasi program BOS maka di butuhkan lembaga yang terkait sehingga dapat menempatkan posisinya dalam setiap program yang jalankan sesuai tupoksi yang benar, khususnya dalam pelaksanaan program BOS dimana telah dibagi atas 3 tim manajemen yang setiap tim mempunyai tupoksi yang berbeda tetapi saling terkait satu dengan yang lain.

Sementara itu, untuk mengantisipasi kecurangan yang terjadi di tingkat sekolah maka harus adapengawasan yang intensif dari semua pihak terhadap pelaksanaan BOS agar tidak terjadi hal-hal yang nantinya akan merugikan siswa ataupun orang tua selaku wali murid.

Daftar Pustaka

- D. Panca, -, "2012-12-22konsekuensi-pendidikan-gratis", diakses pada 24 Maret 2013 <<http://Panca.D/2012/12/22/konsekuensi-pendidikan-gratis>>
- Hadi, Lalu Sirajul, -, "*Efek Samping Pendidikan Gratis?*", diakses pada 21 Maret 2013 <<http://www.pelita.or.id/baca.php?id=73020>>
- _____, "*Masalah tentang Pendidikan Kota Malang*", diakses pada 15 Juni 2013 <<http://Malang-beritajatim.com>>
- _____, "*Menggugat Pendidikan Gratis*", diakses pada 20 Maret 2013 pukul <<http://vgsiahaya.wordpress.com/artikel/menggugat-pendidikan-gratis/>>
- _____, "*Masalah Pendidikan Indonesia*", diakses pada 24 Maret 2013 <<http://Lalusirajul.blogspot.com/2012/11/masalah-pendidikanindonesia.html>>.
- _____, "*Dana BOS menurut Kemendikbud*", diakses pada 23 Mei 2013 <[http://mapj-makassar.blogspot.com/2013/03/dana-bos-menurut kemdikbud](http://mapj-makassar.blogspot.com/2013/03/dana-bos-menurut-kemdikbud)>.

PENANGGULANGAN KEMISKINAN DENGAN SPP PNPM MANDIRI PEDESAAN

Oleh :
Arista Safitri¹

Abstraksi

PNPM Mandiri merupakan program dari Pemerintah Pusat, sehingga dalam pelaksanaannya di daerah membutuhkan bantuan dari Pemerintah Daerah guna proses kelancaran program tersebut. Selama ini BPM telah berperan aktif dalam mensukseskan program SPP, baik sebagai koordinator, fasilitator maupun konsultan.

Suksesnya program SPP tidak hanya merupakan tanggung jawab dari Pemerintah Pusat dan Daerah saja. Pada program SPP, masyarakat tidak hanya sebatas dijadikan pelaksana semata, namun jauh dari itu, masyarakat dijadikan sebagai eksekutor dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis merumuskan masalah yaitu: (1) Bagaimana peran serta dari Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) dalam mensukseskan program SPP ? (2) Faktor pendukung dan penghambat pada pelaksanaan peranan BPM dalam program SPP PNPM Md.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang berusaha memberikan gambaran sekaligus menerangkan fenomena-fenomena yang ada sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dari keadaan yang ada di masyarakat pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya sesuai dengan permasalahan yang ada. Penelitian ini nantinya akan mendeskripsikan peranan Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM)

¹Achmad Sardi Hidayat, Hartono dan Ida Warti

Kab. Malang dalam mensukseskan program Simpan Pinjam Perempuan (SPP).

Pola hubungan antara Pemerintah Daerah (BPM) dengan Pemerintah Pusat (Kementerian) hanyalah sebatas koordinasi. Selain berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, BPM juga berkoordinasi dengan Dinas Cipta Karya selaku PJOKab P2KP (PNPM Mandiri Perkotaan). Permasalahan yang sering muncul dalam PNPMd untuk program SPP adalah keterlambatan pengembalian pinjaman oleh anggota maupun ketua kelompok yang melebihi jangka waktu yang sudah ditetapkan yaitu 10 bulan.

Dari hasil pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam mensukseskan program SPP hanyalah sebatas koordinasi.

Kata Kunci: Peran, BPM, PNPM MPd, SPP, Pemberdayaan Perempuan

A. Latar Belakang

Permasalahan kemiskinan di Indonesia sudah sangat mendesak untuk ditangani. Khususnya di wilayah pedesaan, salah satu ciri umum dari kondisi fisik masyarakat miskin adalah tidak memiliki akses ke prasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai dengan kualitas perumahan dan pemukiman yang jauh di bawah standar kelayakan, serta mata pencaharian yang tidak menentu.

Untuk menangani masalah tersebut, pada tahun 2007 Pemerintah membuat program yang bernama PNPM(Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Mandiri, yang salah satunya adalah PNPM Mandiri Perdesaan (PNPM MPd). PNPM MPd adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Latar belakang adanya PNPM MPd merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang

selama ini dinilai berhasil². Ada beberapa prinsip pokok PNPM MPd yang membedakannya dengan program-program penanggulangan kemiskinan yang lain³.

Dasar hukum pelaksanaan PNPM Mandiri mengacu pada landasan konstitusional UUD 1945 beserta amandemennya, landasan idiil Pancasila, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta landasan khusus pelaksanaan PNPM Mandiri yang akan disusun kemudian. Peraturan perundang-undangan khususnya terkait sistem pemerintahan, perencanaan, keuangan negara, dan kebijakan penanggulangan kemiskinan adalah sebagai berikut:

Dasar peraturan perundangan sistem pemerintahan yang digunakan adalah:

- a) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintah Desa.
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan.
- d) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan⁴.

Terdapat beberapa usulan kegiatan yang dilaksanakan pada PNPM MPd yaitu pembangunan sarana untuk masyarakat, Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) untuk membuka atau

² www.pnpm-mandiri.org

³Desentralisasi: Kewenangan pengelolaan kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah atau masyarakat, sesuai dengan kapasitasnya.

Otonomi: Masyarakat diberi kewenangan secara mandiri untuk berpartisipasi dalam menentukan dan mengelola kegiatan pembangunan secara swakelola.

Kesetaraan dan Keadilan Gender: Laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahap pembangunan dan dalam menikmati secara adil manfaat kegiatan pembangunan tersebut.

⁴www.menkokesra.go.id

mengembangkan usaha, peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan dilaksanakannya pengembangan keterampilan masyarakat, pelayanan dalam bidang kesehatan dan pendidikan⁵.

Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan berada di bawah binaan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Departemen/Kementrian Dalam Negeri. Program ini didukung dengan pembiayaan yang bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), partisipasi dari CSR (*Corporante Social Responcibility*) dan dari dana hibah serta pinjaman dari sejumlah lembaga dan negara pemberi bantuan dibawah koordinasi Bank Dunia⁶.

PNPM Mandiri merupakan program dari Pemerintah Pusat, sehingga dalam pelaksanaannya di Daerah Pemerintah Pusat membutuhkan bantuan dari Pemerintah Daerah guna proses kelancaran program tersebut. Salah satu SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) yang membantu menjalankan program ini adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM).

BPM sebagai SKPD pelaksana program SPP mempunyai fungsi yaitu:

- Merumuskan kebijaksanaan teknis dalam lingkup pemberdayaan masyarakat desa.
- Melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pemberdayaan masyarakat desa dalam Kab. Malang.
- Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Daerah.

Dalam hal melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pemberdayaan masyarakat desa, posisi dari BPM adalah sebagai konsultan. Konsultan akan membantu Desa/Lembaga untuk menyusun program yang sesuai dengan PTO. Lolos tidaknya

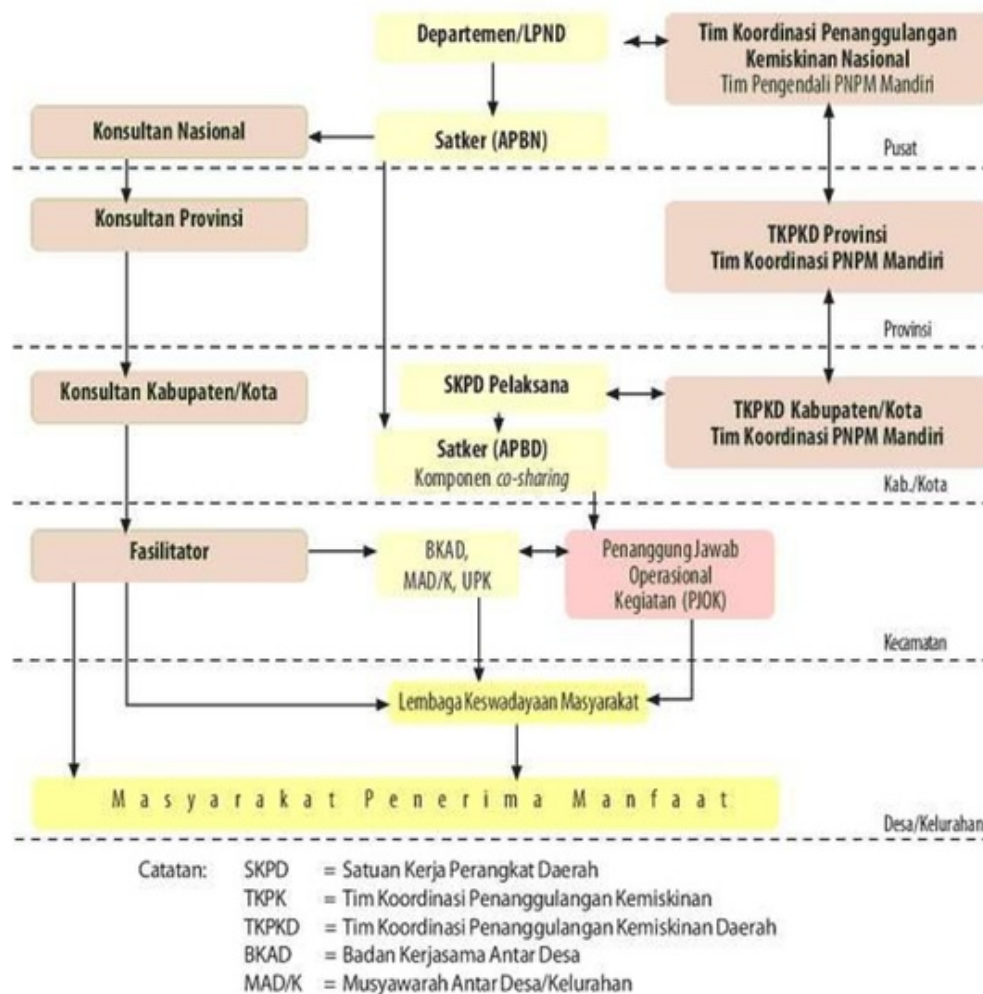
⁵ www.pnpmperdesaan.or.id

⁶ www.pnpm-perdesaan.or.id

program yang diajukan oleh desa kepada kecamatan sedikit banyak dipengaruhi oleh konsultan.

Di bawah ini adalah alur PNPM MPd dari Pemerintah Pusat sampai Daerah. Dalam bagan tersebut akan diketahui posisi BPM sebagai SKPD pelaksana dan juga sebagai konsultan.

Gambar 1. Alur PNPM Mandiri Pedesaan⁷



S

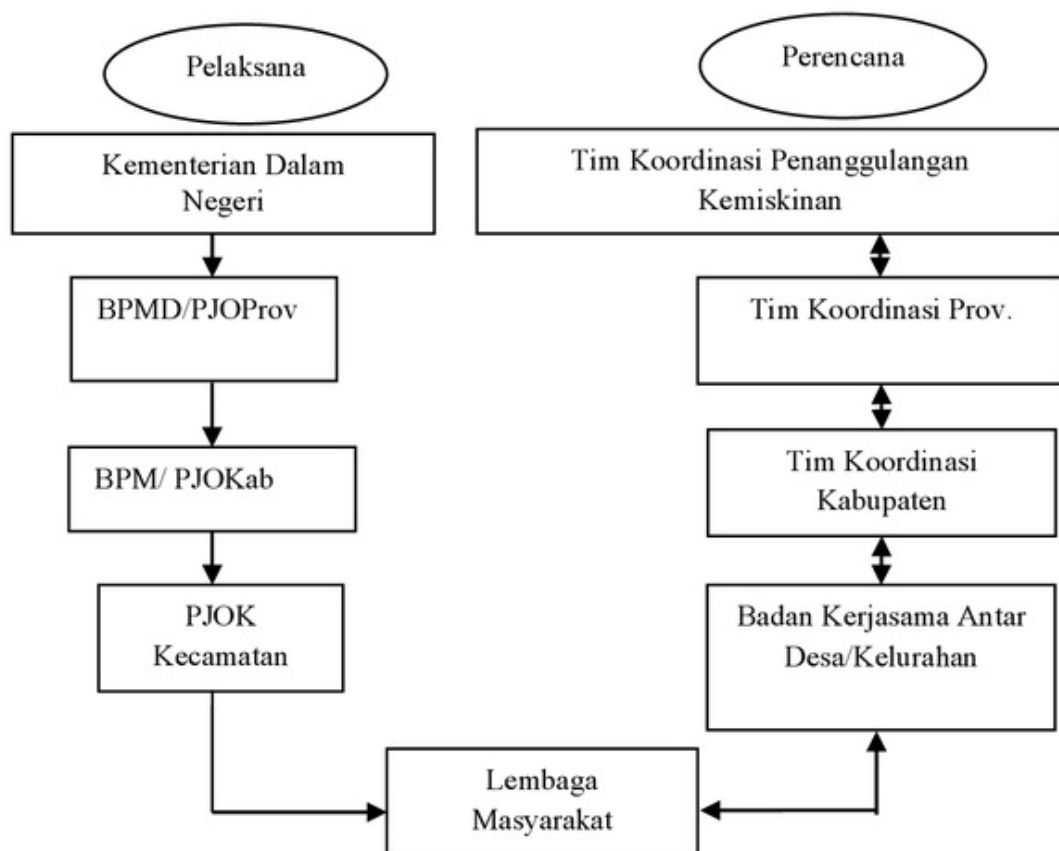
umber: www.pnpm-pedesaan.or.id

⁷www.pnpm-perdesaan.or.id

Suksesnya program SPP tidak hanya merupakan tanggung jawab dari Pemerintah Pusat dan Daerah saja. Pada program SPP, masyarakat tidak hanya sebatas dijadikan pelaksana semata, namun jauh dari itu, masyarakat dijadikan sebagai eksekutor dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan.

Berikut adalah bagan alur koordinasi perencanaan dan pelaksanaan dari pusat sampai ke daerah, dan peranan lembaga penerima dana dalam melakukan perencanaan.

Gambar 2. Alur Koordinasi PNPM Md



Sumber : Data diolah

Pada sisi penerima manfaat, agar pinjaman yang diterima bermanfaat secara efektif bagi pengembangan kegiatan ekonomi (perempuan) dan yang terkait, serta lancar kinerja pengembaliannya,

maka perlu dikuatkan landasannya. Untuk itu, perlu penguatan organisasi kelompok dan kebiasaan menabung. Untuk melakukan penguatan maka BPM berperan untuk melakukan penyuluhan pada tingkat desa, hal ini dapat dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan SKPD-SKPD lain.

Dari pemaparan tersebut, maka penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran serta dari Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) dalam mensukseskan program SPP ?
2. Faktor pendukung dan penghambat pada pelaksanaan peranan BPM dalam program SPP PNPM Md?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang berusaha memberikan gambaran sekaligus menerangkan fenomena-fenomena yang ada sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dari keadaan yang ada di masyarakat pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya sesuai dengan permasalahan yang ada. Penelitian ini nantinya akan mendeskripsikan peranan Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kab. Malang dalam mensukseskan program Simpan Pinjam Perempuan (SPP).

Teknik Pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari narasumber penelitian. Dalam memperoleh data primer penulis sengaja menentukan orang-orang yang memberikan informasi dengan pertimbangan narasumber yang dipilih tersebut berkualitas dan benar-benar sesuai dengan kenyataan dalam memberikan informasi yang dibutuhkan. Wawancara semi struktur akan digunakan sebagai panduan untuk mengeksplorasi informasi mendalam tanpa keluar dari pertanyaan penelitian

yang sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Dengan mewawancarai responden yang relevan, konfirmasi dan informasi mengenai data dan fakta bisa dieksplorasi secara komprehensif. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pemberdayaan masyarakat Kabupaten Malang.

2. Data Sekunder

a) Hukum dan Peraturan Pemerintah.

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintah Desa.
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan⁸.

b) Laporan Pemerintah tentang isu terkait.

c) Artikel maupun jurnal tentang PNPM Mandiri.

3. Analisa Data

Menurut Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (1989, dalam Sutinah, 2010: 104) Analisis data adalah suatu proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilakukan di Badan Pemberdayaan Masyarakat Kab. Malang Jl. Panji No 119 Kepanjen Tlp : 0341-399755.

C. Hasil dan Analisa

Dari hasil penelitian tentang peranan BPM dalam program PNPM Md khususnya dalam bidang SPP diketahui bahwa peranan BPM dalam SPP adalah sebagai PJOKabupaten, koordinator, fasilitator dan konsultan. Dalam melakukan koordinasi dengan Kecamatan PJOKab. dibantu oleh PJOKecamatan.

⁸ Pedoman Umum PNPM Mandiri 2007

“BPM selaku satker (satuan kerja) yaitu mengkoordinasikan program ini (PNPM MPd) di Kab. Malang” P. Sunantri (PJOKab)

Dalam PNPM Mandiri Pedesaan, seluruh anggota masyarakat diajak terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pemanfaatan dana sesuai kebutuhan paling prioritas di desa. Cara menetapkan kebutuhan prioritas dengan cara meranking usulan-usulan proposal dari masing-masing kelompok oleh Kepala Desa dan Aparat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dibantu oleh petugas Fasilitator Kecamatan dan PJOKab yang ditugaskan di Kecamatan sampai pada pelaksanaan kegiatan dan keberlanjutannya. Perankingan dilakukan dengan mengurutkan usulan proposal, urutan didasarkan pada kebutuhan dana yang diperlukan.

Program PNPM MPd perlu melibatkan perempuan melalui pemberdayaan dengan pemanfaatan sumberdaya yang ada di Desa. Pemberdayaan perempuan miskin bertujuan agar perempuan secara aktif mampu berpartisipasi dalam setiap kegiatan pengentasan kemiskinan. Perempuan pedesaan banyak yang hanya melakukan pekerjaan rumah tangga saja, sekalipun bekerja itu pun tidak cukup menghasilkan banyak uang. Selama ini perempuan pedesaan terpinggirkan dalam menjangkau sumberdaya. Tujuan dari keterlibatan perempuan adalah memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan penciptaan lapangan kerja.

Dalam pelaksanaan PNPM MPd, pemerintah menerapkan sistem kompetisi. Desa atau lembaga sebagai penerima dana diharuskan untuk berkompetisi di tingkat Kecamatan untuk memperebutkan program. Disisi lain pemerintah juga menerapkan suatu kebijakan lain yaitu berupa pergiliran dana, dimana setiap kelompok yang sudah mendapat dana, maka untuk tahun selanjutnya tidak akan akan

mendapat dana lagi. Hal ini dilakukan supaya timbul kesadaran dari anggota kelompok untuk mengembalikan pinjaman tepat pada waktunya. Jika anggota dapat mengembalkan pinjaman tepat waktu maka perputaran uang yang ada dilembaga akan terus berjalan, dan anggota-anggota lain juga akan dapat melakukan pinjaman. Sehingga tujuan dari adanya SPP itu sendiri akan tercapai, yaitu memberikan kesempatan kepada perempuan untuk memenuhi kebutuhan dasar ekonomi. Walaupun menggunakan konsep persaingan tetapi pemerintah tetap membuat suatu kebijakan yang mengakibatkan pemerataan untuk setiap desa.

“PNPM merupakan program yang berbasis di Kecamatan, jadi yang mendapatkan program itu Kecamatan bukan Desa, disalurkan ke Desa melalui kompetisi” P. Sunantri (PJOKab)

Sebagai salah satu program yang berkarakteristik sebagai program pemberdayaan masyarakat, segala kegiatan yang tercakup di dalam program PNPM-Mandiri Perdesaan seharusnya lebih terfokus pada kegiatan yang berasal dari perencanaan *bottom up*. Dalam konteks tersebut, kelompok sasaranlah yang seharusnya melakukan perencanaan tentang apa yang dilakukan dengan bantuan pendampingan fasilitator dan pembinaan dari birokrasi setempat melalui wadah musyawarah yang diselenggarakan oleh KPMD. Peranan BPM dalam hal ini adalah sebagai konsultan. Peran konsultan ditujukan untuk penguatan atau peningkatan kapasitas masyarakat dan Pemerintah lokal dalam mengelola pembangunan secara mandiri di wilayah.

Peranan BPM dalam SPP tidak hanya sebatas sebagai konsultan, tetapi BPM juga bekerjasama dengan SKPD terkait untuk melakukan pelatihan bagi perempuan penerima pinjaman. Hal ini dilakukan agar perputaran uang dapat terus berjalan, dan akan semakin banyak perempuan yang mendapatkan pinjaman. Besarnya uang yang dapat dipinjamkan tergantung dari besarnya perputaran uang Pemberdayaan perempuan miskin dilakukan melalui upaya peningkatan

keterampilan kegiatan pertanian, peternakan, keterampilan sederhana pengelolaan hasil pertanian, peternakan dan upaya pemasaran. Dalam hal ini BPM bekerjasama dengan Dinas Koperasi. Tujuan utama kegiatan pemberdayaan ini untuk meningkatkan pendapatan perempuan miskin dengan memanfaatkan sumberdaya secara optimal. Salah satu keluaran yang ingin dicapai dengan adanya program PNPM Md adalah terwujudnya peningkatan keterlibatan Rumah Tangga Miskin (RTM).

Berdasarkan salah satu prinsip PNPM MPd yaitu desentralisasi⁹, maka perempuan perdesaan dapat mengelola sendiri perputaran uang. Usulan kegiatan simpan pinjam bagi Kelompok Perempuan (SPP) ditetapkan oleh musyawarah desa khusus perempuan. Alokasi dana kegiatan SPP ini maksimal 25% dari BLM Kecamatan. Tidak ada batasan alokasi maksimal per-desa namun harus mempertimbangkan hasil verifikasi kelayakan kelompok.

Pola hubungan antara Pemerintah Daerah (BPM) dengan Pemerintah Pusat (Kementerian) dalam program SPP hanyalah sebatas koordinasi. Tim koordinasi Kabupaten¹⁰ nantinya juga akan mendapatkan pembinaan teknis dan administratif dari Tim Pengendali PNPM MPd. Selain berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi, BPM juga berkoordinasi dengan Dinas Cipta Karya selaku PJOKab P2KP (PNPM Mandiri Perkotaan). Koordinasi antara BPM dan Dinas Cipta Karya dilakukan supaya tidak terjadi tumpang tindih dalam penyebaran program.

Permasalahan yang sering muncul dalam PNPM MPd untuk program SPP adalah keterlambatan pengembalian pinjaman oleh anggota maupun ketua kelompok yang melebihi jangka waktu yang sudah ditetapkan (jangka waktu pengembalian uang adalah 10 bulan).

⁹ Desentralisasi adalah memberikan yang lebih luas kepada masyarakat untuk mengelola kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan yang bersumber dari pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kapasitas masyarakat. (PTO PNPM MPd)

¹⁰ Tim Pengendali PNPM MPd didukung oleh Satuan Kerja PNPM MPd

Hal ini menyebabkan terhambatnya pelaksanaan kegiatan yang seharusnya dana sudah bergulir ke kelompok selanjutnya, tetapi masih terhambat di kelompok tersebut. Hal ini justru menyebabkan berkurangnya kesempatan desa untuk mendapatkan kembali program SPP untuk tahun berikutnya karena Pemerintah dalam hal ini BPM selaku satker (satuan kerja) membuat suatu kebijakan bahwa kesempatan suatu desa untuk mendapatkan kembali program yang sudah didapat tahun ini tergantung dari kesuksesan pelaksanaan program tahun ini termasuk salah satunya adalah jangka waktu pengembalian dana pinjaman yang tepat waktu.

Kendala lain yang sering di alami BPM sebagai pelaksana SPP adalah tidak patuhnya desa/lembaga pada PTO¹¹. Hal ini akan mengakibatkan tidak diterimanya usulan mereka di Kecamatan. Jika hal ini terjadi, desa/lembaga akan menyalahkan PJOKec. maupun PJOKab.

Ada beberapa kekurangan yang dilakukan BPM dalam menjalankan program SPP, salah satunya adalah pengawasan dari BPM yang hanya sebatas mengetahui bahwa uang terus berputar, tetapi tidak melakukan pengawasan penggunaan uang tersebut. Apakah uang tersebut sudah dapat memberdayakan perempuan atau belum.

Uang SPP yang dipinjam tidak selalu digunakan oleh peminjam itu sendiri (perempuan). Ada beberapa perempuan yang memberikan uang tersebut kepada suaminya untuk digunakan sebagai modal usaha. Padahal tujuan dari SPP adalah untuk memberdayakan perempuan supaya menjadi lebih mandiri. Tujuan dari adanya program SPP adalah memberikan penyaluran modal usaha bagi kelompok perempuan yang memiliki atau ingin memulai usaha, sebagai strategi pengentasan kemiskinan. Dalam hal ini seharusnya BPM dapat berperan aktif untuk melakukan pengarahan kepada pelaku SPP untuk dapat melakukan dan mengembangkan kegiatan bisnis yang menguntungkan.

¹¹ PTO digunakan oleh Desa/Lembaga maupun konsultan untuk menyusun program yang akan diajukan ke Kecamatan.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam program SPP hanyalah sebatas koordinasi. Hal ini terjadi karena dana PNPM MPd berasal dari 95% APBN dan 5% APBD untuk tahun anggaran 2013. Adanya pembinaan yang dilakukan oleh Tim Pengendali PNPM Mandiri kepada tim koordinasi di Kabupaten. Koordinasi tidak hanya dilakukan BPM dengan Pemerintah Pusat saja, tetapi BPM juga melakukan koordinasi dengan Dinas Cipta Karya selaku PJOKab P2KP (PNPM Mandiri Perkotaan).

Melalui mekanisme partisipatif, pelibatan masyarakat secara maksimal yang disertai dengan pendampingan yang baik dan pembinaan yang intensif, akan mendorong partisipasi untuk mewujudkan proses implementasi sebagai wadah belajar bagi masyarakat untuk menumbuhkan kapasitasnya sebagai objek maupun subjek dalam menentukan sendiri arah masa depan probadi maupun lembaga.

Permasalahan yang sering muncul dalam PNPM MPd untuk program SPP adalah keterlambatan pengembalian pinjaman oleh anggota maupun ketua kelompok yang melebihi jangka waktu yang sudah ditetapkan yaitu 10 bulan. Hal ini akan mengakibatkan perputaran uang tidak berjalan dengan lancar. Permasalahan lain yang sering dialami BPM sebagai pelaksana SPP adalah tidak patuhnya desa/lembaga pada PTO yang akan mengakibatkan gagalnya usulan mereka di Kecamatan.

2. Kesimpulan

Optimalisasi peranan dari BPM dapat dilakukan dengan meningkatkan kerjasama BPM dengan SKPD lain guna mempercepat pelaksanaan pengentasan kemiskinan. Kerjasama tersebut dapat berupa pelatihan, contohnya saja kerjasama dengan Dinas Koperasi dalam hal memberikan pelatihan kepada penerima dana SPP.

Daftar Pustaka

Badan Pemberdayaan Kabupaten Malang, diakses pada diakses pada 17 April 2013 <<http://bpm.malangkab.go.id>>

Hamid,Hendrawati,-. “Pembangunan Ekonomi Daerah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat”, Jurnal Ilmiah “Mangkau” IPDN, vol. 1, diakses pada 13 Juni 2013 <sulsel.ipdn.ac.id>

International Labour Organization, diakses pada 7 April 2013 <<http://www.ilo.org>>

Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, diakses pada 3 April 2013 <<http://www.menkokesra.go.id>>

Nawir, Ihsan Suciawan, “PNPM-Mandiri Perdesaan Dalam Implementasi Pemberdayaan Masyarakat”, Jurnal Ilmiah “Mangkau” IPDN, vol. 1, diakses pada 13 Juni 2013<sulsel.ipdn.ac.id>

PNPM Mandiri, diakses pada 3 April 2013 <<http://www.pnpm-mandiri.org>>

PNPM Mandiri Pedesaan,diakses pada 7 April 2013 <<http://www.pnpm-perdesaan.or.id>>

PNPM Mandiri Perkotaan, diakses pada 7 April 2013 <<http://www.p2kp.org>>

Sudjanab2001, *Metode Statistika*, Tarsito, Bandung.

Sulistiyani, A.T. 2004, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, Gaya Media, Yogyakarta.

Suyanto, Bagong & Sutinah 2010, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

The World Bank, diakses pada 8 April 2013
<<http://web.worldbank.org>>

ORIENTASI KEPENTINGAN DI BALIK PEMBANGUNAN TERMINAL HAMID RUSDI MALANG

Oleh:
Hendra Permadi¹

Abstraksi

Terminal Hamid Rusdi adalah relokasi dari Terminal Gadang. Pengadaan relokasi merupakan bagian dari pengaturan sistem transportasi di Kota Malang yang lebih komprehensif dengan tujuan dapat mewadahi dan memfasilitasi pergerakan transportasi angkutan umum di kota Malang terutama angkota, angkudes, bus dan MPU. Namun sungguh disayangkan, karena akses jalan menuju lokasi terminal yang dirasa cukup jauh dari jalan arteri kota Malang (Jl. Kolonel Sugiono) sehingga banyak angkutan umum (angkota, angkudes, MPU dan bus) yang kurang memanfaatkan kinerja Terminal. Hal ini menjadikan fungsi operasional Terminal Hamid Rusdi kurang maksimal seperti yang diharapkan.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Dari data hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja operasional Terminal Hamid Rusdi kurang maksimal. Dari hasil survey dan wawancara menunjukkan pergerakan angkutan umum yang masuk ke dalam (transit) Terminal Hamid Rusdi sangat sedikit. Hal ini berbanding signifikan dengan pergerakan angkutan umum yang melakukan transit di luar Terminal Hamid Rusdi. Selain itu, data hasil wawancara menunjukkan banyak pengguna angkutan umum yang

¹ Septian Rosman Arief, Ivan Taufikur Rohman, Anyke Putri Regiana dan Fazri Muhamad Sengaji

enggan memasuki Terminal Hamid Rusdi dan lebih memilih melakukan transit di terminal bayangan (sekitar perempatan Gadang). Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti, lokasi terminal yang terlalu jauh dari akses jalan utama (Jl. Kolonel Sugiono), akses jalan menuju terminal yang selalu macet karena keberadaan pasar Gadang dan aktifitasnya sehingga dinilai kurang efisien serta kurang adanya pengawasan petugas terminal terhadap pergerakan angkutan umum di luar Terminal Hamid Rusdi.

Kata Kunci : Pengaturan sistem transportasi, Kinerja operasional, Pergerakan angkutan

A. Latar Belakang

Dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi dan pemanfaatan dana pembangunan, maka dikeluarkan SK Menteri Negara PPN Nasional/Ketua BPPN No Kep. 195/Ket/12/1996 yang disempurnakan menjadi SK Menteri Negara PPN/ Kep.Bapennas No. Kep 102/K/04/1999 tentang Evaluasi Kinerja Proyek Pembangunan. Ketentuan tersebut mengatur bagaimana hasil, manfaat, dan dampak dari proyek pembangunan yang telah direncanakan mencapai sasaran, akan tetapi pada realitasnya pemerintah terlalu memaksakan adanya pembangunan tanpa memperhatikan kebutuhan masyarakatnya, sehingga dampak dari pembangunan tidak mengenai pada sasaran yang diharapkan².

Misalnya di negara kita, di Indonesia terdapat 400-an terminal angkutan umum dan angkutan kota, namun 10% dari 400 terminal tersebut “mangkrak” tidak terpakai³. Salah satu contohnya adalah relokasi Terminal Hamid Rusdi Kota Malang, relokasi terminal ini menghabiskan dana APBD Rp. 59 miliar lebih pada tahun 2009. Akan

²Hal ini juga disampaikan oleh Kementrian Perhubungan Sudirman Lambali di Jakarta, Selasa (25/1)

³ Hendra Gunwan, Tribunnews, Jakarta (25 januari 2011)

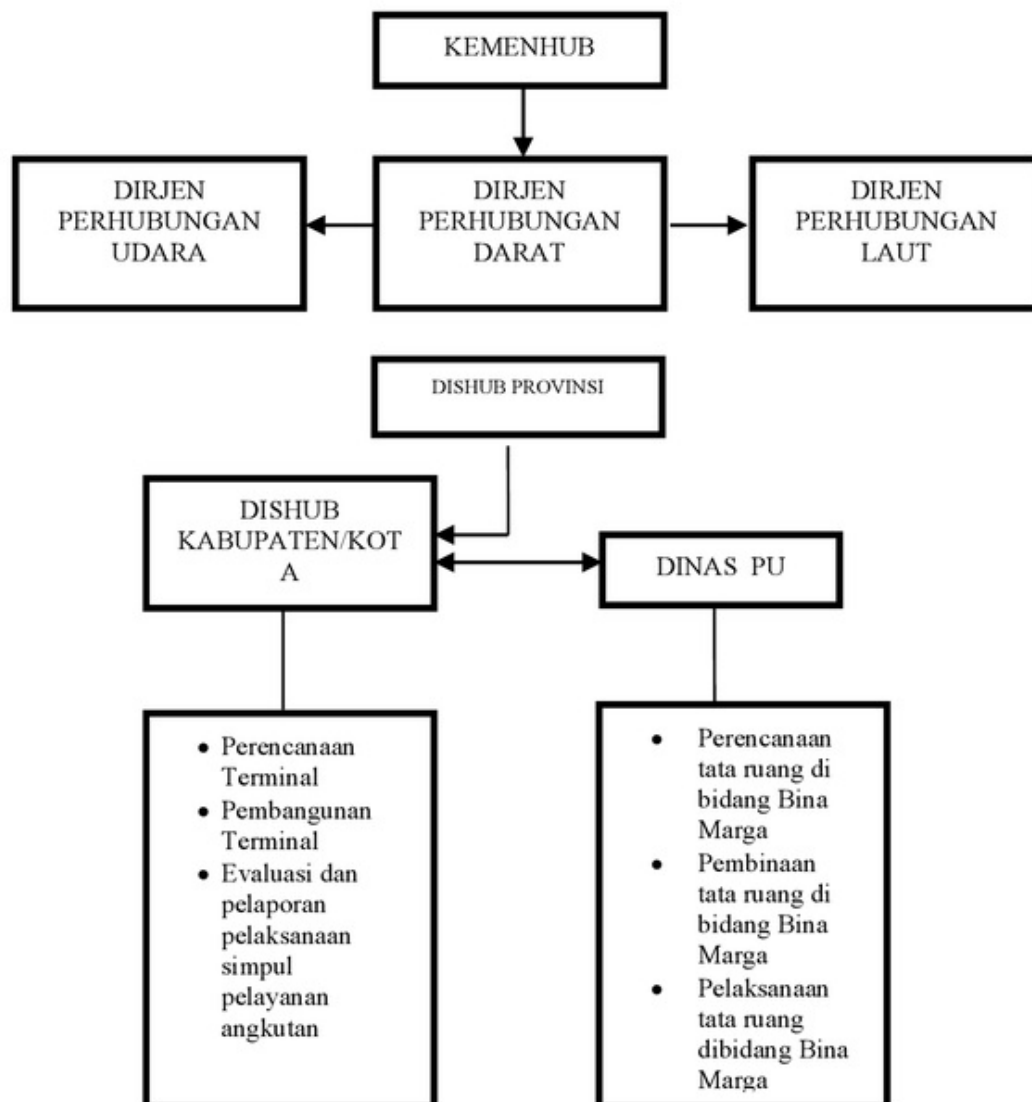
tetapi sampai tahun ini (2013) aktivitas keluar masuk kendaraan masih terlihat sepi. Sepinya kondisi terminal terjadi karena beberapa faktor, *pertama*, alokasi terminal yang terlalu jauh dari akses jalan utama (Jl. Kolonel Sugiono). *Kedua*, akses jalan menuju terminal yang selalu macet karena keberadaan pasar Gadang sehingga dinilai kurang efisien. *Terakhir*, kurang adanya pengawasan petugas terminal terhadap pergerakan angkutan umum di luar Terminal Hamid Rusdi.

Dengan kondisi terminal yang sepi dari aktivitas tersebut mengakibatkan target pendapatan asli daerah (PAD) tidak pernah tercapai. Pada tahun 2010 pendapatan dari terminal ditarget sebesar Rp35 juta/bulan, namun yang terealisasi hanya sebesar Rp. 26 juta/bulan. Sementara itu, pada tahun 2011 pendapatan yang ditargetkan adalah sebesar Rp. 37 juta/bulan dan yangdapatterealisasi hanya sebesar Rp. 25juta/bulan⁴. Sehingga dapat diasumsikan bahwa pemerintah masih belum menuai hasil, manfaat dan dampakdari proyek perencanaan pembangunan atau pengadaan terminal yang tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Adapun Landasan hukum dalam pembangunan terminal adalah sebagai berikut: (1)Peraturan Daerah kota Malang No 4 Tahun 2011, Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang, (2) Surat Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Pembangunan Nasional Nomor Kep. 195/Ket/12/1996 tentang Evaluasi Kinerja Proyek Pembangunan, (3) Surat Keputusan Menteri Negara PPN/ Kepala Bapennas No. Kep 102/K/04/1999 (hasil penyempurnaan), dan (4) UU RI No 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan. Adapun alur orientasi pembangunan terminal adalah sebagai berikut:

⁴Ahmad Sabran, Wartakotalive (14 September 2012)

Gambar 1. Alur Orientasi Pembangunan Terminal



Sumber: Data Olahan Dinas Perhubungan

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang

partisipan. Metode kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan instrumen kunci (Sugiyono, 2005). Selain itu metode penelitian kualitatif mempunyai setting yang alami sebagai sumber data langsung dan lebih menitikberatkan pada makna bukan sekedar perilaku yang tampak.

Penelitian kuantitatif didasari oleh filsafat positivisme yang menekankan fenomena-fenomena objektif dan dikaji secara kuantitatif. Maksimalisasi objektivitas desain penelitian ini dilakukan dengan menggunakan angka-angka, pengolahan statistik, struktur dan percobaan terkontrol. Ada beberapa metode penelitian yang dapat dimasukkan ke dalam penelitian kuantitatif yang bersifat non-eksperimental, yaitu metode : deskriptif, survei, ekspos facto, komparatif, korelasional dan penelitian tindakan.

Penelitian metode diskriptif adalah suatu metode meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Lokasi penelitian dilakukan di wilayah Kota Malang yang dipusatkan di daerah Buring dan sekitarnya karena sebagai tempat pengumpulan data primer dalam penelitian. Subyek yang digunakan dalam penelitian adalah masyarakat yang relevan dalam arti yang berkaitan dengan penelitian yaitu para pengguna angkutan umum dan Dinas yang terkait guna mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel untuk mendapatkan data-data primer.

Analisis data ialah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang didasarkan oleh data. Penelitian ini menggunakan beberapa model

analisis data yang bertujuan menguraikan data secara sistematis dalam penyajian yang sederhana agar mudah dipahami dalam pengambilan kesimpulan selanjutnya.

Penelitian ini memakai analisis data kualitatif dengan tetap menyertakan teori-teori pendukung sebagai bahan analisis kritisnya.

Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Reduksi data, yaitu proses menganalisa data dengan jalan mempertegas dan mempertajam sajian data yang terkumpul dengan judul penelitian sebagai batasannya. Reduksi data juga bermaksud melakukan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dengan demikian reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, dan membuang yang tidak perlu dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.
2. Display data, yakni sekumpulan informasi yang disusun dalam kerangka sistematis yang berfungsi memberikan kemudahan bagi peneliti dalam menarik kesimpulan berdasarkan logika ilmiah dan obyektif.
3. Pengambilan keputusan, yakni proses penemuan benang merah lewat pemahaman yang utuh dan komprehensif tentang penelitian yang dilakukan. Hal ini penting agar data yang diperoleh semakin mudah dipahami serta ada arah jelas mengenai kemana penelitian ini akan diarahkan secara fokus.

C. Hasil dan Analisa

Dari artikel yang kami kumpulkan memberikan wawasan yang lebih terhadap penelitian kami guna mengambil suatu argumen. Dimana argumen yang kami ajukan adalah adanya orientasi hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah yang menggelontorkan puluhan milyar rupiah terkait pembangunan infrastruktur daerah (terminal) yang kurang

menampakkan hasil, manfaat, dan dampaknya terhadap kebutuhan masyarakat. Hal tersebut karena pembangunan proyek Dinas Perhubungan, baik Dinas Perhubungan Darat ataupun Dinas Perhubungan lainnya menghabiskan puluhan miliar anggaran Negara maupun Daerah yang tidak sesuai dengan perencanaan awal dan manfaat dari pengadaan pembangunan tersebut.

Orientasi proyek pembangunan yang telah direncanakan oleh Pemerintah masih dirasa belum mencapai sasaran dikarenakan Pemerintah Daerah terlalu memaksakan pembangunan terminal tanpa memperhatikan kebutuhan masyarakat. Misalnya, lokasi terminal jauh dari jalur arteri (utama) dan akses menuju terminal memakan waktu yang lama dan sebagainya.

Berdasarkan hasil penelitian yang kami lakukan di Dinas Perhubungan mengenai pembangunan relokasi terminal menunjukkan bahwa pengadaan relokasi Terminal Hamid Rusdi diharapkan mampu membuka akses untuk mengurai kemacetan sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi di kawasan Malang Timur. Dimana kemacetan dikarenakan para sopir angkot yang tidak memperhatikan arus lalu lintas di kawasan Gadang sehingga menimbulkan kemacetan. Selain itu, kawasan Gadang juga menjadi terminal bayangan.

Sementara itu, berdasarkan penelitian yang ditujukan pada pengguna angkutan umum menunjukkan banyaknya pengguna angkutan umum yang enggan memasuki Terminal Hamid Rusdi dan lebih memilih melakukan transit di terminal bayangan (sekitar perempatan Gadang). Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti, lokasi terminal yang terlalu jauh dari akses jalan utama (Jl. Kolonel Sugiono) ± 2 km, akses jalan menuju terminal yang selalu macet karena keberadaan pasar Gadang dan aktifitasnya sehingga dinilai kurang efisien dalam waktu serta kurang adanya pengawasan petugas terminal terhadap pergerakan angkutan umum di luar Terminal Hamid Rusdi.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Terminal merupakan fasilitas tempat singgah yang cukup penting. Karena Terminal Hamid Rusdi yang ada saat ini juga sangat kurang memadai. Pembangunan terminal ini merupakan salah satu proyek yang berskala besar. Proyek yang memerlukan dana dan upaya yang besar juga, serta mempunyai peranan yang penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Terminal ini diharapkan dapat berfungsi mendorong partisipasi dan kontribusi dari semua pihak yang terkait, demi terwujudnya suatu wadah berupa tempat singgah transportasi sebagai salah satu terminal yang di relokasikan di Kota Malang. Dimana bentuk pelayanan yang berkualitas bagi para penggunanya yaitu para sopir angkutan umum dan para penumpang.

2. Saran

Keberadaan terminal harus dapat memberikan tingkat pelayanan yang optimal dalam menciptakan transportasi yang tertib, lancar, dan nyaman sebagaimana tertuang pada PERDA No 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang, sebagai acuan relokasi terminal guna membuka akses untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemacetan lalu lintas yang terjadi di wilayah Gadang.

Dengan demikian, diharapkan keberadaan Terminal Hamid rusdi dapat diterima dengan baik oleh pihak terkait untuk menjadi daya tarik tersendiri, sehingga dapat menarik semua golongan sopir angkutan umum serta penumpang untuk beroperasi dengan baik sehingga dapat mengurangi kemacetan di daerah Gadang

Daftar Pustaka

- Nazir, Moh. 2005, *Metodepenelitian*. Ghalia Indonesia,-
- Partisio, Arif 2004, *Cara mudah mengatasimasalah statistik dan rancangan percobaan dengan SPSS 12*, PT. EMK, Jakarta
- Peraturan Daerah Kota Malang No 4 Tahun 2011, Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang
- Sumanto 1995, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan*, Andi Offset, Yogyakarta
- Tamin, Z. Ofyar 2007, *Perencanaan dan Pemodelan Transportasi*, ITB, Bandung,

BAGIAN IV:
UPAH PEKERJA DAN PEGAWAI NEGERI

MEMBINGKAI STANDARISASI KEADILAN UMK DI KOTA MALANG

Oleh:
Yudi Darmansyah¹

Abstraksi

Upah Minimum Kota (UMK) adalah standardisasi terhadap jumlah upah yang harus diterapkan disetiap perusahaan. Dalam proses penentuan tahapan kenaikan UMK, Dewan Pengupahan melakukan pembahasan yang melibatkan unsur pengusaha, pekerja, dan pemerintah. Selanjutnya hasil dari pembahasan tersebut ditentukan oleh Gubernur Jawa Timur dan menjadi kesepakatan bersama untuk dilaksanakan melalui peraturan Gubernur. Jumlah UMK pada tahun 2013 yang diterapkan Kota Malang sebesar Rp 1.304.000-. Jumlah tersebut harus dilaksanakan oleh perusahaan yang memperkerjakan pekerjanya, namun dalam prakteknya ketentuan kenaikan UMK belum dapat dikatakan memiliki nilai kepuasan terhadap semua pekerja. Meningkatnya harga kebutuhan hidup serta semakin sulitnya lapangan pekerjaan yang tersedia, menyebabkan pengusaha menerapkan sistem pembayaran tersendiri tanpa disesuaikan dengan UMK. Sementara pekerja harus menerima perlakuan tersebut, dikarenakan pekerja sangat membutuhkan peluang pekerjaan yang ada. Lemahnya posisi tawar-menawar (*bargaining position*) antara pekerja dengan perusahaan menyebabkan perusahaan dengan semauanya sendiri membayar gaji pekerja tidak sesuai dengan UMK Kota Malang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besaran UMK Kota Malang tahun 2013 dan mengidentifikasi seberapa banyak perusahaan

¹Luluk Zaidah, Johan Aria Bimantoro dan dan Yutari Amalia Putri

yang belum mampu membayar gaji para pegawainya sesuai dengan UMK yang telah ditetapkan.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Studi yang dilakukan pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Malang sebagai unsur pelaksanaan pemerintah dalam bidang ketenagakerjaan di Kota Malang.

Hasil penelitian ini antara lain: (1) Pelaksanaan pembayaran UMK di Kota Malang belum sepenuhnya efektif. Sebanyak 75% perusahaan dari jumlah 890 perusahaan yang telah membayar gaji pekerja sesuai dengan UMK sedangkan 25% perusahaan masih belum membayar gaji pekerja sesuai dengan UMK. (2) Penyebab utama perusahaan tidak membayar upah sesuai UMK adalah kondisi keuangan perusahaan yang tidak memungkinkan dan *bargaining position* pekerja yang lemah. (3) Sebagian besar pekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari masih menggantungkan dari upah yang diterima dari perusahaan.

Kata Kunci: UMK (Upah Minimum Kota), Perusahaan dan Pegawai

A. Latar Belakang

Di era desentralisasi, penentuan tentang Upah Minimum Kota (UMK) melibatkan unit kerja Pemerintah Pusat dan Daerah. Pada level kota, peran Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi sangat penting dalam hal pengawasandan perlindungan kepada pekerja. Hal ini diperlukan sebuah proteksi dari Pemerintah karena menyangkut hubungan kerja antara pihak perusahaan dan pekerja. Terutama perusahaan yang bergerak dalam sektor industri, kontribusi pekerja sebagai sumber daya utama menjadi motor penggerak untuk mencapai tingkat produktivitas sangat tinggi.

Meskipun demikian, tingginya angka produktivitas tidak diikuti oleh tingginya standar gaji pekerja, sehingga hal tersebut harus dievaluasi kembali dalam sistem standar penggajian minimal buruh

atau pekerja yang disebut dengan Upah Minimum Kota (UMK). Berdasarkan penghasilan laba kotor sebuah perusahaan, idealnya harus dapat menyeimbangkan upah yang diberikan pada pekerjanya. Namun ironisnya, sistem pembayaran yang banyak dilakukan saat ini masih tidak relevan dengan pemenuhan hak yang sebenarnya harus diberikan kepada buruh berdasarkan ketetapan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK). Akan tetapi, berdasarkan Pasal 3 ayat [1] Kep Menakertrans Nomor 231 Tahun 2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum, pengusaha yang tidak mampu membayar upah pekerja sesuai upah minimum dapat mengajukan permohonan penangguhan upah minimum, yakni bagi perusahaan yang masih tergolong dalam perusahaan yang belum mampu membayar pekerja dengan standar peraturan Upah Minimum.

Ketentuan ini sebagaimana ditetapkan oleh peraturan Gubernur Jatim No. 72 Tahun 2012 tentang Upah Minimum Kabupaten atau Kota di Jawa Timur. Peraturan tersebut menetapkan kenaikan UMK untuk tahun 2013 menjadi Rp 1.340.300,00. Angka ini meningkat daripada tahun sebelumnya yakni sebesar Rp 1.268.150,00. Peningkatan tersebut telah disesuaikan dengan kebutuhan hidup layak (KHL) untuk memenuhi beberapa indikator pokok kehidupan sehari-hari.

Adapun proses pengajuan surat penangguhan perusahaan ditujukan langsung kepada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, kemudian diajukan kepada Walikota, dan pengajuan surat pembayaran penangguhan oleh perusahaan diserahkan oleh Walikota kepada Gubernur. Ketetapan penangguhan dilakukan paling lambat 10 hari.

Argumen yang akan dikembangkan disini adalah masih terdapat sebagian kecil perusahaan yang melakukan pembayaran UMK terhadap buruh dibawah standaryang sudah ditentukan. Hal ini tidak sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2003 dan Permentrans No.19 tahun 2012. Kedua Regulasi tersebut diwujudkan dalam kolaborasi pusat dan daerah untuk menetapkan standart UMK. Dengan adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk

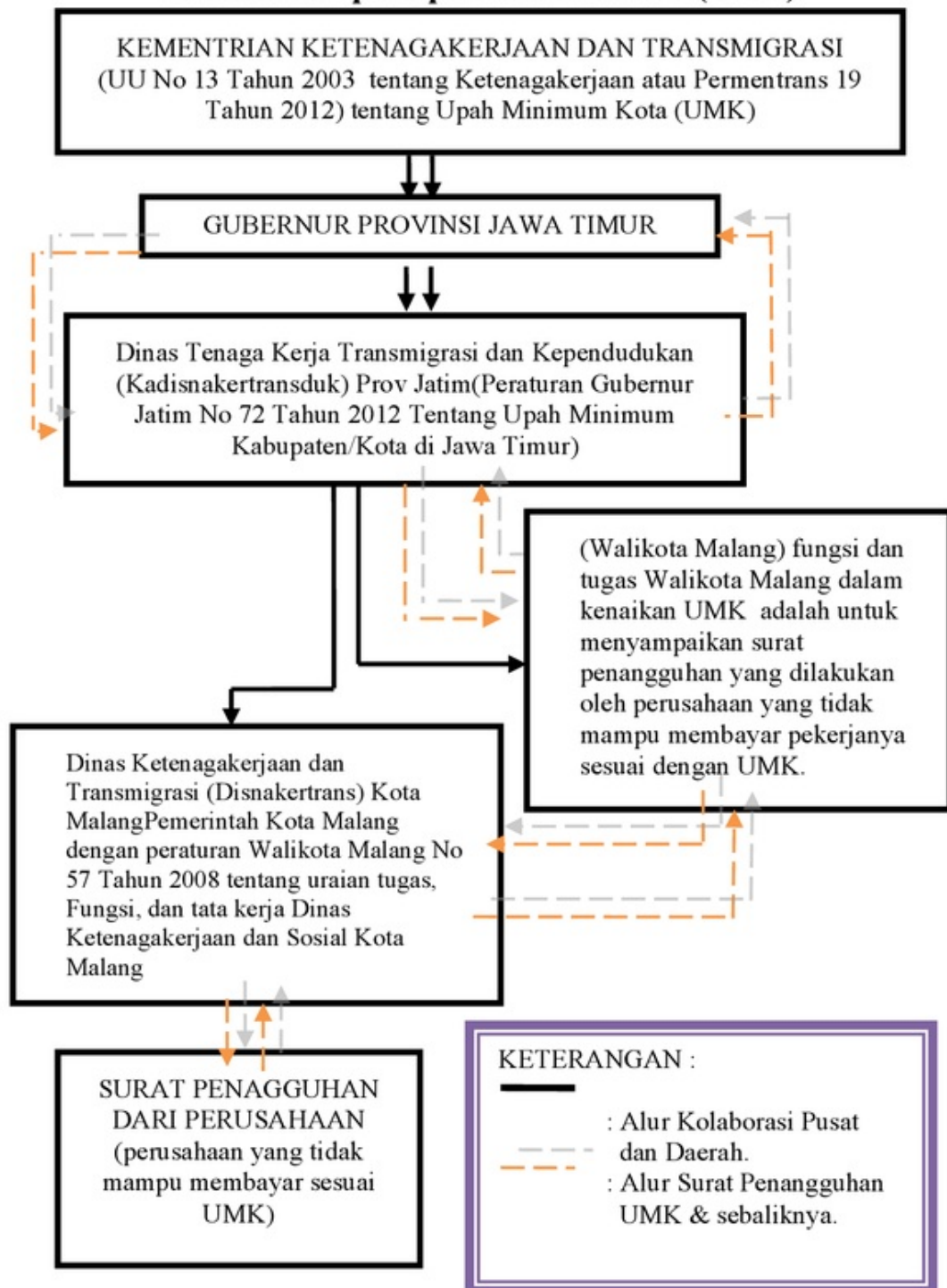
mengatur jumlah standardisasi UMK, maka Pemerintah Provinsi membuat peraturan Gubernur No. 72 Tahun 2012 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

Berdasarkan peraturan tersebut, pemerintah Kota Malang mengajukan jumlah UMK tahun 2013 yaitu sebesar Rp 1.340.300,00. Setelah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Provinsi, maka jumlah UMK 2013 yang diajukan oleh Pemerintah Kota Malang dilegalkan. Selain itu, secara khusus pemerintah Kota Malang juga menetapkan Peraturan Walikota Malang No. 57 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Tugas, Fungsi Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Malang dalam mengawasi dan melindungi pekerja, sekaligus sebagai pengawas terhadap perusahaan yang belum membayar pekerja sesuai dengan UMK.

Secara prosedural, pemerintah telah menerapkan surat penangguhan kepada perusahaan yang belum membayar pekerja sesuai dengan UMK atas tingkat pengklasifikasian perusahaan, dan dari tingkat produktifitas yang dihasilkan. Untuk mengajukan surat penangguhan UMK, pengusaha harus mencapai kesepakatan dengan pihak pekerja. Apabila telah tercapai kesepakatan untuk dilakukan penangguhan upah minimum, maka surat penangguhan UMK dapat disampaikan kepada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Malang yang selanjutnya akan dilimpahkan kepada Walikota Malang. Selanjutnya, surat penangguhan UMK akan diserahkan kepada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi, dan akan ditindaklanjuti oleh Gubernur Jawa Timur.

Adapun bentuk kolaborasi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam penetapan Upah Minimum Kota (UMK) sebagaimana ditunjukkan pada bagan berikut :

Gambar 1. Bentuk Kolaborasi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Penetapan Upah Minimal Kota (UMK)



Sebagaimana pemaparan sebelumnya, dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Kolaborasi Aktor Pusat dan Daerah Terhadap Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) sebagaimana ditetapkan dalam peraturan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan(UUK) ?
2. Bagaimana prosedur persetujuan surat penangguhan pembayaran UMK oleh perusahaan jika perusahaan tidak mampu membayar gaji sesuai dengan UMK?

B. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan penelitian dengan metodologi kualitatif, yang sangat berguna sebagai sumber data yang langsung melalui pengkajian deskriptif analisis. Melalui penelitian ini, sumber data di dapatkan melalui sebuah studi kasus yang dapat menjadi konsep penelitian yang berhubungan dengan “Kolaborasi Aktor Pusat dan Daerah Terhadap Upah Minimum Kota (studi Kenaikan UMK diKota Malang)”. Melalui penelitian ini juga diharapkan mampu melihat secara mendasar apa yang menjadi permasalahan utama kenaikan UMK, dan bagaimana peran lembaga dalam melihat permasalahan yang timbul dalam proses kenaikan UMK.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Malang, yang beralamat di Jalan Mayjen Sungkono Malang dan melihat secara langsung pada tempat lokasi penelitian dengan kondisi yang ada, mengingat peneliti akan meneliti tentang “Kolaborasi Aktor Pusat dan Daerah Terhadap Upah Minimum Kota (studi Kenaikan UMK diKota Malang)”.

3. Sumber Data

Sumber data yang ada dalam penelitian ini ialah sebuah kata-kata dan tindakan yang didapatkan dari hasil penelitian, sekaligus sebuah tambahan dokumentasi yang ada baik secara primer (observasi langsung, dokumentasi lapangan) maupun sekunder (data-data peneliti melalui verifikasi, dokumentasi) dan melalui beberapa instrumen-instrumen yang akan digunakan untuk meneliti tentang “Kolaborasi Aktor Pusat dan Daerah Terhadap Upah Minimum Kota (studi Kenaikan UMK di Kota Malang)”.

4. Analisis Data

Proses yang dilalui dari sebuah pencarian data dan sekaligus menyusun data dengan sistematis melalui data-data yang diperoleh dari hasil penelitian, dengan penggabungan data menjadi sebuah kategori yang dapat dipelajari secara langsung, sekaligus penjabaran dari data dan sebuah kesimpulan dari segala hasil penelitian tentang “Kolaborasi Aktor Pusat dan Daerah Terhadap Upah Minimum Kota (studi Kenaikan UMK di Kota Malang)” agar mudah untuk dipahami oleh pembaca.

C. Hasil dan Analisa

1. Kolaborasi Penentuan UMK oleh Pemerintah (Pusat dan Daerah)

Kolaborasi antara Pusat dan Daerah dilakukan sesuai dengan UU No.13 tahun 2003 pasal 89 tentang Ketenagakerjaan, pelimpahan wewenang dilaksanakan secara vertikal oleh Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi melalui ketetapan Permentrans No. 19 tahun 2012 kepada Pemerintah Provinsi untuk mengatur jumlah standarisasi UMK secara kolektif dengan daerah yang mengajukan permohonan standar UMK yang diusulkan oleh Dewan Pengupahan setiap daerah kepada Gubernur Jawa Timur.

Dalam penentuan UMK Dewan Pengupahan Dinas Ketenagakerjaan terlebih dahulu melakukan survei Kebutuhan Hidup

Layak (KHL) yang terdiri dari 60 item kebutuhan. Penetapan Upah Minimum dilakukan melalui beberapa tahap yang dilakukan setiap tahunnya untuk memperoleh angka kebutuhan hidup layak sesuai dengan survei pasar yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan Dinas Ketenagakerjaan Kota Malang yang terdiri dari beberapa unsur, antara lain pengusaha dan pekerja, pemerintah, akademisi, dan perguruan tinggi. Dalam menetapkan besaran upah minimum tersebut didasarkan pada nilai KHL yang telah dikalkulasikan sehingga akan terbentuk angka yang akan dijadikan sebagai Upah Minimum Kota, dengan kesepakatan Dewan Pengupahan Dinas Ketenagakejaan Kota Malang serta beberapa pihak yang terlibat dalam kesepakatan tersebut. Kemudian usulan nilai UMK dari Dewan Pengupahan Dinas Ketenagakerjaan Kota Malang akan disampaikan ke Gubernur Jawa Timur untuk mendapatkan penetapan nilai Upah Minimum Kota pada tahun berikutnya.

a. Sistem Pengupahan dan Kompensasi Upah

Sistem pengupahan merupakan kerangka bagaimana upah diatur dan diterapkan. Sistem pengupahan di Indonesia pada umumnya berdasarkan kepada tiga fungsi upah yaitu:

- i. Menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya,
- ii. Mencerminkan imbalan atas hasil kerja seseorang,
- iii. Menyediakan insentif untuk mendorong peningkatan produktivitas kerja

b. Penerapan Upah Minimum

Upah pada dasarnya merupakan sumber utama penghasilan seseorang, sebab itu, upah harus cukup untuk memenuhi kebutuhan karyawan dan keluarganya dengan wajar. Kewajaran dapat dinilai dan diukur dengan kebutuhan hidup minimum atau sering disebut kebutuhan fisik minimum (KFM). Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada karyawan untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau yang di

lakukan dan dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang diterapkan atas dasar suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan serta dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan karyawan termasuk tunjangan, baik untuk karyawan itu sendiri maupun untuk keluarganya.²

c. Menetapkan Harga Pekerjaan

Beberapa metode dapat digunakan untuk menentukan nilai suatu pekerjaan, melalui evaluasi pekerjaan. Hasil evaluasi pekerjaan akan menentukan tingkatan-tingkatan pekerjaan yang memiliki nilai yang berbeda. Nilai setiap pekerjaan ditetapkan sebagai dasar menentukan harga pekerjaan. Harga pekerjaan (*job pricing*) adalah suatu proses evaluasi pekerjaan untuk menentukan nilai setiap pekerjaan yang dihargai dengan mata uang tertentu. Ada tiga cara dapat digunakan untuk menetapkan harga pekerjaan, antara lain:

i. Tingkat bayaran

Suatu proses yang digunakan organisasi untuk menetapkan harga pekerjaan adalah dengan mengelompokkan pekerjaan-pekerjaan yang dimiliki karakteristik sama atau hampir sama.

ii. Rentang bayaran

Kebijakan lainnya, memberikan bayaran yang sama kepada karyawan yang mengerjakan pekerjaan sama, disebut rentang bayaran atau kisaran bayaran.

²Prof. Dr. Sondang P. Siagian, MPA. telah dimaklumi bahwa system imbalan dimaksudkan sebagai pemberian salah satu bentuk penghargaan kepada para karyawan atas “sumbangannya” kepada organisasi yang terutama tercermin dari prestasi kerjanya. Penilaian pekerjaan adalah prosedur yang sistematis untuk menentukan nilai relative dari berbagai pekerjaan dalam suatu organisasi. Tujuannya adalah untuk menentukan pekerjaan mana yang dibayar lebih tinggi atau lebih rendah dari pekerjaan lain.

iii. *Broadbanding*

Suatu tindakan yang akhir-akhir ini digunakan oleh banyak organisasi dalam menentukan bayaran pada tingkat bayaran yang lebih sedikit tetapi memiliki rentang lebih luas dari pada system lainnya.

d. *Komponen Upah Minimum*

Komponen upah adalah upah pokok dan tunjangan yang bersifat tetap. Jika perusahaan tidak memberikan tunjangan maka secara otomatis besaran UMK menjadi gajipokok pekerja, dan jika perusahaan memberikan tunjangan tetap maka nominal gaji pokok pekerja 74% dan tunjangan 25%.

Kebutuhan Fisik Minimum (KFM) dianggap mempengaruhi besarnya upah minimum. Kebutuhan Fisik Minimum adalah kebutuhan pokok dari seseorang yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi fisik dan mentalnya agar dapat menjalankan fungsinya sebagai salah satu faktor produksi. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang minimum baik ditinjau dari segi jumlah maupun dari segi kualitas barang dan jasa yang dibutuhkan, sehingga merupakan kebutuhan yang tidak dapat dirugikan atau dikurangi lagi.

2. Prosedur Pengajuan Surat Penangguhan Pembayaran Gaji Pegawai jika di bawah UMK

Berdasarkan data tahun 2013 kurang lebih terdapat 890 perusahaan yang bergerak pada sektor industri makro maupun mikro yang ada di Kota Malang dengan jumlah pekerja 107.000 orang. Terkait dengan pesatnya jumlah perusahaan, sebesar 75% perusahaan di Kota Malang yang sudah melaksanakan pembayaran gaji pegawai sesuai dengan UMK, sedangkan sebesar 25% perusahaan masih belum melakukan pembayaran gaji sesuai dengan UMK.

Pada dasarnya, setiap pengusaha tidak diperbolehkan untuk membayar gaji pekerjanya lebih rendah dari upah minimum. Akan tetapi, sebagian kecil perusahaan di Kota Malang tidak sepenuhnya

perusahaan yang tergolong perusahaan makro. Melihat kondisi yang seperti ini, pengusaha yang tidak mampu membayar gaji pekerja sesuai dengan UMK dapat mengajukan surat penangguhan UMK. Untuk mengajukan surat penangguhan UMK, pengusaha harus mencapai kesepakatan dengan pihak buruh. Apabila telah tercapai kesepakatan untuk dilakukan penangguhan upah minimum, maka surat penangguhan UMK dapat disampaikan kepada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Malang yang selanjutnya akan dilimpahkan kepada Walikota Malang. Setelah itu, surat penangguhan akan diserahkan kepada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi dan selanjutnya akan diberikan kepada Gubernur Jawa Timur untuk ditindaklanjuti. Prosedural permohonan penangguhan upah minimum disertai dengan :

- a. Naskah asli kesepakatan tertulis antara pengusaha dengan serikat pekerja/serikat.
- b. Laporan keuangan perusahaan yang terdiri dari neraca, perhitungan rugi/laba, beserta penjelasan untuk 2 tahun terakhir.
- c. Salinan akta pendirian perusahaan.
- d. Data upah manurut jabatan pekerja/buruh.
- e. Jumlah pekerja/buruh seluruhnya dan jumlah pekerja/buruh yang dimohonkan penangguhan pelaksanaan upah minimum.
- f. Perkembangan produksi dan pemasaran selama 2 tahun terakhir, serta rencana produksi dan pemasaran 2 tahun yang akan datang.

Apabila perusahaan yang memohon penangguhan upah minimum berbentuk badan hukum, atau jika Gubernur merasa perlu untuk pembuktian ketidakmampuan keuangan perusahaan, maka laporan keuangan harus diaudit oleh Akuntan Publik.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Malang, dapat diketahui

bahwa proses penetapan Upah Minimum Kota di Kota Malang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan upah minimum. Proses penetapan dimulai dari penyusunan tim survei oleh Dewan Pengupahan untuk melakukan peninjauan langsung ke pasar terkait dengan harga kebutuhan yang dikonsumsi dengan ukuran pekerja lajang.

Pelaksanaan pembayaran Upah Minimum Kota (UMK) di Kota Malang sebanyak 75% perusahaan yang melakukan pembayaran gaji pekerja sesuai dengan UMK, sedangkan 25% perusahaan belum melakukan pembayaran gaji pekerja sesuai dengan UMK yang ditetapkan. Melihat persentase tersebut, pada tahun 2013 Kota Malang tidak menerima surat penangguhan dari pihak perusahaan yang belum melakukan pembayaran gaji pekerja sesuai dengan UMK, Sulitnya kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja menjadi salah satu faktor tidak adanya surat penangguhan yang diterima Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Malang.

2. Saran

Kenaikan UMK menjadi pembahasan khusus untuk memenuhi kehidupan pekerja menjadi lebih baik, tidak hanya mempekerjakan pekerja untuk mendapatkan hasil produksi yang tinggi. Namun, pada hakikatnya pemerintah dalam hal ini Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi harus mengawasi standar pembayaran terhadap pekerja yang telah ditentukan oleh Gubernur Jawa Timur untuk Kota Malang, sekaligus memberikan sanksi kepada perusahaan yang tidak membayar pekerja sesuai dengan standar UMK.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Sumarsono, Sonny 2009, *Teori dan Kebijakan Publik Sumber Daya Manusia*, Graha Ilmu, Yogyakarta

Siagian, Sondang P 2009, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta

Sutrisno, Edy 2009, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, -, Jakarta

Bangun, Wilson 2012, *Manajemen Sumber Data Manusia*, Erlangga, Jakarta

Peraturan

Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Artikel

Ainun, Yatimul, 2012, “*UMK Kota Malang Dianjurkan Naik 12,5 Persen*”, diakses pada 3 April 2013
<<http://megapolitan.kompas.com/read/2012/10/19/15175724/UMK.Kota.Malang.Diajukan.Naik.12.5.Persen>>

Afandi, Achmad Syaiful, 2013, “*UMK Kota Malang Sudah Sesuai KHL*”, diakses pada 3 April 2013
<<http://mediacenter.malangkota.go.id/2012/12/wahyu-umk-kota-malang-sudah-sesuai-khl/#ixzz2PTu8D4fl>>

Afandi, Achmad Syaiful, 2013, “*70 Persen Perusahaan Sudah Berlakukannya UMK*”, diakses pada 3 April 2013
(<http://mediacenter.malangkota.go.id/2013/03/70-persen-perusahaan-sudah-berlakukannya-umk/#ixzz2PTImkTUJ>)

MENELISIK PROPORSI KEADILAN REKRUTMEN CPNS DI KABUPATEN MALANG

Oleh
Unike Ayu Agustina¹

Abstraksi

Pengadaan CPNS dilakukan untuk memenuhi formasi yang lowong dalam organisasi pemerintah. Pengadaan CPNS dapat dilakukan secara umum dan juga pengangkatan dari tenaga honorer. Dari pengadaan CPNS secara terbuka bertujuan memperoleh CPNS yang profesional, jujur, bertanggung jawab, netral, dan memiliki kompetensi sesuai dengan tugas/jabatan yang akan diduduki serta menjamin transparansi dan mencegah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan pemerintah pusat dan daerah dalam melakukan pengadaan CPNS dan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengadaan CPNS yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Kabupaten Malang.

Untuk melakukan penelitian ini diperlukan metode yaitu metode kualitatif deskriptif, dimana penelitian dilakukan di kantor Badan Kepegawaian Kabupaten Malang. Sumber data diperoleh dengan cara observasi, hasil wawancara, dokumen, serta buku literatur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di era otonomi daerah tatacara pengadaan CPNS di Indonesia masih sentralistik yaitu daerah menunggu instruksi dari Pemerintah Pusat. Hal tersebut karena Negara Indonesia merupakan Negara kesatuan dan gaji pegawai Indonesia dibiayai APBN. Jumlah PNS di Kabupaten Malang saat ini ada 17.535 pegawai. Pengadaan CPNS dari pelamar umum di Kabupaten Malang terakhir dilakukan pada tahun 2010. Penerimaan dari pelamar umum

¹ Taufiq Al Ayyubi dan Jumiaty Paspol Malindo dan Riyanda Barmawi

terbatas karena terdapat 8.348 tenaga honorer yang lebih dulu mengisi formasi yang lowong. Untuk itu, pengadaan CPNS difokuskan dahulu pada pengangkatan dari tenaga honorer.

Kata kunci : Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan pengadaan CPNS

A. Latar Belakang

Desentralisasi telah lama dianut oleh Negara Indonesia. Desentralisasi merupakan penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang telah diatur dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004. Hanya sebagian urusan yang diberikan kepada daerah tersebut menimbulkan suatu hubungan atau saling ketergantungan yang erat antara kedua pemerintahan tersebut, termasuk dalam bidang kepegawaian.

Dalam mendukung desentralisasi dibutuhkan SDM yang berkompeten, untuk itu Negara harus cermat dalam memilih pegawai Negara yang biasa disebut pegawai negeri sipil. Untuk menjamin kualitas pegawai Negara, pemerintah telah mengeluarkan peraturan tentang kepegawaian yaitu UU No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Untuk mendapatkan pegawai yang berkompeten biasa pemerintah melakukan open rekrutmen CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil).

Open rekrutmen yang setiap tahun diadakan oleh Pemerintah Daerah harus mengikuti instruksi Pemerintah Pusat. Hal ini dikarenakan apabila penerimaan CPNS dikendalikan oleh Pemerintah Daerah akan berdampak terhadap KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), karena seringkali CPNS ini dijadikan sebagai ajang investasi pejabat daerah. Selain itu, efek kekeluargaan juga akan dijadikan pertimbangan.

Pengalaman penyelenggaraan kebijakan kepegawaian ternyata masih sulit dalam hal menata dan membina PNS. Secara global kita dihadapkan pada dinamika perubahan lingkungan strategis yang bergerak lebih cepat dari perkembangan kemampuan/kualitas SDM, sehingga penting melakukan rekrutmen untuk memilih pegawai negeri sipil yang berkapasitas agar dapat menjalankan tugasnya sebagai Birokrasi. Dengan demikian, di era otonomi daerah peran Pemerintah Daerah tidaklah terlepas dari kendali Pemerintah Pusat.

Pengadaan CPNS secara umum terakhir dilakukan pada tahun 2005. Hal ini penting untuk dicermati bersama karena setiap tahunnya Pemerintah Daerah selalu dibebani oleh sumber daya kerja yang di butuhkan oleh setiap sektor pemerintahan. Misalkan di SDN 5 Kota Malang dalam melakukan pembinaan dan pendidikan selalu membutuhkan tenaga pengajar yang terus bertambah karena di ikuti oleh jumlah siswa dan siswi yang meningkat di setiap tahunnya. Hal ini menyebabkan Pemerintah Daerah menampung tenaga honorer² di luar dana APBD. Padahal idealnya, dalam pengadaan CPNS dilakukan untuk pelamar umum dan diadakan secara terbuka, namun faktanya saat ini program CPNS telah terintervensi oleh orang-orang yang sebelumnya telah menjadi tenaga honorer di setiap SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) maupun Badan yang ada di sektor pemerintahan. Sehingga dengan terus bertambahnya tenaga honorer seperti itu akan menutup peluang bagi pemerintah untuk melakukan pengadaan CPNS secara umum.

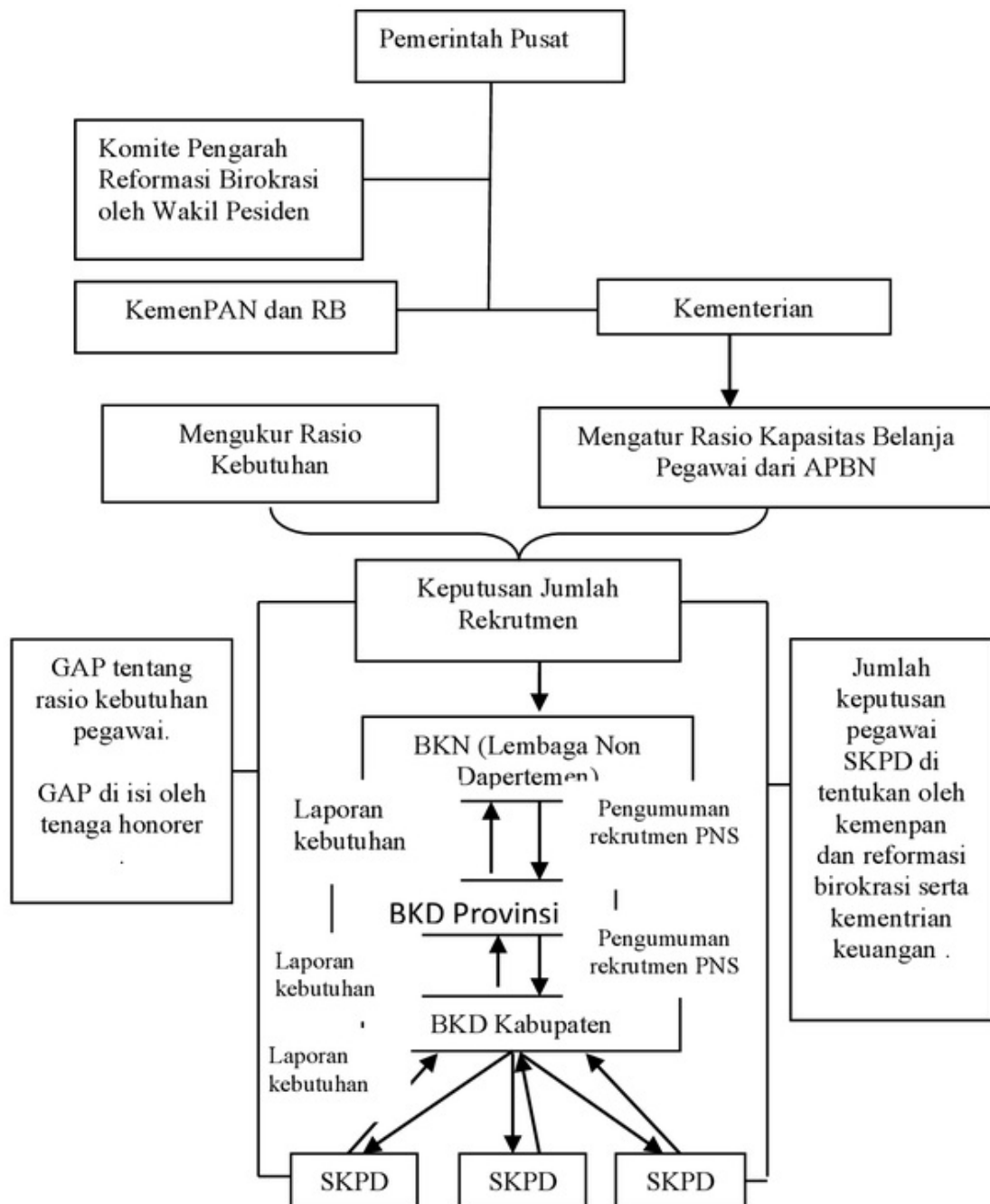
Penelitian ini akan membahas tentang pola hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang dalam pengadaan CPNS. Diharapkan dengan adanya peraturan yang dibuat BKN atau BKD, dalam pengadaan CPNS setiap tahunnya di Kabupaten

² Peraturan kepala badan Kepegawaian Negara nomor 9 tahun 2012 pengadaan CPNS ada dua jalur yaitu pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS dan CPNS dari pelamar Umum

Malang tepat sasaran dan medapat SDM (Sumber Daya Manusia) yang baik.

Argumen yang akan dikemukakan ialah pengadaan CPNS belum menyentuh masyarakat secara umum, akan tetapi lebih memprioritaskan tenaga honorer disetiap SKPD. Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pengadaan CPNS masih sentralistik di era otonomi daerah saat ini. Hubungan juga diwarnai dengan isu model pengadaan CPNS seperti PNS kontrak atau moratorium PNS. Hal ini mengakibatkan Pemerintah Daerah melakukan pengadaan pengangkatan CPNS honorer, sehingga *open* rekrutmen tidak berlangsung secara reguler. Adapun Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah terkait pengadaan CPNS sesuai adalah sebagai berikut :

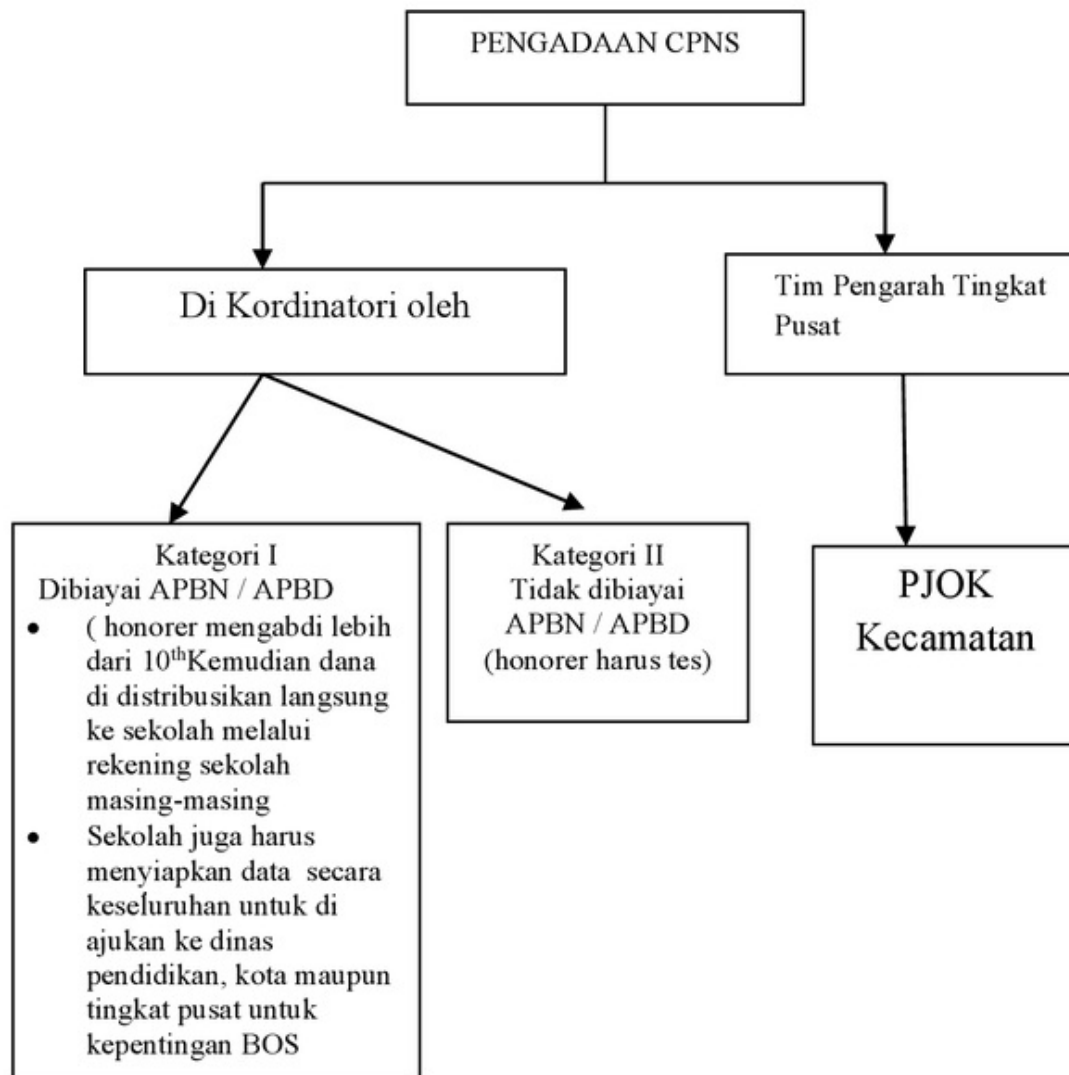
Gambar 1. Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Penentuan Rasio Pengadaan CPNS



Sumber : Data diolah

Selain itu, adapun bagan tentang pengadaan CPNS yaitu sebagai berikut:

Gambar 2. Mekanisme Pengadaan CPNS



Sumber : Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan CPNS

Berdasarkan argument awal tersebut, maka dapat dirumuskan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah terkait pengadaan CPNS ?
2. Bagaimana pelaksanaan pengadaan CPNS yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang ?

B. Metode Penelitian

Untuk melakukan penelitian diperlukan sebuah metode agar penelitian dapat tersusun dengan rapi dan jelas beruntun. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian penulis adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah menggambarkan realita empirik dibalik fenomena secara mendalam, rinci, dan tuntas. Penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian adalah dengan mencocokkan antara realita empirik dengan teori yang menggunakan model deskriptif.³ Data yang digunakan dalam penyusunan laporan penelitian berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, media internet, dan dokumen resmi lainnya.

Selain itu, dalam penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian studi kasus yang diangkat dari beberapa teori dan artikel tentang “Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pengadaan CPNS (Studi kasus pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang)”. Penelitian studi kasus yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk mempelajari lebih intensif tentang latar belakang keadaan, interaksi unit sosial (individu, kelompok, masyarakat atau lembaga).

³ Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung, Remaja Rosda Karya, 2004), Hlm: 131

2. Sumber Data

Data-data dalam penelitian berdasarkan sumber berupa wawancara, observasi, serta dokumen dan buku lainya.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di kantor Badan Kepegawaian Kabupaten Malang, Jalan KH. Agus Salim No. 7 Kabupaten Malang.

4. Analisis Data

Setelah data terkumpul semua, maka proses selanjutnya adalah pengolahan data dengan cara reduksi data dan analisa data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori yang akan dipelajari, menjabarkannya dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh penulis maupun pembaca lainnya.⁴

C. Hasil dan Analisa

1. Hubungan Pemerintah Pusat Dan Daerah Terkait Pengadaan CPNS

Dari hasil penelitian tentang hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pengadaan CPNS ditemukan hubungan yang sentralistik dan instruktif dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yaitu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara kepada Badan Kepegawaian Negara, memberikan informasi kuota penerimaan PNS untuk daerah ke Pemerintah Daerah kemudian diberikan kepada Badan Kepegawaian Daerah berupa surat Keputusan (SK) Bupati. Hal ini dikarenakan Negara Indonesia merupakan Negara kesatuan, sehingga kepegawaian diseluruh Indonesia harus berpatokan kepada peraturan Presiden dan lembaga kepegawaian (Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian

⁴Milles, Matthew B dan Hubermn,A. Michal. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI-Press.Hlm:23

Negara). Hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok kepegawaian. Hal ini dikarenakan gaji pegawai negeri sipil dibiayai oleh APBN, sehingga pendapatan APBD kabupaten baik dari dana transfer pusat ataupun PAD tidak mampu sepenuhnya membiayai belanja PNS. Sedangkan dalam penentuan jumlah pegawai, negara harus menggunakan analisis beban kerja⁵.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian diperlukan pegawai negeri yang berkemampuan melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab dalam penyelesaian tugas pemerintahan dan pembangunan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam hal pengadaan CPNS tahun 2013, Kabupaten Malang berpedoman pada peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil. Dimana ada dua cara pengadaan yaitu pengadaan CPNS dari tenaga honorer dan pengadaan CPNS dari pelamar umum.

2. Pelaksanaan Pengadaan CPNS Yang Dilakukan Oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang

Berdasarkan hasil wawancara, pengadaan CPNS model pertama yakni dari pelamar umum terakhir diadakan pada tahun 2010 berdasarkan Keputusan Menteri Aparatur Negara yang kemudian dijadikan Surat Keputusan Bupati No:821.1/412/421.013/2010 tentang Penetapan Nama-nama Peserta untuk Menyatakan Lulus Ujian CPNS Daerah Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2010. Sementara itu, pengadaan CPNS model kedua yakni dari tenaga honorer yang diselenggarakan setiap tahun, dimana yang dimaksud adalah tenaga

⁵Penggunaan analisis beban kerja (Workload Analisis) adalah mengidentifikasi baik jumlah pegawai maupun kualifikasi pegawai yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi, demi terciptanya keefektifitasan dan keefisienan organisasi. (Sri Rahayuningsih)

honorar dari kategori I. Pengadaan CPNS dari tenaga honorar dilakukan pemerintah Kabupaten Malang karena masih banyaknya jumlah tenaga honorar.

Adapun pengadaan CPNS yang akan diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Malang pada bulan September tahun 2013, yakni seleksi CPNS dari tenaga honorar Kategori II. Pengadaan CPNS kategori II berbeda dengan kategori I, dimana kategori I hanya mempertimbangkan lama pengabdian dan tingkat disiplin kerja dari pegawai honorar tersebut, sedangkan pada kategori II harus melewati seleksi dengan cara tes dan pertimbangan disiplin kerja dari pegawai honorar tersebut. Adapun data jumlah pegawai honorar maupun pegawai negeri sipil tetap Kabupaten Malang, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Rekapitulasi Data Jumlah PNS dan Tenaga Honorar Kabupaten Malang (Januari 2012)⁶

NO.	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI
	SKPD KAB. MALANG	16.648
2	KACAMATAN, KELURAHAN DAN DESA	887
	JUMLAH PNS	17.535
3	GTT	4.828
	Kategori 1	1
	Kategori 2	1.931
	Non Kategori	2.896
4	PTT	2.570

⁶ Keterangan :

- GTT : Guru tidak tetap
- PTT : Pegawai tidak tetap (SKPD)
- Kategori I : Pegawai honorar yang mengabdikan sepuluh tahun lebih
- Kategori II : Pegawai honorar yang mengabdikan kurang dari sepuluh tahun

	Kategori 1	2
	Kategori 2	855
	Non Kategori	1.713
5	TENAGA KESEHATAN	479
	Kategori 1	-
	Kategori 2	58
	Non Kategori	439
6	KONTRAK SEKRETARIAT DAERAH	453
	JUMLAH TOTAL TENAGA HONORER	8.348
	JUMLAH TOTAL	25.883

Sumber : Dokumen Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang 2012

Dari tabel tersebut, terlihat bahwa banyak terdapat tenaga honorer yaitu 8.348 pegawai. Hal ini menyebabkan Pengadaan CPNS belum menyentuh masyarakat secara umum, akan tetapi lebih memprioritaskan tenaga honorer dari guru tidak tetap maupun pegawai tidak tetap (SKPD).

Alasan pengangkatan tenaga honorer terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang karena institusi membutuhkan pegawai dalam waktu singkat, tanpa menunggu pengadaan rekrutmen CPNS dari pelamar umum yang hanya diadakan lima tahun sekali, dimana gaji pegawai honorer tersebut dibiayai dari SKPD masing-masing. Ketentuan pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS dibatasi pada pegawai honorer yang diangkat pada tahun 2005 dan sebelumnya. Sementara itu, jika Pemerintah Daerah membutuhkan pegawai baru setelah tahun 2005, pegawai baru cukup sebagai tenaga kontrak.

Dalam peraturan pemerintah tersebut, masa kerja dari pegawai kontrak dapat diperpanjang setiap enam bulan sekali. Sebagai

dampaknya, Pemerintah Daerah harus mampu konsisten bahwa pegawai baru hanya sebatas kontrak sehingga pegawai kontrak tidak beranggapan dapat diangkat menjadi CPNS nantinya. Pegawai kontrak dapat menjadi CPNS dengan mengikuti pengadaan CPNS dari pelamar umum.

Dari hasil wawancara, pemerintah memilih merekrut tenaga honorer menjadi CPNS karena mereka telah lama mengabdikan sehingga pengalamannya dalam bekerja disuatu bidang lebih matang dibandingkan dengan tenaga pelamar umum yang masih belum mempunyai pengalaman dibidang tersebut (Noerhadiyono)⁷. Padahal, pengalaman saja tidak cukup untuk terus bertahan, dibutuhkan pula kemampuan dari segi teori, pengetahuan luas dan kemampuan berinovasi. Pengadaan CPNS seharusnya mampu membuka peluang seluasnya bagi masyarakat sehingga akan diperoleh SDM yang terbaik dari merit sistem (Ito, 2002)⁸. Selain itu, jika peluang hanya dari tenaga honorer maka peluang untuk mendapatkan SDM terbatas pada tenaga honorer, padahal terangkatnya tenaga honorer biasa dari segi kedekatan internal penguasa SKPD tanpa tes dalam skill karena waktu yang pendek.

Sementara itu, Lavigna⁹ menyatakan bahwa persoalan konteks keuangan dan konteks sosial budaya merupakan penghambat utama pelaksanaan rekrutmen di Negara berkembang seperti Indonesia. Selain APBD yang tidak mencukupi untuk mengurus kepegawaian daerah Kabupaten Malang sendiri, pengadaan CPNS masih diwarnai hal sosial budaya Indonesia yang masih penuh kasih dan penghargaan

⁷Bapak Noerhadiyono adalah Kepala bidang Pembangunan dan kesejahteraan pegawai di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang

⁸Jack Ito, "career Mobility and Branding In the Civil Service: An Empirical Study." International Recruitment and Selection Strategies. IPMA-HR, Washington.D.C.2002

⁹Robert J Lavigna dan Steven W Hays "Recruitment and Seection of Public Workes : An Internasional Compendium of Modern Trends and Practies", Personal Managenment, Fall, 2004

pengabdian. Hal tersebut merupakan faktor penghambat untuk pelamar umum menjadi CPNS. Pengabdian yang dimaksud disini adalah tenaga honorer kategori I. Pengabdian saja tidak cukup sebagai standar kategori I untuk menjadi CPNS, seharusnya kompetensi kinerja pegawai diutamakan. Kompetensi kinerja dapat dinilai dari tes seleksi berbagai bidang seperti yang direkomendasikan di beberapa artikel di *research proposal* peneliti sebelumnya¹⁰.

Dari hasil observasi, pengadaan CPNS dari tenaga honorer kategori II tidak mencukupi kebutuhan PNS baru di Kota Malang. Hal ini disebabkan karena setiap tahun banyak pegawai yang pensiun. Adapun daftar jumlah pensiun PNS Kabupaten Malang mulai dari tahun 2001 hingga 2011, yaitu sebagai berikut:

¹⁰Melalui program Computer Assisted Test (CAT) dari artikel SBY Perintahkan Transparansi dan Akuntabel Pada Rekrutmen CPNS 2013 (Muhammad risal,2013), pengadaan dengan cara wawancara pendahuluan, pengisian formulir lamaran, wawancara seleksi, tes seleksi, pemeriksaan referensi dan latar belakang, pemeriksaan fisik, wawancara dan penyelia, serta keputusan pengangkatan dari artikel MENGUAK TABIR PROBLEMA DALAM PEREKUTAN CPNS, (Wayan Gede Suacana,2011), dan keterlibatan pihak ke tiga yang lebih dari satu instansi yaitu beberapa PTN mulai dari pembuatan soal, pengkoreksi jawaban serta pengumuman.

**Tabel 2. Data Pegawai yang Pensiun dan Penerimaan CPNS
Tahun 2001-2013**

Uraian	TAHUN											
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	TOTAL
Rekrutmen					246	566	885	976	554	407	207	3.841
Pensiun	232	278	423	404	354	420	480	587	595	674	607	5.054
Kekosongan pegawai	232	278	423	404	108	146	405	389	41	267	400	1.213

*Sumber : Dokumen Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang
2013*

Catatan :

Jumlah Pensiun Tahun 2001-2011	: 5.054
Kebutuhan PNS (Permenpan & RB 26 Tahun 2011)	: 4.740
Selisih	: 314

Dari tabel diatas, dapat di lihat bahwa jumlah pegawai pensiun lebih banyak daripada jumlah pegawai rekrutmen. Dimana jumlah pegawai rekrutmen sebanyak 3.841 pegawai dan jumlah pegawai pensiun sebanyak 5.054 pegawai. Sedangkan kuota kebutuhan PNS yang diberikan Kemenpan kepada Pemerintah Kabupaten Malang hanya sebanyak 4.740 pegawai, jadi terdapat selisih antara pegawai pensiun dengan kuota dari Kemenpan sebanyak 314. Dari selisih tersebut Pemerintah Kabupaten Malang merekrut pegawai baru.

Adapun data mengenai perkiraan jumlah PNS dan jumlah PNS yang pensiun kedepannya berdasarkan batas usia pensiun (BUP) yaitu sebagai berikut:

Tabel 3. Proyeksi PNS Berdasarkan Usia Pensiun (BUP) Tahun 2012-2016

Uraian	TAHUN					Keterangan
	2012	2013	2014	2015	2016	
Jumlah PNS	17.535	16.906	16.277	15.602	14.896	Asumsi tidak ada penerimaan CPNS
BUP	629	629	675	706	793	
	16.906	16.277	15.602	14.896	14.103	

Sumber : Dokumen Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa jumlah PNS diKabupaten Malang kedepannya akan terus mengalami pengurangan pegawai akibatbanyak pegawai pensiun berdasarkan pada daftar batas usia yang telah tercatatdi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang. Untuk itu,Pemerintah Kabupaten Malang menginginkanpengadaan perekrutan CPNS jalur umum¹¹, karena setiap tahunnya rata-rata ada 600 sampai 700 lebih pegawai yang pensiun.

Berdasarkan data dari tabel 3, dapat dilihat bahwa perbandingan antara jumlah pegawai pensiun dan jumlah pegawai yang di rekrut tidak seimbang, hal tersebut dapat menyebabkan terhambatnya kinerja Pemerintah Kabupaten Malang dalam pelayanan public (*Public service*). Dengan jumlah seperti itu menurut Suwandi¹² kurang sesuai dengan jumlah penduduk yang harus dilayani oleh PNS Kabupaten Malang, terlebih adanya peraturan moratorium PNS selama dua tahun berturut-turut, sehingga Pegawai Kabupaten Malang kesulitan untuk melayani kebutuhan masyarakat, sementara Pemerintah Kabupaten

¹¹“pembkab butuh CPNS jalur umum”, koran Surya, Malang, 2013

¹² Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang

lebih cenderung melakukan pengangkatan tenaga honorer untuk menopang segala kebutuhan internalnya.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Nurhadiyono, tenaga honorer bisa dianggap sebagai hambatan dan juga sebagai pelengkap. Dianggap sebagai hambatan yaitu hambatan bagi masyarakat umum, karena pegawai honorer dapat menghambat masyarakat umum untuk mengikuti perekrutan CPNS (CPNS dari jalur umum). Idealnya perekrutan dilakukan dengan cara bebas, bersih dan mandiri, sehingga proses perekrutan dapat berjalan secara maksimal. Masalah yang selama ini terjadi di Kabupaten Malang adalah adanya kecenderungan untuk memprioritaskan tenaga honorer yang telah berdedikasi bersama Pemerintah dengan jangka waktu yang beragam baik k1 ataupun k2. Hal ini membuat Pemerintah Kabupaten Malang harus merekrut CPNS yang bukan dari jalur masyarakat umum.

Di sisi lain, pegawai honorer sebagai pelengkap yaitu jika ada kekosongan pegawai di SKPD, SKPD harus segera merekrut pegawai dalam waktu yang singkat. Hal tersebut dapat dilakukan hanya dengan cara merekrut pegawai kontrak. Dari kontrak tersebut dapat diperpanjang setiap 6 bulan sekali, hal ini yang menyebabkan pegawai kontrak bisa menjadi pegawai honorer, dan selanjutnya dapat diangkat menjadi pegawai tetap (PNS).

D. Penutup

1. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Hubungan pemerintah pusat dan daerah dalam pengadaan CPNS masih sentralistik yaitu menunggu keputusan Pemerintah Pusat, karena perekrutan pegawai harus disesuaikan dengan APBN. Sehingga argumen awal peneliti sesuai dengan hasil penelitian di kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang.

Pengadaan CPNS di Kabupaten Malang belum menyentuh masyarakat umum karena masih banyaknya tenaga honorer, sehingga

tenaga honorer secara tidak langsung menjadi penghambat bagi pelaksanaan pengadaan CPNS dari pelamar umum. Namun di sisi lain, tenaga honorer juga sebagai pelengkap bagi Pemerintah Kabupaten Malang untuk memenuhi kekurangan pegawai dalam waktu singkat.

2. Saran

Pemerintah Daerah harus tanggap dalam pengadaan CPNS dan harus tegas kepada pegawai kontrak agar tidak mengikat pegawai kontrak untuk berharap menjadi CPNS. BKD juga harus profesional dalam melakukan perekrutan, jangan sampai lebih dominan ke tenaga honorer. Sedangkan mengenai kuota dari Pemerintah Pusat, pelamar CPNS antara pelamar umum dan tenaga honorer harus seimbang, sehingga pelamar umum tetap mendapat kesempatan.

Daftar Pustaka

- Aini, Nurul, 2010. "*Mekanisme Rekrutmen PNS Harus Diubah*", diakses pada 2 Mei 2013 <<http://bkd.kaltimprov.go.id>>
- Koran Surya, 3 juni 2013, Malang
- Lexy Moleong. J 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosda Karya, Bandung.
- M. Risal, 2013. "*SBY Perintahkan Transparansi dan Akuntabel Pada Rekrutmen CPNS 2013*", diakses pada 17 April 2013 <<http://www.artikelbagus.com>>
- Purwono, Ahcmad, 2009. "*Strategi Rekrutmen Pegawai untuk Membangun Organisasi yang Efektif*", diakses pada 17 April 2013<<http://www.bkn.go.id>>
- Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan CPNS, diakses pada 2 Mei 2013 <<http://www.dephub.go.id>>
- Rahayuningsih , Sri, -. "*Strategi Rekrutmen dan Pengembangan Pegawai untuk Membangun Karier Meningkatkan Kualitas Organisasi yang Efektif*", diakses pada 2 Mei 2013<<http://eprints.unisbank.ac.id>>
- Siagian, Sondang 2008, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta

Suacana, Wayan Gede, 2011. *“Menguak Tabir Problema dalam Perekrutan CPNS”*, diakses pada 17 April 2013
<<http://www.warmadewa.ac.id>>

Thoha, Miftah 2007. *Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia*, Kencana, Jakarta

Undang - Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, diakses pada 17 April 2013
<<http://www.batan.go.id>>

TENTANG DOSEN PENGAMPU DAN CO. EDITOR

Hevi Kurnia Hardini, S.IP, M.A. Gov

Sebagai editor utama dalam buku ini yang juga merupakan dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), ia berkeinginan mempublikasikan karya tulis mahasiswa dalam bentuk buku yang dapat dibaca oleh khalayak luas. Buku ini ditulis dari hasil penelitian ilmiah selama mahasiswa menempuh mata kuliah Hubungan Pusat dan Daerah. Dengan melalui beberapa proses pembimbingan dan editing yang panjang, dan sebagai tanda penghargaan terhadap karya fenomenal mahasiswa, maka buku ini dengan apik mengemas dinamika hubungan pusat dan daerah di Kota Malang melalui beberapa aspek politik, sosial dan ekonomi. Ia Meraih gelar Sarjana dari Ilmu Pemerintahan UMM dan meraih gelar Master of Asian Governance dari Flinders University of Australia.

Ulin Nafi'ah

Lahir di Blitar, sehari-hari adalah mahasiswa Ilmu Pemerintahan UMM yang saat ini menempuh semester enam. Aktif pada organisasi *Government English Club (GEC)*, organisasi non-struktural di tataran jurusan Ilmu Pemerintahan. Selain itu, juga pernah menjabat sebagai ketua PPSDM Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (HIMAP), periode 2012-2013. Saat ini tengah mempersiapkan tugas akhirnya untuk gelar sarjana.

Arista Safitri

Lahir di Mojokerto, sebagai anak sulung dari tiga bersaudara adalah mahasiswa Ilmu Pemerintahan UMM semester enam. Hobi membaca buku-buku yang berkaitan dengan filsafat. Aktif dalam organisasi *Government English Club (GEC)*. Menjabat sebagai anggota PPSDM di Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (HIMAP) periode 2012-2013. Saat ini sedang mempersiapkan tugas akhir untuk gelar sarjana.

TENTANG PENULIS

Buku ini pada mulanya adalah lembaran-lembaran hasil penelitian ilmiah mahasiswa Ilmu Pemerintahan UMM yang menempuh Mata Kuliah Hubungan Pusat dan Daerah yang akhirnya disatukan dalam bentuk buku sebagai wujud apresiasi kepada mereka, adapun teman-teman yang telah mencurahkan ide dan pemikiran sehingga terwujudnya buku ini adalah sebagai berikut:

Rizki Ageng Kurnia

Faiz A. Musaad

Anter Maba

Zeta Kusuma Pramudita

Hendriyadi

Alif Sixnory Pratama

Revita Dwi C. Laut Vianty

Mohammad Sayid Karim

Nehru Prayogo

Arief Setiawan

Daryanto Prakoso

Arman Rahman Nampira

Nana Yuniarti

Andi Rahman

Akhmad Nofrian Fahma

Muh. Azhar Farizi

Mohammad Afrien

Ratri Ganita Anggraini

Detalia Yolanda

Pandu Phati

Erza Yuniantika

Yanuar Fikri

Faisal Ridho

Arista Safitri

Ida Wartti

Achmad Sardi Hidayat

Hartono

M. Dita Sakti Ananda

Ahmad Agus Amrin

Wahyudi Al-Arasy

Latiful Arif

Fina Ferlina

Haeril

Octavia Dhetaningrum R.R

Nurul Anggraeni

Erwin Nizar

Aditya Jones
Yudi Darmansyah
Yutari Amalia Putri
Luluk Zaidah
Johan Aria Bimantoro
Riyanda Barmawi
Unike Ayu Agustina
Taufiq Al Ayyubi
Jumiati Paspol Malindo
Ramadhan Setia Nugraha
Ulin Nafi'ah

Lia Aristawati
Jaka Bagus Hakiki
Novia Suhastini
Iffah Muthmainnah
Feri Ferdaus Ferdiansyah
Lalu Tambadawi
Septian Rosman Arief
Ivan Taufikur Rohman
Anyke Putri Regina
Fazri Muhamad Sengaji
Hendra Permadi

Buku HPD

ORIGINALITY REPORT

0%

SIMILARITY INDEX

0%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 3%